

Miftahul Falah, S.S.

**RIWAYAT PERJUANGAN**  
**K.H. Abdul Halim**



**Kata Pengantar :**  
**Prof. Dr. Nina Herlina Lubis, M.S.**

**Masyarakat Sejarawan Indonesia  
Cabang Jawa Barat**

**ISBN 978-979-18020-0-0**

# **RIWAYAT PERJUANGAN K. H. ABDUL HALIM**

**Oleh:**  
**Miftahul Falah, S. S.**

**Masyarakat Sejarawan Indonesia  
Cabang Jawa Barat**

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim*

Penulis : Miftahul Falah, S. S.

*Setting dan Lay-Out* : Anjani Dyah Paramita, S. Sos.

Desain Sampul : Anjani Dyah Paramita, S. Sos.

Diterbitkan Juni 2008 oleh  
Masyarakat Sejarawan Indonesia  
Cabang Jawa Barat

## **KATA PENGANTAR**

**Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia  
Cabang Jawa Barat**

Pada umumnya, tokoh-tokoh pergerakan terkemuka di Indonesia sudah diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Pemerintah RI. Namun, ternyata K. H. Abdul Halim, seorang ulama yang termasuk tokoh pergerakan, hingga kini belum diangkat sebagai pahlawan nasional. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan, apa masalahnya? Atau jangan-jangan belum pernah diusulkan oleh siapa-pun.

Ketika membaca riwayat perjuangan K. H. Abdul Halim, yang ditulis oleh Saudara Miftahul Falah, S. S. ini,

akan sangat jelas sebenarnya apa dan bagaimana perjuangan oleh ulama kelahiran Majalengka tanggal 26 Juni 1887 ini. Semasa hidupnya, K. H. Abdul Halim telah memimpin dan melakukan perjuangan melalui bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Perjuangan pada masa penjajahan Belanda, dilakukan melalui Persjariikatan Oelama (PO), Sarekat Islam, dan PII. Pemikiran K. H. Abdul Halim yang sangat berharga adalah bagaimana membina keselamatan dan kesejahteraan umat dengan melakukan perbaikan yang meliputi delapan bidang (*Al-Islah As-Samaniyah*), yaitu: akidah, ibadah, pendidikan, keluarga, adat-kebiasaan, hubungan masyarakat (sosial), perekonomian, dan perbaikan umat. Dalam syiar Islam, Persjariikatan Oelama juga menyelenggarakan tabligh, menerbitkan majalah, dan brosur sebagai media organisasi.

Selain itu, ternyata K. H. Abdul Halim juga aktif sebagai wartawan di berbagai media baik politik maupun dakwah dan telah menulis sembilan buah buku. Dalam buku-bukunya. K. H. Abdul Halim berusaha menyebarluaskan pemikirannya yang penuh toleransi, menganjurkan untuk menjunjung tinggi akidah dan akhlak masyarakat serta tidak menolak untuk mengambil contoh kemajuan dari Barat. K. H. Abdul Halim, selain aktif di bidang politik, ia juga berjasa di bidang pendidikan, terutama dengan mendirikan Santi Asromo, yang merupakan pelopor pendidikan yang menggabungkan pelajaran agama, pela-

jaran umum, dan bekal keterampilan. Perjuangan melalui bidang ekonomi, dimulai K. H. Abdul Halim dengan mendirikan *Hayatul-Qulub*, yang mencoba melawan arus kapitalisme kolonial, mendirikan perusahaan percetakan, perusahaan tenun, dan pertanian.

Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1944, K. H. Abdul halim diangkat menjadi anggota BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, K. H. Abdul Halim terus berjuang melalui berbagai saluran. K. H. Abdul Halim sempat diangkat menjadi Bupati Majalengka dan memimpin rakyat untuk melawan NICA serta diangkat menjadi panitia penggempuran Negara Pasundan, yang merupakan negara boneka bentukan pemerintah kolonial yang ingin menjajah Indonesia kembali. K. H. Abdul Halim juga diangkat sebagai anggota KNIP dan ikut hijrah ke Yogyakarta setelah Perjanjian Renville. Di Yogyakarta, K. H. Abdul Halim menjadi pelopor berdirinya Universitas Islam Indonesia (UII).

Setelah pengakuan kedaulatan RI, K. H. Abdul Halim kembali ke Jawa Barat dan pada tahun 1951 K. H. Abdul Halim terpilih sebagai anggota DPRD Tingkat I Jawa Barat. Kemudian tahun 1956 diangkat menjadi anggota Konstituante. Perjuangan K. H. Abdul Halim berakhir saat ia meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1962.

Demikian perjuangan K. H. Abdul Halim yang diuraikan dalam buku ini. Jadi, jelaslah bahwa ulama besar ini sebenarnya telah berjasa besar bagi bangsa dan negara ini sehingga layak untuk diangkat sebagai pahlawan nasional.

Buku ini agaknya dimaksudkan penulisnya untuk mendokumentasikan riwayat hidup seorang tokoh pejuang serta warisannya yang terus dikembangkan hingga masa paling mutakhir, di mana salah seorang pewaris K. H. Abdul Halim, yaitu Ketua Umum PP PUI, Akhmad Herriawan, Lc., berhasil terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat pada Pilgub 13 April 2008.

Kiranya buku ini bermanfaat selain untuk mewariskan nilai-nilai kejuangan K. H. Abdul Halim kepada generasi penulis, juga dapat menjadi sumbangan untuk memperkaya historiografi Indonesia, khususnya dalam bentuk biografi tokoh.

Bandung, 1 Juni 2008

**Prof. Dr. Hj. Nina H. Lubis, M. S.**

## **KATA PENGANTAR**

### **Penulis**

K. H. Abdul Halim merupakan seorang sosok ulama pejuang yang menginginkan perubahan di kalangan umat Islam. Sebagai seorang ulama, ia berjuang dengan mempergunakan kekuatan pemikirannya. Pendidikan merupakan aspek yang diperjuangkan oleh dirinya, karena melalui pendidikan-lah perbaikan umat Islam dapat diwujudkan. Sungguh, betapa besar jasa K. H. Abdul Halim dalam melayani umat dan betapa banyak peninggalannya yang sampai sekarang masih terus hidup. Sebuah pesantren yang bernama Santi Asromo, masih terus tumbuh sebagai tempat menempa generasi baru. Demi-

kian juga dengan organisasi massa yang bernama Persatuan Umat Islam (PUI) yang bergerak di bidang sosial budaya masih terus berkembang secara positif.

Namun, ketokohan K. H. Abdul Halim sepertinya kalah bersinar dibandingkan dengan ulama pejuang seangkatannya, seperti K. H. Asy'ari (NU) dan K. H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah). Generasi muda, khususnya di luar lingkungan PUI kurang begitu mengenal ulama pejuang dari Majalengka. Padahal kalau disimak perjuangannya, terutama di bidang pendidikan, betapa telah menyediakan sistem pendidikan yang sampai sekarang sebagian besar dikembangkan oleh Majelis Pengajaran PUI.

Sebagai seorang ulama pejuang, sudah barang tentu Beliau tidak mengharapkan penghargaan apapun dari umatnya. Beliau hanya berharap jerih payahnya memperjuangkan nasib anak bangsa dari keterpurukan intelektual, ekonomi, dan keterampilan akan mampu menjangkat harkat dan martabat umat. Akan tetapi, sudah sepantasnya generasi muda menghargai pengorbanan Beliau dengan mengamalkan pemikiran-pemikiran untuk kemaslahatan umat. Bisa jadi, sebagian pemikirannya sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman. Akan tetapi, masih ada juga pemikirannya yang relevan dengan kemajuan zaman.

Buku ini berusaha untuk menghimpun sebuah cerita mengenai perjalanan hidup Sang Ulama Pejuang tersebut. Keterbatasan sumber mengakibatkan tidak secara sempurna perjalanan hidup Beliau terekam dalam buku. Namun begitu, hal-hal yang sifatnya pokok, Insya Allah dapat disimak dalam buku ini. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Persatuan Ummat Islam (PUI) yang telah membantu penulis merampungkan biografi ini. Mereka dengan senang hati menyediakan data yang penulis butuhkan. Khususnya kepada Kang Wawan Hernawan, Drs., M. Ag. yang telah menemani penulis menelusuri jejak perjuangan K. H. Abdul Halim. Saya ucapkan terima kasih. Semoga buku kecil ini bermanfaat.

Bandung, Juni 2008

Miftahul Falah, S. S.

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim; Bagian Awal*

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR KETUA MSI JABAR</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR PENULIS</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xiii</b>
<b>I. Dari Majalengka Sampai Ke Mekkah</b>	<b>1</b>
1. Otong Syatori Nama Kecilnya	1
2. Dari Pesantren Ke Pesantren	8
3. Meninggalkan Majalengka Menuju Mekkah	12
<b>II. Berjuang Menggapai Cita-Cita</b>	<b>23</b>
1. Gemuruh Pergerakan Nasional	23
2. Perkembangan Persyarikatan Oelama (PO)	29
3. Pemikiran K. H. Abdul Halim	46

<b>III. Mendirikan Santi Asromo</b>	<b>57</b>
1. Keadaan Pendidikan Pada Awal Abad Ke-20	57
2. Berdirinya Santi Asromo	69
<b>IV. Mengabdi Kepada Republik</b>	<b>103</b>
1. Berjuang Melawan Matahari Terbit	103
2. Proklamasi Kemerdekaan	125
3. Mempertahankan NKRI	134
<b>V. Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)</b>	<b>147</b>
1. K. H. Ahmad Sanusi Pendiri POII	147
2. Proses Fusi Antara POI Dan POII	153
<b>VI. Titip Santi Asromo dan PUI</b>	<b>167</b>
1. Masa Tua	167
2. Santi Asromo	183
3. PUI Sepeninggalnya K. H. Abdul Halim	192
<b>DAFTAR SUMBER</b>	<b>203</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>213</b>

# **I. DARI MAJALENGKA SAMPAI KE MEKKAH**

## **1. Otong Syatori Nama Kecilnya**

Majalengka merupakan sebuah wilayah setingkat kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Barat. Daerah yang terletak di kaki Gunung Ciremai ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di sebelah barat, Kabupaten Indramayu di sebelah utara, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di sebelah timur, serta Kabupaten Ciamis di sebelah selatan. Kabupaten Majalengka memiliki luas wilayah sekitar 1.209 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 976.868 jiwa (tahun 1986). Sebagian be-

sar wilayahnya yang mencakup sekitar 46% dari luas kabupaten, berupa dataran rendah dengan suhu berkisar  $19,4^{\circ}$  –  $32,6^{\circ}$ . Suhu yang sejuk hanya dapat dirasakan di daerah selatan yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang terjal dengan hutan tropisnya (ENI<sup>10</sup>, 1990: 44).

Dari dulu, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu sentra pertanian di Propinsi Jawa Barat. Namun demikian, bukan berarti tidak memiliki peranan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah pernah terjadi di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Catatan sejarah yang paling menonjol terjadi ketika bangsa Indonesia memasuki masa Pergerakan Nasional yang dimulai ketika dr. Sutomo dan dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Seakan tidak mau ketinggalan, masyarakat Majalengka pun mengambil peran dalam perjuangan memperjuangkan nasib bangsa. Persatuan Umat Islam (PUI) yang sampai sekarang masih tetap eksis sebagai organisasi massa, benihnya mulai tumbuh di Kabupaten Majalengka, melalui kepemimpinan dan perjuangan panjang salah seorang putra terbaiknya, K. H. Abdul Halim.

Pada akhir Abad Ke-19, Penghulu Kawedanaan Jatiwangi dipegang oleh K. H. Muhammad Iskandar. Menurut silsilahnya, ia masih keturunan Maulana Hasanudin, anak Sunan Gunung Jati sekaligus penguasa Kesultanan

Banten. Konon katanya ketika keadaan Kesultanan Banten diliputi oleh kekacauan politik, banyak pemuka agama yang dibuang atau melarikan diri ke luar Banten. Salah seorang ulama yang melarikan diri ke Majalengka itu bernama Kyai Nursalim, yang katanya masih ada keturunan Maulana Hasanudin, sebagai cucu penguasa Banten itu. Sebagai seorang ulama, ia tetap menyebarkan syiar Islam di Majalengka dan sebagai pusat dakwahnya, ia mendirikan sebuah mesjid. Dari mesjid yang pertama dibangun di Majalengka inilah, Kyai Nursalim melakukan dakwah. Selanjutnya diceritakan bahwa setelah sekian lama tinggal di Majalengka, Kyai Nursalim kemudian menikah, entah dengan siapa, dan dikaruniai beberapa orang anak. Salah seorang anaknya dikenal dengan nama K. H. Abdullah Qomar.

Tidak ada sumber yang menyebutkan dengan siapa K. H. Abdullah Qomar menikah, namun katanya ia memiliki enam orang anak. Salah satunya bernama K. H. Muhammad Iskandar yang pada 1880-an dipercaya oleh Pemerintah Hindia Belanda memegang jabatan Penghulu Kawedanaan Jatiwangi (Akim, 1964: 5; Sukarsa, 2007: 1). Jadi, berdasarkan kisah itu, K. H. Muhammad Iskandar merupakan keturunan kelima Maulana Hasanudin dan terlepas dari kebenaran kisah itu, ia merupakan seorang keturunan *menak* sehingga wajarlah ia memegang jabatan sebagai penghulu. K. H. Muhammad Iskandar

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Dari Majalengka sampai ke Mekkah*

kemudian menikah dengan Hj. Siti Mutmainah, anak dari K. H. Imam Safari yang masih keturunan Sunan Gunung Jati juga (Sukarsa, 2007: 1), meskipun ada juga yang menyebutkan bahwa Siti Mutmainah merupakan keturunan Pangeran Sabranglor dari Kesultanan Demak (Hernawan, 2007: 23). Oleh karena itu, jelaslah bahwa pernikahan antara K. H. Muhammad Iskandar dan Hj. Siti Mutmainah masih diikat oleh hubungan darah, yakni berpangkal kepada Sunan Gunung Jati, salah seorang Wali Sanga yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat sekaligus pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten (Lubis, 2006: 261).

Dari pasangan yang berlatar belakang agama sangat kuat inilah, lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Otong Syatori. Dalam sumber lain, nama kecil Abdul Halim adalah Mohammad Sjatari, tetapi nama Otong-lah yang paling dikenal oleh masyarakat (Bahar (eds.), 1995: 577). Otong Syatori merupakan anak bungsu pasangan K. H. Muhammad Iskandar dengan Hj. Siti Mutmainah. Ia memiliki tujuh orang saudara kandung, yakni: Iloh Mardiyah, Empon Kobtiyah, E. Sodariyah, Ju-baedi, Iping Maesaroh, Hidayat, dan Siti Sa'diyah (Hernawan, 2007: 23; Sukarsa, 2007: 1-2; Wanta, 1991: 4-5).

Otong Syatori dilahirkan pada 26 Juni 1887 di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka (Azis-Halim, 1968; Gunseikanbu, 1986: 430; Noer, 1995:

80; Wanta, 1986: 1). Terdapat perbedaan mengenai tahun dan tempat kelahiran Otong Syatori. Dalam suatu sumber, disebutkan bahwa Otong Syatori dilahirkan di Majalengka pada 17 Juni 1887 (Bahar (eds.), 1995: 577; Rosidi (eds.), 2000: 7). Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa Otong Syatori lahir tahun 1892 (Akim, 1964: 5; Jalaludin, 1990: 372), tetapi penanggalan ini dibantah oleh K. H. Cholid Fadlulloh, salah seorang cucunya, yang menegaskan bahwa kakeknya itu dilahirkan tahun 1887 sesuai yang tertera dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah (Wawancara tanggal 7 April 2008). Mengenai tempat kelahirannya, Deliar Noer (1995: 80) mengatakan bahwa Otong Syatori dilahirkan di Desa Ciborelang, bukan Desa Sutawangi, meskipun kecamatannya sama, yakni Jatiwangi. Namun demikian, perbedaan desa kelahirannya itu tidak perlu diperdebatkan karena kedua nama desa itu diberikan untuk satu desa yang sama.

Sebagai sebuah kelurga dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat, pendidikan dasar yang paling awal diberikan kepada Otong Syatori adalah pendidikan keagamaan. Baik K. H. Muhammad Iskandar maupun Hj. Siti Mutmainah, memberikan pendidikan dasar keagamaan kepada Otong Syatori sebelum memasuki usia sekolah. Namun sayangnya, pendidikan dasar keagamaan yang diterima oleh Otong Syatori tidak tuntas secara sempur-

na. Artinya, ketika ayahandanya meninggal dunia pada saat usia Otong Syatori masih kecil, pendidikan dasar keagamaan hanya diberikan oleh Ibunda tercintanya, Siti Mutmainah. Namun demikian, dengan latar belakang tradisi keislaman yang begit kuat, Siti Mutmainah tidaklah terlalu sulit untuk menanamkan dasar-dasar keagamaan kepada anak-anaknya (Jalaludin, 1990: 372).

Sebagai seorang anak penghulu, tidak ada keistimewaan pada diri Otong Syatori. Ia tidak berbeda dengan anak-anak sebayanya. Statusnya sebagai anak yatim tidak membuat Otong Syatori menjadi anak yang menutup diri. Justru sebaliknya, ia merupakan anak yang mudah bergaul dibandingkan dengan teman-teman sebayanya dan tumbuh sebagai anak yang cenderung lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Otong Syatori bermain dan bergaul tidak hanya dengan anak-anak pribumi, melainkan juga dengan anak-anak keturunan Arab dan Cina. Mereka selalu bersama-sama membangunkan warga desanya untuk melaksanakan makan sahur pada saat menjalankan ibadah puasa Bulan Ramadhan. Tradisi ini lebih dikenal dengan sebutan *obrog-obrog* (Sukarsa, 2007: 3). Hal yang membedakan dari teman-teman sebayanya, Otong Syatori sangat menyukai pertunjukkan wayang kulit purwa dan kalau ada masyarakat yang hajat serta menggelar pertunjukan wayang, ia selalu menontonnya yang tentunya tidak sen-

diri, tetapi selalu bersama dengan orang tua atau saudara kandungnya (Wanta, 1986: 1).

Seiring dengan kepindahan keluarganya ke Kampung Cideres, Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan sekitar tahun 1896, intensitas pendidikan keagamaan yang diterima oleh Otong Syatori semakin meningkat. Intensitas belajar membaca Al Quran yang diterima oleh Otong Syatori semakin meningkat dan proses pembelajaran itu dilakukannya sehabis menunaikan shalat lima waktu. Dengan ketekunan dan kedisiplinannya, pada usia 10 tahun (sekitar tahun 1897) Otong Syatori sudah mampu membaca Al Quran. Untuk melanjutkan pelajaran Al Qurannya, Otong Syatori diserahkan kepada seorang kyai yang tinggal di Kampung Cideres, kampung halaman baru Otong Syatori (Hernawan, 2007: 29; Wanta, 1991: 3).

Di Cideres, selain belajar membaca Al Quran, Otong Syatori pun belajar membaca dan menulis huruf latin kepada Mr. van Hoeven seorang pendeta yang bertanggung jawab atas kegiatan *zending* di Majalengka (Jalaludin, 1990: 374; Sukarsa, 2007: 5). *Zending* merupakan kegiatan menyebarkan agama Kristen Protestan kepada penduduk pribumi yang belum menganut Protestan. Landasannya adalah bagaimana caranya mengubah agama penduduk pribumi menjadi penganut Protestan untuk mempertahankan kekuasaan

Belanda di Indonesia. Sementara itu, untuk Katolik kegiatan semacam itu dikenal dengan nama *misi* (Noer, 1991: 26-27). Konon katanya, Mr. Van Hoeve sangat kagum terhadap kecerdasan Otong Syatori sehingga sangat menyayanginya. Namun demikian, kecerdasannya itu tidak mengubah cita-citanya untuk memperdalam ilmu keislaman sehingga ia tidak memasuki sekolah formal. Pengetahuan umum yang dimiliki oleh Otong Syatori diperolehnya dengan cara belajar secara otodidak. Otong Syatori tidak sekolah di lembaga pendidikan formal, tetapi sekolah di berbagai pesantren. Oleh karena itu, di dalam dokumen resmi pemerintah, disebutkan bahwa Otong Syatori itu tidak sekolah.

## **2. Dari Pesantren ke Pesantren**

Pada 1897, ketika usianya telah memasuki masa sekolah, Otong Syatori mulai berkenalan dengan dunia pesantren. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Otong Syatori memang tidak pernah duduk di sekolah, baik sekolah pribumi apalagi sekolah kolonial. Bukan karena di Majalengka pada waktu itu tidak ada sekolah, tetapi karena memang pilihannya ke pesantren.

Orang tua Otong Syatori memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga pendidikan sekolah formal

yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda. Lembaga pendidikan formal dipandang tidak akan mampu membentuk karakter individu yang kuat agamanya, karena ketiadaan pelajaran keislaman dalam kurikulumnya. Kondisi itulah yang mendorong orang tua Otong Syatori memasukkan anaknya ke pesantren, bukan ke sekolah formal (Hernawan, 2007: 11).

Demikianlah, pada tahun 1897, orang tua Otong Syatori memasukkan dirinya ke pesantren untuk memperdalam ilmu keislaman yang dasar-dasarnya telah diberikan di lingkungan keluarganya. Sejak tahun itulah, ia berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain selama kurang lebih sebelas tahun, baik pesantren yang ada di Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan Pekalongan (Ekadjati, 2006: 273).

Sebagai permulaan, Otong Syatori dimasukkan ke sebuah pesantren yang ada di sekitar Majalengka. Pesantren itu namanya Ranji Wetan di Jatiwangi dan belajar ilmu keislaman kepada K. H. Anwar selama sekitar satu tahun. Untuk mempelajari *qira'at* dan *tajwid*, pada 1898 Otong Syatori pergi ke Pesantren Lontangjaya di Desa Panjalin, Kecamatan Leuwimunding, Majalengka yang pada waktu itu diasuh oleh K. H. Abdullah.

Setelah satu setengah tahun Otong Syatori nyantri di Pesantren Lontangjaya, sekitar tahun 1899 K. H. Abdullah menyuruh Otong Syatori untuk berguru kepada K.

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Dari Majalengka sampai ke Mekkah*

H. Sjuja'i di Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon. Di pesantren ini, selain memperdalam ilmu keagamaan, Otong Syatori pun mempelajari Kesuasteraan Arab. Beberapa bulan kemudian, Otong Syatori pun nyantri kepada K. H. Ahmad Sobari yang pada saat itu berkedudukan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ciwedus, Cilimus, Kabupaten Kuningan. Masalah *fiqh* merupakan fokus utama Otong Syatori ketika belajar di pesantren ini. Ketika nyantri di pesantren ini, Otong Syatori sempat juga menuntut ilmu kepada K. H. Agus dari Pesantren Kanayangan, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah selesai, ia disuruh oleh K. H. Agus kembali lagi nyantri ke Pondok Pesantren Ciwedus untuk menyelesaikan pendidikan keagamaannya di pesantren (Sukarsa, 2007: 11).

Selama pengembaraannya dari satu pesantren ke pesantren lainnya, yang menonjol dalam diri Otong Syatori tidak hanya kecerdasannya dalam menguasai ilmu keislaman. Kemandirian jiwanya pun begitu menonjol dibandingkan dengan teman-teman santri lainnya. Hal tersebut nampak dari jiwa kewirausahaan yang dimilikinya sehingga berbagai rintangan yang dihadapinya selama nyantri mampu diatasi oleh dirinya. Berdagang merupakan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh Otong Syatori dan semakin menguat ketika ia nyantri ke luar Majalengka. Ia menjual aneka produk, di antaranya ke-

cap (yang dibawanya dari Majalengka, ketika ada kesempatan pulang kampung), sarung, kain batik, minyak wangi, dan kitab-kitab pelajaran agama Islam yang memang sangat dibutuhkan oleh para santri. Hasil dagangnya itu, selain dipergunakan untuk biaya hidup selama nyantri, sebagian keuntungannya pun ia kirimkan kepada orang tuanya (Akim, 1964: 8; Jalaludin, 1990: 373; Sukarsa, 2007: 11). Ketika nyantri ke Pekalongan pun, jiwa dagangnya tidak sedikit pun menjadi mengendur.

Pada 1907, ketika masih nyantri di Kuningan, Otong Syatori dipanggil pulang oleh orang tuanya. Setibanya di Majalengka, ia dijodohkan kepada Siti Murbiyah, anak K. H. Muhammad Ilyas bin Hasan Basyari, yang pada waktu berkedudukan sebagai *Hoofd Penghulu Landraad Majalengka* (Wawancara dengan K. H. Cholid Fadlulloh, 7 April 2008). Dalam sumber lain disebutkan bahwa pernikahan terjadi pada 1908 dan masih bersifat *kawin gantung*, karena setelah menikah mereka tidak hidup dalam satu atap. Masing-masing masih tinggal di rumah orang tuanya sampai usianya cukup dewasa atau seluruh persyaratan dipenuhi. Kawin gantung dilakukan oleh mereka mengingat usia Siti Murbiyah masih sangat muda, yakni sekitar 11 tahun (Hernawan, 2007: 29-30; Sukarsa, 2007: 16). Akan tetapi, berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirayu tahun 1980,

pernikahan itu terjadi pada 1907. Hal itu dibenarkan oleh Siti Murbiyah dengan membubuhkan *cap jempol* dalam dokumen itu. Sama seperti orang tuanya, pernikahan Otong Syatori dengan Siti Murbiyah pun masih menunjukkan adanya ikatan kekerabatan yang hubungannya masih dekat (Hernawan, 2007: 30; Wanta, 1991: 4-5; Wawancara dengan K. H. Cholid Fadlulloh, 7 April 2008). Jalaludin (1990: 157) menggambarkan hubungan kekerabatan Otong Syatori dengan Siti Murbiyah sebagai berikut.

### **3. Meninggalkan Majalengka Menuju Mekkah**

Setahun setelah melaksanakan pernikahan atau tepatnya pada tahun 1908 orang tuanya memutuskan untuk memberangkatkan Otong Syatori ke Mekkah. Selain untuk menjalankan ibadah haji, kepergian Otong Syatori ke Mekkah pun dimaksudkan untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, Otong Syatori pun berangkat ke Mekkah dengan menggunakan kapal laut. Setelah sekian bulan mengarungi lautan bersama para pedagang Gujarat, Arab, dan Cina, Otong Syatori tiba di Mekkah dan langsung bergabung dengan jamaah haji dari berbagai negara untuk melaksanakan Rukun Islam yang kelima. Ketika semua rukun haji telah dilaksanakan oleh Otong

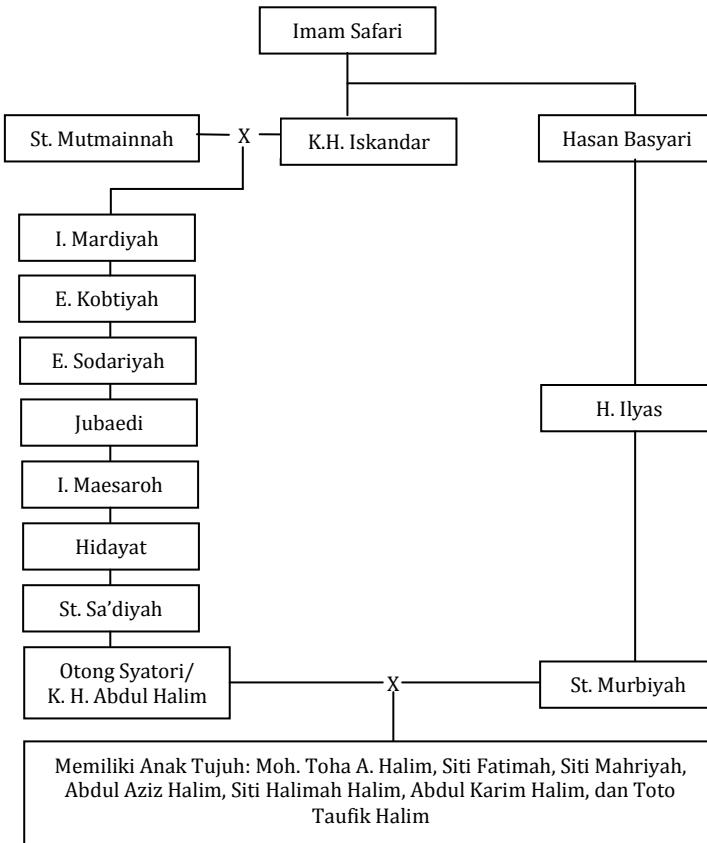
Syatori, maka sesuai dengan tradisi dari bangsa Indonesia, di depan namanya dicantumkan gelar *haji*. Seharusnya H. Otong Syatori, namun ternyata namanya diubah menjadi H. Abdul Halim. Sejak saat itu lah, namanya kemudian lebih dikenal sebagai H. Abdul Halim.

Setelah selesai menunaikan ibadah haji, H. Abdul Halim mukim di Mekkah selama tiga tahun (1908-1911). Tujuannya adalah hendak memperdalam ilmu keislamananya dengan berguru ke beberapa orang sykeh. Tidak disebutkan secara tegas bahwa H. Abdul Halim belajar di Mekkah. Akan tetapi, disebutkan bahwa ia belajar di pusat jaringan *Haramayn* (Tanah Haram, yakni Mekkah dan Medinah) sehingga para penulis menafsirkan bahwa ia belajar di Mekkah (Hidajat, 1967: 19; Prawira, 1975: 17).

Selama mukim di Mekkah, H. Abdul Halim berguru kepada empat orang ulama, yaitu Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khayyat, Emir Syakib Arslan, dan Syekh Tanthawi Jauhari (*Soeara Persjarikatan Oelama*, 1932: 63; Steenbrink, 1984: 145-146; Stoddard, 1966: 320). Keempat gurunya itu berhasil mempengaruhi jiwanya ketika ia kembali tanah air dan berjuang memperbaiki kondisi umat yang sudah timpang. Namun sayangnya, keterangan mengenai gurunya itu tidak ditemukan secara lengkap, kecuali Syekh Akhmad Khatib dan Emir Syakib Arslan.

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Dari Majalengka sampai ke Mekkah**

Bagan 1: Silsilah K. H. Abdul Halim



Syekh Ahmad Khatib dilahirkan di Bukittinggi tahun 1855 sebagai anak dari seorang hakim Kaum Paderi sehingga ia merupakan bagian dari kaum tersebut.

but. Kaum Paderi merupakan sekelompok ulama di Minangkabau yang berusaha untuk membersihkan ajaran Islam dari adat yang dipandangnya telah keluar dari ajaran Islam (Kartodirdjo, 1973: 90). Upaya itu dilakukannya sejak awal abad ke-19 dan mendapat tentangan yang keras dari Kaum Adat yang disokong oleh Pemerintah Inggris (Raffles) kemudian disokong pula oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pertentangan itu bermuara pada suatu pertempuran yang terjadi dalam kurun waktu 1821-1838 dan dalam pertempuran itu Kaum Paderi dipimpin oleh Muhammad Syahab atau Pelo Syarif yang lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990<sup>4</sup>: 171-172). Meskipun dalam pertempuran itu Kaum Paderi mengalami kekalahan, tetapi gerakan pemurnian ajaran Islam dari pengaruh adat terus dilancarkan dan salah seorang pemimpinnya adalah Syekh Akhmad Khatib.

Untuk memperdalam ilmu keislamananya dan melihat langsung upaya Kaum Wahabi membersihkan Islam dari bid'ah, tahun 1876 Syekh Akhmad Khatib pergi ke Mekkah dan mukim secara permanen di kota suci itu. Meskipun mukim di Mekkah, sebagai orang yang sangat anti-Belanda (istilah yang dikemukakan oleh H. Agus Salim), Syekh Ahmad Khatib menyebarkan pemikiran pembaharuannya di Mekkah kepada para muridnya, termasuk kepada H. Abdul Halim. Ketika ma-

sih menjadi Imam Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram, Sykeh Ahmad Khatib meninggal tahun 1916 di Mekkah (Noer, 1991: 38-39). Pandangan dan perilaku gurunya ini kelak mempengaruhi H. Abdul Halim ketika kembali tanah air dan berjuang memperbaiki umat dengan tidak mau bekerja sebagai bagian dari birokrasi kolonial.

Sementara itu, Emir Syakib Arslan merupakan seorang tokoh nasionalis Arab dan Syekh Tanthawi Jauhari merupakan seorang cendekiawan Mesir yang selalu mendorong kaum muslimin untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Ia juga dikenal sebagai seorang mufassir ilmu (Hernawan, 2007: 31; Stoddard, 1966: 63). Latar belakang para gurunya tersebut, nantinya akan mempengaruhi jiwa perjuangan H. Abdul Halim ketika kembali ke Indonesia. Pemikiran dan perjuangan Emir Syakib Arslan pernah dimuat dalam *Soeara Persjariikatan Oelama* (SPO) sebagai media komunikasi bagi Persjariikatan Oelama, organisasi yang didirikan H. Abdul Halim (SPO, Juni 1931: 69). Ketika menggarap aspek pendidikan, pengaruh pembaharuan yang diterima dari gurunya itu sangat terlihat sekali sehingga dirinya sempat dimusuhi oleh sebagian ulama tradisional, meskipun H. Abdul Halim selalu mengatakan bahwa dirinya termasuk ke dalam golongan tradisional, bukan modernis (Wawancara dengan K. H. Cholid Fadlulloh, 7 April 2008).

Ketika di Mekkah, jiwa pembaharuannya semakin tumbuh, karena H. Abdul Halim pun bersinggungan dengan pemikiran para pembaharu Islam terutama dari Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abdur. Persinggungan itu memang dimungkinkan karena para gurunya tidak melarang untuk membaca tulisan kelompok pembaharu, malahan menganjurkan untuk membacanya meskipun dengan tujuan berbeda. Syekh Ahmad Khatib membolehkan H. Abdul Halim membaca tulisan para pembaharu Islam di Timur Tengah dengan tujuan agar ia menolak pemikiran mereka (Ekadjati, 2006: 274; Noer, 1991: 39).

Selain itu, selama bermukim di Mekkah, H. Abdul Halim menyempatkan diri untuk melakukan melihat dan mempelajari sistem pendidikan, kurikulum, dan metode belajar di lembaga pendidikan, yakni di Babussalam dekat Mekkah dan satu lagi di Jeddah. Kedua lembaga pendidikan itu sudah meninggalkan sistem *halaqah* dalam proses belajar mengajarnya dan menggantinya dengan menerapkan sistem kelas lengkap dengan bangku, meja, dan peralatan lainnya. Bagi H. Abdul Halim, hal tersebut merupakan sesuatu yang baru karena selama mengikuti pendidikan di berbagai pesantren di tanah airnya, ia belajar secara *halaqah*, tidak ada sistem kelas dan sarana lainnya, kecuali kitab kuning (Ekadjati, 2006: 274; Noer, 1991: 81). Begitu ter-

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Dari Majalengka sampai ke Mekkah**

kesannya dengan sistem pendidikan yang diterapkan di Babussalam sehingga memberikan pengaruh yang begitu mendalam terhadap jiwa H. Abdul Halim. Pengalamannya itu ia terapkan di tanah air ketika mulai berjuang memperbaiki pendidikan dengan meninggalkan sistem *halaqah* dan menggantinya dengan sistem kelas.

Diskusi mengenai masalah keagamaan, pendidikan, dan politik di tanah air, tidak hanya dilakukan dengan gurunya saja. Diskusi itu ia lakukan dengan sesama jamaah dan murid asal Indonesia. H. Abdul Halim sering menyebut tiga orang Indonesia yang selalu menjadi teman diskusinya, yaitu Mas Mansur, Abdul Wahab Hassullah, dan Ahmad Sanusi. Mas Mansur berangkat ke Mekkah bersama-sama dengan Otong Syatori, yakni tahun 1908. Akan tetapi, kebersamaan mereka di Mekkah tidaklah terlalu lama, karena Mas Mansur melanjutkan sekolahnya ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Pertemuannya dengan Abdul Wahab Abdullah terjadi pada saat mereka sedang belajar di suatu madrasah di Mekkah. Tidak jelas disebutkan tahun berapa pertemuan itu terjadi.

Sementara itu, pertemuan dengan Ahmad Sanusi juga terjadi di Mekkah. Ahmad Sanusi datang ke Mekkah tahun 1904, jadi empat tahun lebih dulu daripada Otong Syatori. Oleh karena merasa berasal dari satu daerah

(Pasundan) pertemuan tersebut berkembang menjadi sebuah persahabatan. Konon katanya mereka bersepakat bahwa jika kelak kembali ke Indonesia, mereka akan berjuang membebaskan bangsanya dari penjajahan Belanda melalui pendidikan (Sukarsa, 2007: 20-21). Hubungan khusus dengan K. H. Ahmad Sanusi terus berlanjut ketika mereka sudah kembali ke tanah air. Dari hubungan itulah, kelak di kemudian hari lahir sebuah organisasi yang bernama Persatuan Umat Islam (PUI) yang merupakan organisasi massa hasil fusi antara PUI dan PUII.

H. Abdul Halim beserta ketiga kawannya itu selalu membicarakan tulisan-tulisan para pemikir pembaharu khususnya dari Jamaludin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka memandang bahwa kondisi di Indonesia akan berubah apabila masalah pendidikan dapat segera diperbaharui. Kelak di kemudian hari, mereka secara aktif berjuang memperbaiki pendidikan di bawah pengaruh para pemikir pembaharu Islam tersebut. Mas Mansur aktif di Muhammadiyah, Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan K. H. Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Sanusi mendirikan Al-Ittihadiyatul Islamiyyah (Noer, 1991: 82). H. Abdul Halim kemudian mendirikan Perserikatan Ulama (PU) yang bergerak di bidang pendidikan. Walaupun demikian, H. Abdul Halim tidak melepaskan keyakinannya terhadap

Mazhab Syafi'i meskipun hubungannya lebih dekat ke kalangan modern daripada kalangan tradisi (Noer, 1991: 89). Tidak hanya itu, selama di Mekkah pun H. Abdul Halim bergaul secara aktif dengan orang-orang Cina muslim dan memanfaatkan pergaulannya itu untuk mempelajari bahasa Cina. Sangat dimungkinkan dalam pergaulannya itu, H. Abdul Halim tidaklah terlalu kesulitan karena telah memiliki pengetahuan dasar bahasa Cina sebagai akibat pergaulannya dengan anak-anak keturunan Cina ketika masih kecil (Jalaludin, 1990: 376; Wanta, 1986: 2).

Setelah tiga tahun mukim di Mekkah, tahun 1911 H. Abdul Halim pulang ke Majalengka dan dijemput oleh Hj. Jamilah (ibu mertua) dan H. Burhanul Asyikin (kakak ipar). Ia kemudian tinggal bersama-sama denganistrinya, Siti Mutmainah, di rumah mertuanya. Empat tahun kemudian, lahirlah anaknya yang pertama yakni Moh. Toha A. Halim. Ia bukanlah anak satu-satunya H. Abdul Halim, karena dari rahim istrinya kemudian dilahirkan lagi enam orang putra, yakni Siti Fatimah, Siti Mahriyah, Abdul Aziz Halim, Siti Halimah Halim, Abdul Karim Halim, dan Toto Taufik Halim (Akim, 1968: 6-8; Wawancara dengan K. H. Cholid Fadlulloh, 7 April 2008). Sayangnya, H. Abdul Halim harus kehilangan anak sulungnya yang meninggal dunia pada 8 Februari 1936 dalam usia 21 tahun (As-Sjoero, 1936: 26-27).

Meskipun hanya tiga tahun menuntut ilmu di Mekkah, tetapi berhasil memberikan pengaruh yang besar kepada dirinya untuk berjuang memperbaiki keadaan umat Islam di tanah airnya. Pada waktu itu, keadaan kaum mislimin sangat diprihatinkan oleh H. Abdul Halim, khususnya di bidang ekonomi dan pendidikan. Dengan bekal ilmu yang dimilikinya dan cita-citanya mewujudkan keadaan umat yang jauh lebih baik, H. Abdul Halim mulai melangkah menggapai cita-citanya: menciptakan kondisi umat yang seimbang antara kehidupan duniaawi dan ukhrowi.

H. Abdul Halim tidak tertarik untuk berkecimpung di dunia birokrasi kolonial, sebagaimana yang ditawarkan oleh ayah mertuanya yang waktu itu berkedudukan sebagai *Hoofdpenghulu Landraad* Majalengka. Sikapnya itu merupakan representasi atas pengaruh gurunya Syekh Akhmad Chatib yang menolak bekerja dalam birokrasi kolonial, sehingga menuai cacian dari keluarganya. H. Abdul Halim memiliki keyakinan bahwa perjuangan memperbaiki pendidikan dapat juga dilakukan tanpa harus menjadi bagian dari sistem birokrasi kolonial. Dengan kemandirian itu dan sepulangnya dari Mekkah, H. Abdul Halim secara konsisten terus berjuang memperbaiki umat, terutama di bidang pendidikan.



## **II. BERJUANG MENGGAPAI CITA-CITA**

### **1. Gemuruh Pergerakan Nasional**

Ketika H. Abdul Halim pergi ke Mekkah, situasi politik di Indonesia mulai memasuki fase pergerakan nasional. Fase ini merupakan bentuk reaksi dan perlawanan terhadap penjajah Belanda yang coraknya berbeda dengan reaksi dan perlawanan sebelum tahun 1900. Sebelum tahun 1900, reaksi dan perlawanan rakyat Indonesia bersifat lokal, negatif (mengundurkan diri ke tempat atau daerah yang tidak terjangkau oleh kekuasaan penjajah dan mencari perlindungan kepada ilmu gaib), irrasional, dan sporadis. Setelah tahun 1900,

reaksi dan perlawanan terhadap penjajah memperlihatkan sifat nasional, positif, diorganisir secara teratur dan rasional, dan merencanakan masa depan (Moedjantoro, 1993: 25). Fase inilah yang kemudian dikenal dengan istilah masa pergerakan nasional.

Pergerakan nasional yang berkembang di Indonesia tidak dengan sendirinya lahir, melainkan sebagai sebuah hasil proses perjuangan yang panjang. Sudah barang tentu dipengaruhi pula berbagai faktor baik intern maupun ekstern. Perlu dikemukakan di sini bahwa faktor intern yang mempengaruhi pertumbuhan pergerakan nasional, antara lain sebagai berikut.

1. Penderitaan akibat penjajahan.
2. *Pax Neerlandica* menyadarkan bangsa Indonesia untuk memikirkan kesatuan bangsa Indonesia.
3. Kemudahan komunikasi antarpulau yang berdampak pada semakin seringnya mereka bertemu.
4. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang membatasi penggunaan bahasa Belanda dan membiarkan bahasa Melayu dipergunakan rakyat dalam komunikasi sehari-hari menyadarkan bahwa mereka memiliki pengikat kesatuan bangsa yang ampuh.
5. Undang-Undang Desentralisasi 1903 telah memperkenalkan nilai-nilai demokrasi modern.
6. Adanya reaksi dan perlawanan yang bersifat kedae-rahan telah menyadarkan mereka bahwa sifat seperti

itu tidaklah menguntukan secara nasional (Moedjantoro, 1993: 26).

Sementara itu, pergerakan nasional pun dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang datang dari luar, di antaranya sebagai berikut.

1. Ide-ide barat yang diterima melalui pendidikan barat yang modern.
2. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang menyadarkan bahwa bangsa Asia pun mampu hidup secara mandiri.
3. Pertumbuhan pergerakan nasional dari negara lain, seperti India, Turki, Irlandia, dan sebagainya (Moedjantoro, 1993: 26).

Titik pangkal pergerakan nasional dimulai tanggal 20 Mei 1908 ketika siswa-siswi Stovia (Sekolah Dokter Pribumi) di antaranya Sutomo, Gunawan, dan Suraji mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Idenya memang dari Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang priyayi rendahan dan dokter Jawa di Yogyakarta, yang pada 1906 mendirikan *Studiefonds* yang bertujuan membantu para pemuda tidak mampu tetapi pandai untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada akhir tahun 1907, Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo berkunjung ke Stovia dan berdiskusi membicarakan keadaan rakyat dengan Soetomo, seorang siswa Stovia. Mereka berdua bercita ingin-ingin mem-

perbaiki kedudukan dan martabat rakyat (Soetomo, 1934: 79-81).

Di lain pihak, cita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat pun tertanam dalam dada para siswa Stovia. Oleh karena itu, ketika Soetomo membicarakan hasil diskusinya dengan Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo kepada teman-temannya di Stovia, cita-cita itu semakin men-guat (*Bataviasch Niewsblad*, 13 Juli 1908; Mangoenkoesoemo, 1918). Demikianlah, *Studiefonds* yang didirikan oleh Mas Ngabehi Sudirohusodo diperluas jangkauannya dan pada 20 Mei 1908 secara resmi dilembagakan menjadi sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Soetomo sebagai ketuanya (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990<sup>5</sup>: 177). Nama organisasi itu diambil dari perkataan Soetomo kepada Mas Wahidin Sudirohusodo ketika ke-duanya berdiskusi tentang kegiatan dari *Studiefonds*. Dikatakan oleh Soetomo bahwa *Studiefonds* itu memiliki maksud *budi ingkang utami* (Moedjanto, 1993: 27).

Pada saat didirikan dan selama kurang lebih 20 tahun perkembangannya, Budi Utomo merupakan sebuah organisasi ini bersifat kedaerahan (Jawa) dan anggotanya pun sengaja dibatasi untuk kalangan elite Jawa. Kenyataan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik pada waktu yang sesuai dengan Pasal 111 *Regerings Reglement*, kaum pribumi melarang untuk mendirikan organisasi politik. Pemerintah Hindia Belanda hanya

mengizinkan kaum pribumi untuk mendirikan organisasi sosial budaya. Jadi dengan demikian, selama H. Abdul Halim berada di Mekkah, organisasi yang telah didirikan oleh kaum pribumi bergerak di bidang sosial budaya. Belum ada organisasi pribumi yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik.

Meskipun sangat kental sifat daerahnya daripada sifat nasionalnya, kelahiran Budi Utomo ternyata mampu mendorong lahirnya berbagai organisasi yang berjuang tidak hanya di bidang politik saja, tetapi juga di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan keagamaan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau van Deventer berkomentar bahwa kelahiran Budi Utomo itu sebagai pertanda bangkitnya India (baca: Indonesia) dari tidurnya yang nyenyak. Demikian halnya juga dengan pers Belanda berkomentar bahwa lahirnya Budi Utomo sebagai simbol “Majunya Jawa” (*Java Vooruit*) dan “Bangkitnya Jawa” (*Java on Waakt*) (Moedjanto, 1993: 29).

Oleh karena Budi Utomo bergerak sangat terbatas, maka banyak anggota yang tidak puas terhadap aktivitas organisasi. Keadaan ini semakin memburuk seiring dengan terbentuknya Sarekat Islam dan Indische Partij tahun 1912. Kedua organisasi ini telah mengubah corak pergerakan nasional dari yang bersifat kedaerahan dan kultural menjadi bercorak nasional dan politik. Sarekat Islam yang berasaskan hubungan spiritual agama dan

kepentingan perdagangan yang sama menjelma menjadi sebuah gerakan rakyat yang pertama dan yang sebenarnya di Indonesia. Sementara itu, Indische Partij menyuarakan Nasionalisme Hindia dan secara konsisten bergerak di bidang politik.

Sarekat Islam didirikan pada 11 November 1911 di Solo sebagai kelanjutan dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh H. Samanhoedi, M. Asmodimedjo, M. Kertotaruno, M. Sumowerdojo, dan M. Hadji Abdulradjak (*Utusan Hindia*, 21 April 1914). Ada tiga faktor yang mendorong didirikannya organisasi ini. **Pertama**, persaingan dagang antara pedagang pribumi dan pedagang Cina yang semakin menajam. **Kedua**, sikap superioritas masyarakat Cina terhadap kaum pribumi sebagai dampak keberhasilan Revolusi Cina tahun 1911. Sikap tersebut yang mendorong terjadinya perkelahian antara masyarakat pribumi dan masyarakat Cina, karena masyarakat Cina merasa dirinya sejajar dengan masyarakat Eropa dan menganggap rendah masyarakat pribumi (Agus Salim dalam Noer, 1991: 116). **Ketiga**, ketidaksenangan terhadap kalangan bangsawan yang selalu menekan rakyatnya sendiri. Mereka sangat tidak memperhatikan hak rakyat: melarang rakyat memakai batik motif tertentu, melarang rakyat menggunakan kereta di jalur tertentu, dan bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan dari kalangan rakyat jelata (*Neratja*, 16

Maret 1921; *Fadjar Asia*, 29 Januari 1929). Sarekat Islam inilah organisasi pegerakan nasional yang memiliki hubungan erat dengan K. H. Abdul Halim. Meskipun demikian, dalam perjuangannya, K. H. Abdul Halim tidak seutuhnya mengekor pada Sarekat Islam. Ia kemudian lebih menonjol perjuangannya dengan Persyarikatan Oelama, organisasi yang didirikannya, daripada dengan Sarekat Islam. Selain itu, substansi perjuangannya lebih menitikberatkan pada aspek-aspek di luar politik, seperti pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Aspek-aspek inilah yang dipandang tidak kalah penting oleh K. H. Abdul Halim dalam perjuangannya memperbaiki umat.

## **2. Perkembangan Persyarikatan Oelama (PO)**

Ketika H. Abdul Halim kembali dari Mekkah tahun 1911, pergerakan nasional mulai tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Gemuruh pergerakan nasional pun ikut memancing K. H. Abdul Halim untuk ambil bagian dalam episode perjuangan bangsa tersebut. Ia mulai memikirkan kondisi masyarakat kolonial yang tidak seimbang sehingga berusaha untuk memperbaikinya.

Sebagaimana lazimnya para ulama yang baru menyelesaikan studinya, H. Abdul Halim pun mulai melaksanakan kegiatan dakwahnya. Dia memang tidak lang-

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

sung mendirikan pesantren, tetapi melakukannya dalam suatu pengajian kecil-kecilan dengan peserta yang sangat terbatas. Meskipun dalam pengajian itu hanya dihadiri oleh segelintir orang, namun kondisi itu tidak membuat H. Abdul Halim berkecil hati. Ia terus-menerus menyelenggarakan pengajian secara rutin, yang untuk masa sekarang mungkin bisa disamakan dengan majelis taklim (Adnan, 1986: VI).

Selain menyelenggarakan pengajian, H. Abdul Halim selalu memperhatikan kondisi masyarakat muslim di sekitarnya. Ia sampai pada simpulan bahwa keadaan kaum muslimin yang termarjinalkan disebabkan oleh ketidakadilan politik ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kondisi berbeda diperlihatkan oleh masyarakat Cina yang secara ekonomi jauh lebih mapan daripada kaum muslimin. Sama-sama pedagang, misalnya, namun pedagang Cina dapat menikmati hasil perdagangannya itu daripada masyarakat pribumi.

Namun demikian, tidak serta merta kesalahan itu ditujukan kepada Pemerintah Hindia Belanda. H. Abdul Halim melihat bahwa persatuan atau *ukhuwah islamiyyah*-nya masih begitu rendah. Saling membantu di antara mereka masih begitu kurang, sehingga para pedagang muslim itu tidak mampu bersaing dengan para pedagang Cina. Ditambah lagi dengan ketersediaan modal yang tidak sebanding antara pedagang pribumi

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita**

dan pedagang Cina. Pedagang Cina biasanya akan dengan mudah memperoleh pinjaman, sedangkan pedagang pribumi (Islam) biasanya akan sangat sulit memperoleh dana pinjaman. Ini disebabkan oleh kebijakan politik ekonomi kolonial yang lebih menguntungkan pedagang Cina. Bukan karena para pedagang pribumi itu tidak memiliki keterampilan berdagang, melainkan karena aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sangat menguntungkan para pedagang Cina. Dalam struktur sosial masyarakat kolonial, masyarakat Cina menempati kelas dua dan pribumi dtempatkan pada kelas tiga. Masyarakat Cina pun dijadikan sebagai pedagang perantara sehingga mereka menguasai perekonomian Hindia Belanda.

Dengan kondisi seperti itu, H. Abdul Halim tergerak hatinya untuk mengubah keadaan masyarakatnya. Tidak dengan cara memberikan kucuran dana kepada para pedagang, tetapi dengan cara membangun dan membina semangat saling membantu diantara para pedagang muslim. Untuk tujuan itu, enam bulan sekembalinya dari Mekkah atau sekitar awal tahun 1912, H. Abdul Halim mendirikan *Hayatul Qulub* yang berarti **Kehidupan Hati**. Organisasi pertama yang didirikan H. Abdul Halim ini tidak jauh berbeda seperti koperasi simpan pinjam. Meskipun bidang garapan utamanya adalah ekonomi, namun *Hayatul Qulub* pun bergerak juga di bidang pen-

didikan. Kegiatan pengajian kecil-kecilan yang diselenggarakan H. Abdul Halim dijadikan sebagai bagian dari aktivitas *Hayatul Qulub* (Hernawan, 2007: 32).

Setelah mendirikan *Hayatul Qulub*, H. Abdul Halim berhasil mengumpulkan 60 orang pedagang dan petani yang ada di Majalenga. Mereka dibangun kesadarannya tentang betapa pentingnya semangat saling membantu agar mereka mampu bersaing dengan para pedagang Cina. Oleh karena sifatnya seperti koperasi, Pemerintah Hindia Belanda tidak melarang keberadaan *Hayatul Qulub* sehingga dengan bebas H. Abdul Halim mulai membangun dan membina semangat gotong royong di antara para pedagang muslim, khususnya yang menjadi anggota *Hayatul Qulub*.

Di antara barang komoditas perdagangan yang dikuasai oleh pedagang Cina adalah kain. Para pedagang muslim tidak mampu bersaing dengan para pedagang Cina dalam memasarkan kain, khususnya batik. Kain batik yang diperoleh para pedagang muslim sampai ke konsumen jauh lebih mahal daripada yang didagangkan oleh para pedagang Cina. Distribui barang yang mengakibatkan harga kain dari para pedagang muslim lebih mahal harganya. Menurut pemikiran H. Abdul Halim, agar harga kain tidak terlalu mahal, mereka harus mampu memotong alur distribusi kain. Akan tetapi, hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan karena sistem eko-

nomi yang diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak berpihak kepada mereka. Alternatif terbaik adalah memproduksi kain sendiri. Oleh karena itu, *Hayatul Qulub* kemudian merencanakan hendak membangun sebuah pabrik tenun yang nantinya akan memproduksi kain. Dengan memproduksi sendiri, kain bisa langsung dipasarkan ke konsumen sehingga harganya menjadi tidak lebih mahal daripada harga kain yang dipasarkan oleh para pedagang Cina.

Akan tetapi, rencana membangun pabrik tenun itu terhambat oleh ketiadaan dana. Kondisi tersebut yang mendorong H. Abdul Halim meminta kepada setiap anggota untuk membayar iuran masuk sebesar sepuluh sen dan iuran mingguan sebesar 5 sen. Dengan dana dari para anggota itulah, *Hayatul Qulub* berhasil mendirikan sebuah pabrik tenun di Majalengka. Tidak ada data mengenai produksi kain yang dihasilkan oleh pabrik tenun itu. Namun setidak-tidaknya, melalui *Hayatul Qulub* kesadaran untuk saling membantu telah mulai terbentuk di antara para pedagang muslim.

Pembinaan yang dilakukan oleh H. Abdul Halim dianggap sebagai ancaman oleh para pedagang Cina. H. Abdul Halim dengan menggunakan perkumpulan *Hayatul Qulub*-nya selalu memperjuangkan hak-hak para pedagang muslim sehingga persaingannya dengan para pedagang Cina semakin mennajam. Persaingan dagang

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

itu acapkali mengakibatkan perang mulut dan perkela-hian antara pedagang pribumi dan pedagang Cina. Kon-flik itu memang tidak sampai mengakibatkan terjadinya kerusuhan anti-Cina, yang pada masa itu kerap terjadi di berbagai daerah di Hindia Belanda. Konflik itu sendiri sebenarnya lebih disebabkan oleh sikap superioritas et-nis Cina terhadap penduduk pribumi, sebagai dampak dari keberhasilan Revolusi Cina tahun 1911 (Noer, 1991: 115).

Namun demikian, Pemerintah Hindia Belanda ju-stru menuduh *Hayatul Qulub*-lah penyebab konflik itu. Tuduhan itulah yang mendorong Pemerintah Hindia Be-landa membubarkan dan melarang *Hayatul Qulub* ber-kembang di Majalengka sekitar tahun 1915. Dengan de-mikian, tidak terlalu banyak sumbangan *Hayatul Qulub* kepada H. Abdul Halim yang sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan umat karena hanya bergerak sek-i-tar tiga atau empat tahun. Meskipun *Hayatul Qulub* telah dibubarkan, namun aktivitas perekonomian yang dilaku-kan oleh H. Abdul Halim terus dilakukan meskipun tanpa organisasi. Jadi, proses pembinaannya lebih besifat per-sonal bukan bersifat kelembagaan (Noer, 1991: 81).

Meskipun *Hayatul Qulub* lebih menunjukkan ciri-ciri sebagai koperasi simpan pinjam, namun organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang ekonomi saja, melain-kan juga bergerak di bidang pendidikan. Pengajian yang

telah digelar oleh H. Abdul Halim sebelum *Hayatul Qulub* berdiri, dijadikan sebagai bagian dari kegiatan organisasi. Seminggu sekali, H. Abdul Halim menyelenggarakan pengajian bagi orang dewasa yang rata-rata diikuti oleh sekitar 40 orang. Pengajian itu dipusatkan pada pembahasan sekitar Al-Quran dan Hadits yang kadang-kadang diberikan ulasan atau tafsir secara pragmatis.

Ketika *Hayatul Qulub* dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, kegiatan pengajian itu dipindahkan ke *Majlisul Ilmi*. *Majlisul Ilmi* merupakan organisasi yang didirikan oleh H. Abdul Halim sekitar tahun 1912 dengan tujuan memberikan pengajaran agama Islam kepada anak-anak dan remaja. Proses pembelajaran Al Quran dan dasar-dasar kitab klasik diberikan oleh H. Abdul Halim di sebuah langgar berukur 3 x 4 meter. Langgar milik Sawat yang terletak di tepi Sungai Citangkurak dibangun secara sederhana dari bambu dengan atap ilalang. Di tempat inilah, tujuh orang anak-anak: Moh. Syafari, Ahmad Syatori, Ahmad Zuhri, Abdul Fatah, Jamaludin, M. Kosim, dan M. Adnan belajar membaca Al Quran dan kitab klasik kepada H. Abdul Halim (Akim, 1967: 17; Sukarsa, 2007: 27; Wanta, 1991: 7).

Setelah sekitar empat tahun mengajarkan dasar-dasar ilmu keislaman kepada anak-anak dan remaja, H. Abdul Halim berencana untuk mengembangkan *Majlisul Ilmi* menjadi sebuah lembaga pendidikan modern. Kein-

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

ginan itu didorong oleh suatu keyakinan bahwa untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya, aspek pendidikan harus secara serius diperhatikan. Tanpa memperbarui sistem pendidikan yang sudah ada, akan sangat sulit mengubah kondisi masyarakat yang menurut penilaian H. Abdul Halim sarat dengan ketidakadilan.

Di lain pihak, sekitar awal tahun 1916, para penghulu, ulama, dan guru agama Majalengka memandang bahwa sudah saatnya sistem pendidikan yang sudah berkembang di Majalengka diperbarui. Dalam suatu kesempatan, H. Abdul Halim pun mengutarakan keberadaan *Majlisul Ilmi* kepada mereka. Selain itu, H. Abdul Halim menjelaskan rencana mengembangkan *Majlisul Ilmi* menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih besar lagi. Keinginan itu tidak mungkin dapat diwujudkan kalau tidak memiliki sebuah organisasi yang memayunginya. Oleh karena itu, langkah paling awal harus dibentuk dahulu sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.

Penuturan H. Abdul Halim itu direspon respons positif dan rencana serta keinginan tersebut sampai juga ke telinga K. H. Moh. Ilyas, *Hoofdpenghulu Landraad Majalengka* yang tiada lain mertuanya sendiri. K. H. Moh. Ilyas kemudian mengundang H. Abdul Halim, K. H. Djubaedi, K. H. Mas Hidayat, Mas Setya Sentana, Habib Abdullah Al-Djufr, R. Sastrakusuma, dan R. Acung Sahlan

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita**

ruangannya di Kantor Penghulu *Landraad* Majalengka untuk membicarakan rencana mewujudkan keinginan tersebut. Pertemuan itu berhasil mencapai kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi yang akan mengeola lembaga pendidikan. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa organisasi yang akan didirikan akan berbentuk perkumpulan (*jum'iyah*) yang bermaksud memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karen itu, mereka kemudian sepakat menamakan perkumpulan itu dengan nama *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin* (Perkumpulan Pertolongan Untuk Pelajar). Atas bantuan sang mertua, dibangunlah sebuah moshola dan tiga buah bangunan untuk madrasah (Akim, 1967: 17; Mansur, 1960: 5).

Di tempat inilah sejak tanggal 16 Mei 1916 proses pembelajaran dilaksanakan oleh H. Abdul Halim dan teman-temannya di bawah naungan *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin*. *Majlisul Ilmi* yang telah memiliki tujuh orang memindahkan pusat kegiatan belajarnya ke gedung madrasah *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin*. Pada awal perkembangannya, madrasah yang dikelola oleh *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin* diasuh oleh enam orang guru, yaitu H. Abdul Halim, Mu'allim Soleh (kelak dikenal dengan nama K. H. Soleh Solahudin), Mu'allim Asj'ari, Mu'allim Bunjamin, Mu'allim Abhari, dan Abdurrahman

(Akim, 1967: 18; Wawancara dengan Muh. Mukri, tanggal 30 Maret 2008).

Para guru agama di Majalengka pada awalnya menyambut dengan baik kehadiran *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin*, namun kemudian berubah menjadi tidak menyukai. Ketidaksukaan mereka disebabkan oleh keputusan H. Abdul Halim untuk memasukkan sistem kelas ke dalam sistem pendidikan yang akan dikembangkan oleh *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin*. Sistem halaqah tidak ditinggalkan oleh H. Abdul Halim, tetapi diterapkan sebagai metode pengajaran bagi para santrinya. Mereka belajar ilmu-ilmu keislaman di surau dengan duduk melingkari kyai. Setelah selesai, mereka belajar lagi di madrasah dan duduk di atas kursi menghadap ke papan tulis untuk belajar ilmu pengetahuan umum. Memang pada waktu itu, bagi kalangan tradisional, sistem kelas ditolak sebagai bagian dari sistem pendidikan di pesantren karena dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari kalangan nonmuslim. Sehubungan dengan pandangan itu, sekolah-sekolah formal yang menggunakan sistem kelas dipandang sebagai sekolah kafir dan mereka menentang dengan kelas sistem itu masuk ke pesantren.

H. Abdul Halim tidak mengalah terhadap penentangan itu, melainkan terus berusaha mengembangkan sistem pendidikan yang dikelola oleh *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin*. Dengan tekadnya yang bulat dan dengan

mendapat bantuan dari para penghulu serta kemunduran yang dialami oleh pesantren tradisional, keberadaan *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin* pada akhirnya dapat diterima secara baik oleh para guru agama. Jiwa pembaharuan yang dimiliki oleh H. Abdul Halim itu merupakan pengaruh para gurunya ketika ia belajar di Mekkah. Selain itu, ia pun sangat terkesan dengan sistem pendidikan yang dikembangkan di lembaga pendidikan Bab al-Salam di Mekkah dan Jeddah yang telah meninggalkan sistem halaqah dan menggantinya dengan sistem kelas.

Sementara itu, pergaulan H. Abdul Halim tidak hanya sebatas dengan tokoh-tokoh masyarakat lokal. Ia memiliki hubungan personal yang sangat baik dengan H. Oemar Said Tjokroaminoto. Hubungan baik itu memang tidak dapat dilepaskan dari status H. Abdul Halim sebagai anggota Sarekat Islam. Dalam suatu kesempatan, pemimpin utama Sarekat Islam itu menyarankan kepada H. Abdul Halim untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengakui secara hukum keberadaan *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin*. Saran tersebut dibicarakan dengan rekan-rekannya di *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin*. Mereka sepakat untuk mengajukan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar *Jam'iyyat I'anat Al-Muta'allimin* diakui secara hukum. Namun demikian, pengajuan tersebut secara resmi diajukan oleh

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

H. Abdul Halim setelah nama *Jam'iyat I'anat Al-Muta'allimin* diubah menjadi Persyarikatan Oelama (PO) sekitar pertengahan tahun 1917. Perubahan nama itu mendapat dukungan penuh dari H. O. S. Tjokroaminoto dan membantunya agar Persyarikatan Oelama segera diakui secara hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 21 Desember 1917, *Rechtspersoon* (pengesahan pemerintah) No. 43 dari Gubernur Jenderal J. P. Graaf van Limburg Stirum atas keberadaan Persyarikatan Oelama diterima oleh H. Abdul Halim. Hal ini berarti, sejak tanggal itu Pemerintah Hindia Belanda mengakui secara hukum keberadaan Persyarikatan Oelama sebagai sebuah organisasi. Aktivitasnya dijamin oleh hukum, meskipun baru sebatas untuk daerah Majalengka saja (Akim, 1967: 19; Jalaludin, 1990: 377).

Pada awal keberadaannya, Persyarikatan Oelama diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Majalengka sehingga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Atas jasa para lulusan *Madrasatutholibin Lifaroididdin*, perubahan nama dari *Majlisul Ilmi* atas saran Sajid Hasjim Asjimi (teman H. Abdul Halim dari Batavia), berdirilah cabang-cabang di beberapa daerah di Majalengka. Dalam kurun waktu 1917-1924, telah berdiri cabang-cabang Persyarikatan Oelama di Jatiwangi, Maja, Talaga, Kadipaten, Dawuan, Sukahaji, Bantar-

jeg, Rajagaluh, Jatitujuh, dan Leuwimunding (Handaru, 2001: 20).

Seiring dengan perkembangan Persyarikatan Oelama, K. H. Abdul Halim pun aktif di Sarekat Islam. Aktivitas H. Abdul Halim di Sarekat didorong oleh persamaan pengalaman dalam menghadapi persaingan dagang dengan etnis Cina. Aktivitas H. Abdul Halim tidak dilakukan hanya sebatas sebagai anggota, tetapi oleh Tjokroaminoto diminta untuk memimpin SI Afdeling Majalengka. Sebagai pengurus, sudah barang tentu K. H. Abdul Halim memiliki hubungan dekat dengan H. O. S. Tjokroaminoto, pemimpin utama Sarekat Islam. Aktivitas K. H. Abdul Halim di Sarekat Islam dilakukannya dalam kurun waktu 1918-1933 (Noer, 1991: 84).

Pada saat baru memulai aktivitasnya di Sarekat Islam, pada tahun 1918, K. H. Abdul Halim mengorganisasikan Sarekat Sekerja *Personnel Fabrieks Bond* (PFB) untuk melakukan aksi pemogokan di daerah Jatiwangi (Hidajat, 1967: 19). Akibatnya, K. H. Abdul Halim pernah ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda bersama dengan beberapa orang temannya. Setelah selesai diinterrogasi, pemerintah segera melepaskan K. H. Abdul Halim karena dianggap bukan sebagai penggerak utamanya. Namun demikian, gerak-geriknya mulai diawasi secara ketat oleh aparat hukum Pemerintah Hindia Belanda. Untuk keperluan pengawasan itu, Pemerintah

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

Hindia Belanda kemudian mendirikan sebuah tangsi militer, yang sekarang dijadikan sebagai Markas Korem 03/Majalengka.

Meskipun pernah ditangkap dan diinterogasi, H. Abdul Halim tidak lantas meninggalkan gemuruh pergerakan nasional. Selain memimpin Persyarikatan Oelama, pada saat seluruh cabang Sarekat Islam disatukan dibawah Central Sarekat Islam (CSI), H. Abdul Halim ditunjuk sebagai Commisaris Bestuur CSI Hindia Timur untuk wilayah Jawa Barat (Hidajat, 1967: 19). Akan tetapi, aktivitas perjuangannya lebih menonjol sebagai Ketua *Voorzitter Hoofdbestuur* Persyarikatan Oelama daripada sebagai Commisaris CSI. Tindakan-tindakan dan pemikirannya pun lebih ditujukan terhadap upaya mengembangkan Persyarikatan Oelama dengan cita-citanya memperbaiki kehidupan umat di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Dengan perkataan lain, aktivitas perjuangannya di bidang politik kalah menonjol dibandingkan di bidang sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat bahwa ketika Persyarikatan Oelama mulai diakui secara hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda, keberadaannya mendapat respons positif dari masyarakat Majalengka. Ia lebih dikenal sebagai seorang pemimpin organisasi pergerakan nasional yang bergerak di bidang pendidikan, yakni Persyarikatan Oelama.

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita**

Dengan mempertimbangkan perkembangan Persjarikatan Oelama yang begitu cepat, pada tahun 1923 K. H. Abdul Halim mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal D. Fock untuk memperluas daerah operasi Persjarikatan Oelama ke seluruh Pulau Jawa dan Madura. Pada waktu itu, kaum pergerakan nasional sedang menghadapi politik reaksioner dari Gubernur Jenderal Fock sehingga pengawasan terhadap aktivitas organisasi semakin diperketat. Akan tetapi, Persjarikatan Oelama bukanlah organisasi yang bergerak di bidang politik sehingga permohonan itu dikabulkan juga. Pada tanggal 19 Januari 1924, M. A. Helb sebagai 1<sup>ste</sup> Gouvernement Secretarie, menandatangani *Rechtspersoon* No. 35. Pada bulan itu juga sampai ke tangan K. H. Abdul Halim sebagai *Voorzitter Hoofdbestuur Persjarikatan Oelama*. Dengan surat itu, sejak tahun 1924 Persjarikatan Oelama mulai melebarkan sayapnya ke seluruh Jawa dan Madura. Sampai tahun 1931, Persjarikatan telah mendirikan cabang di luar Majalengka, di antaranya di Tegal, Jawa Tengah.

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

Foto 1: Gedung Tangsi Militer Belanda  
untuk Mengawasi Gerak Gerik H. Abdul Halim



Sumber: Dokumentasi Santi Asromo, 2008

Sampai tahun 1935, Persyarikatan Oelama tidak mengubah statusnya atau tidak melakukan aktivitasnya di ranah politik. Seperti yang dilaporkan Adviseur voor Inlandsch Zaken, Persyarikatan Oelama bukan organisasi politik, tetapi organisasi sosial dengan pendidikan dan dakwah sebagai bidang garapan utamanya (Indonesia,

1935). Pada tahun 1937, K. H. Abdul Halim dan R. Moh. Kelan mengajukan permohonan perluasan wilayah operasi Persyarikatan Oelama ke seluruh Indonesia. Permohonan ini pun dikabulkan Gubernur Jenderal de Jonge yang ditandai dengan ditandatanganinya *Rechtpersoon* No. 43 Tanggal 18 Agustus 1937 oleh J. M. Kiverson sebagai *Algemeene Secretaris*. Dengan pengakuan hukum untuk seluruh Indonesia, Persyarikatan Oelama dapat mendirikan cabang di seluruh Indonesia dan salah satunya didirikan di Sumatera Selatan (Noer, 1991: 82).

Dalam usahanya mengembangkan Persyarikatan Oelama, K. H. Abdul Halim tidak hanya memusatkan pikirannya untuk membuka cabang sebanyak-banyaknya. Ia pun kemudian mendirikan berbagai organisasi yang kemudian dijadikan sebagai *onderbouw*-nya Persyarikatan Oelama. K. H. Abdul Halim betapa menyadari potensi yang dimiliki oleh para pemuda dan kaum perempuan. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1929 didirikanlah *Hizbul Islam Padvinders Organisatie* (HIPO), sebuah organisasi kepanduan yang menampung dan menyalurkan aktivitas para pemuda di lingkungan Persyarikatan Oelama. Selain itu, pada tahun 1932 didirikan juga Perikatan Pemoeda Islam (PPI) yang kemudian berubah namanya menjadi Perhimpunan Pemoeda Persyarikatan Oelama Indonesia (P3OI). Pembentukan organisasi kepemudaan ini segera diikuti dengan pembentukan Per-

himpunan Anak Perempuan Persyarikatan Oelama (Wanta, 1997: 2-3).

Sementara untuk mengoptimalkan peranan kaum perempuan, Persyarikatan Oelama mendirikan Fatimiyah pada tahun 1930. Nama ini diambil dari nama Fatimah Az-Zahra, anak Nabi Muhammad SAW dengan harapan dapat berjuang segigih perjuangan Ibunda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husen itu. Oleh *Hoofdbestuur* Persyarikatan Oelama, Fatimiyah ditugasi untuk mengelola rumah yatim piatu dan tugas-tugas lainnya yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabat kewanitaan (Noer, 1991: 82).

### **3. Pemikiran K. H. Abdul Halim**

Dengan menjadikan Persyarikatan Oelama sebagai organisasi perjuangannya, K. H. Abdul Halim mulai melangkahkan kakinya untuk menggapai cita-citanya, yakni memperbaiki umat dari keterpurukan. Pemikiran-pemikiran K. H. Abdul Halim mulai menyebar seiring semakin berkembangnya Persyarikatan Oelama. Untuk menyebarluaskan pemikirannya itu, Persyarikatan Oelama kemudian menerbitkan majalah *Soeara Persyarikatan Oelama* (SPO) yang terbit untuk pertama kalinya tahun 1928 (Hernawan, 2007: 39). SPO pun acapkali mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita**

masalah agama, pendidikan, dan lain-lain. Selain menerbitkan *Soeara Persjarikatan Oelama*, dalam kurun waktu 1930-1941, Persjarikatan Oelama pun menerbitkan beberapa majalah dan brosur sebagai media massa penyebaran cita-citanya, seperti *Soeara Islam*, *As-Sjoero*, *Pengetaoean Islam*, *Miftahus-Saadah*, *Berita PO*, *Al Mu'allimin*, *Pemoeda*, dan *Penunjuk Jalan Kebenaran* (Noer, 1991: 83).

Sebagaimana lazimnya organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, Persjarikatan Oelama acapkali menyelenggarakan tabligh dan membuka berbagai lembaga pendidikan. Melalui tabligh, acara Maulud dan misalnya, K. H. Abdul Halim selalu memperjuangkan hak-hak umat Islam khususnya dalam menjalani kehidupannya. Acara itu selalu dihadiri oleh banyak masyarakat. Mereka mendatangi tempat K. H. Abdul Halim berceramah dengan arak-arakan (Wawancara dengan S. Wanta, tanggal 7 April 2008).

Selain melalui tabligh, perjuangannya menuntut hak-hak umat Islam dilakukan juga secara langsung dengan mempertanyakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1940, K. H. Abdul Halim dengan ditemani oleh K. H. A. Ambari menemu Adviseur voor Inlandsch Zaken di Batavia Centrum untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam. Hal-hal yang dibicarakan adalah beberapa permasalahan

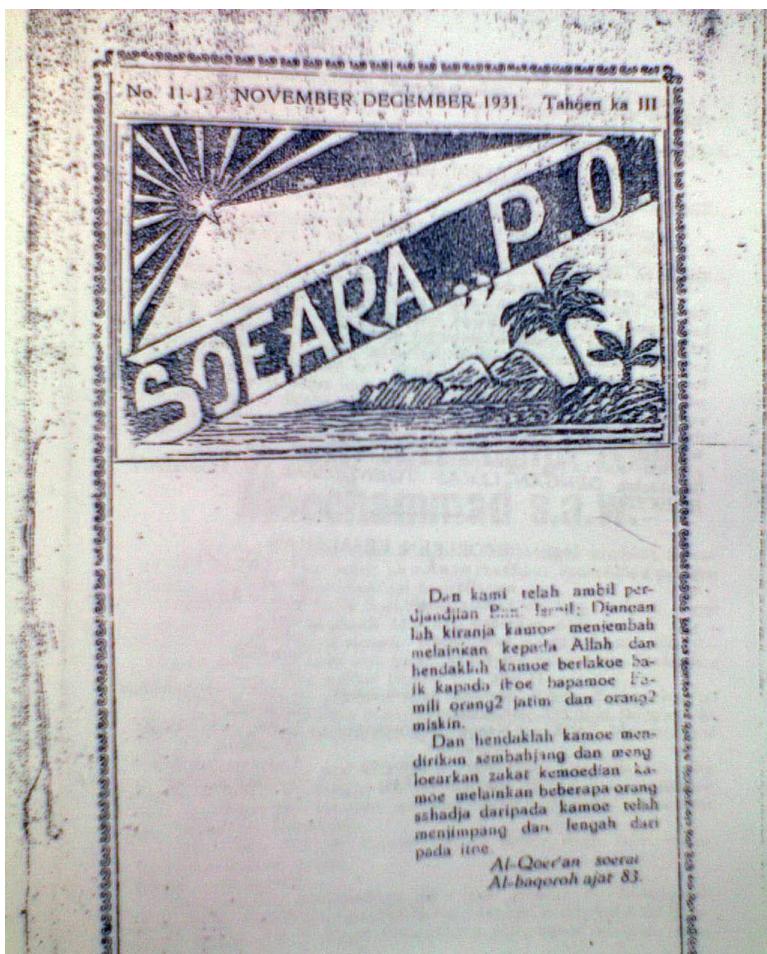
***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

yang dihadapi oleh umat Islam seperti masalah upaya memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum sekolah umum. K. H. Abdul Halim menuntut agar ajaran Islam dijadikan sebagai bagian dari sekolah umum agar para siswa mendapat pengetahuan dunia dan akhirat secara seimbang. Ajaran Islam perlu dimasukkan ke dalam kurikulum mengingat sebagian besar siswa sekolah umum itu beragama Islam. Masalah warisan pun mendapat perhatian K. H. Abdul Halim. Ia menuntut agar masalah itu tidak diatur menurut hukum adat, tetapi seharusnya diatur oleh hukum Islam. Alasan yang dikemukakan oleh K. H. Abdul Halim adalah hukum adat dapat berubah karena pengaruh perubahan zaman. Sementara itu, aturan mengenai warisan tidak akan berubah oleh perubahan zaman, karena hukum Islam tidak bersifat permanen (*Pandji Islam*, 1940: 8272).

Di bidang pendidikan, PO mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan melakukan pembaharuan dalam sistem pengajarannya. Berbagai lembaga pendidikan skolah untuk berbagai jenjang didirikan oleh Persyarikatan Oelama. Pada tahun 1919, Persyarikatan Oelama mendirikan Madrasah Mu'allimin (Darul Ulum) yang difungsikan sebagai sekolah untuk mencetak guru (*kweek-school*). Sekolah ini menerima santri kelas VII Madrasah Tholibin dan juga para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya di pesantren-pesantren.

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita*

Foto 2: Majalah Persjarikatan Oelama; *Soeara PO*



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita**

Foto 3: Majalah Persjarikatan Oelama; *As-Sjoero*



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Pada awal didirikannya, *Madrasah Mu'allimin* melaksanakan proses belajar mengajarnya di salah satu ruangan atau teras rumah milik Sudjarwo. Para gurunya selalu diberi beras oleh K. H. Abdul Halim yang membawakannya sendiri dari Jatiwangi ke Majalengka (Wawancara dengan S. Wanta, tanggal 7 April 2008). Pendidikannya dilaksanakan selama 5 tahun dan pada awal didirikan hanya memiliki delapan orang santri. Pada tahun 1921, Persyarikatan Oelama baru mendirikan gedung sekolah untuk madrasah tersebut (Handaru, 2001: 22). Tidak sampai di situ, K. H. Abdul Halim menyampaikan gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang memadukan sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan ini kemudian dikenal dengan Santi Asromo, yang akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya.

Melihat perkembangan yang begitu cepat dan jiwa perbaharuan yang diperlihatkan oleh K. H. Abdul Halim, melahirkan berbagai kecaman dari kalangan tradisi. Konon katanya, bukanlah suatu keharusan untuk menyekolahkan anak-anak ke sekolah di lingkungan Persyarikatan Oelama, karena organisasi ini didirikan untuk kepentingan ulama saja. Jadi, anak-anak dari kalangan rakyat biasa tidak berhak untuk sekolah di sini. Akan tetapi, tuduhan seperti tidak mampu menghalangi gerakan pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh K. H. Abdul

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

Halim dengan Persyarikatan Oelama-nya (Wawancara dengan K. H. Cholid Fadlulloh, tanggal 7 April 2008).

Memang pada kenyataannya, tidak hanya kepentingan ulama yang diperjuangkan oleh Persyarikatan Oelama. Ketimpangan ekonomi masyarakat di Hindia Belanda, misalnya, menjadi salah satu aspek kehidupan yang selalu dipikirkan. Upaya memperbaiki kehidupan ekonomi ini dikenal juga dengan konsep *Ishlah al-Iqtishad*. Dalam buku *Economie dan Cooperatie dalam Ajaran Islam* (1936) yang disusun oleh K. H. Abdul Halim dengan jelas dikatakan bahwa untuk meningkatkan ke-sejahteraan umat, koperasi dapat dijadikan sebagai alatnya. Mengapa koperasi? Karena di dalam koperasi terbina persaudaraan dan persatuan sesama anggotanya. Dua hal inilah yang akan membantu umat melepaskan diri ketimpangan ekonomi (Halim, 1936: 6).

Koperasi memang tidak akan secara otomatis men-gatasi ketimpangan ekonomi umat muslimin. Oleh karena ketimpangan itu disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) kebijakan ekonomi kolonial, dan (2) sifat malas dan boros yang menghinggapi perikehidupan kaum muslimin (Halim, 1936: 9). Jadi dengan demikian, pertama-tama harus ditumbuhkan terlebih dahulu kesadaran bahwa kaum muslimin memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Untuk mengatasinya, K. H. Abdul Halim mengajukan dua cara atau langkah perbaikan ekonomi, yaitu **per-**

**tama** menanamkan kesadaran pada diri kaum muslimin agar (a) berusaha dengan cara yang halal dan layak untuk memperbaiki kehidupan ekonomi; dan (b) menumbuhkan tekad untuk dapat hidup sejajar atau kalau dapat melebihi bangsa lain; dan **kedua**, meningkatkan perekonomian kaum muslimin dengan cara (a) membiasakan hidup secara hemat, (b) menambah dan meningkatkan pendapatan, dan (c) mendirikan koperasi (Halim, 1936: 7).

Untuk mengimplementasikan pemikirannya itu, Persyarikatan Oelama kemudian bergerak juga di bidang ekonomi dengan mengelola beberapa buah perusahaan, mengelola pertanian di atas tanah seluas 2,5 hektare yang sudah dilakukan sejak tahun 1927, dan mengelola sebuah percetakan (Galunggung Drukkrij di tasikmaya) sejak tahun 1930-an (Noer, 1991: 82). Koperasi dipilih oleh K. H. Abdul Halim sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat karena koperasi dinilai sangat cocok dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ia mengatakan ...

*Verbruiks Cooperatie* ini artinya penggabungan orang-orang yang sama membeli keperluannya hari-hari, disebabkan rumah tangga mereka perlu membeli barang-barang tadi .... *Verbruiks Cooperatie* menjual barang-barang keperluan dengan harga yang murah karena *cooperatie* sendiri yang kulak dari yang mengeluarkan sendiri. Lebih tegas *coo-*

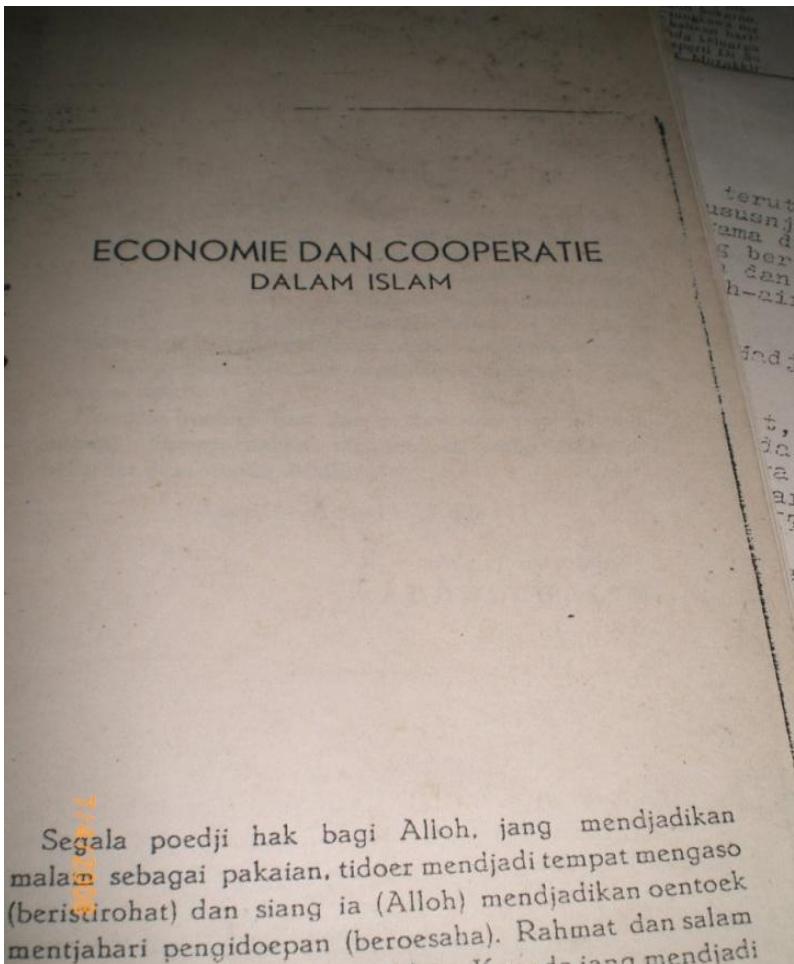
***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita***

*peratie* itu bukan toko tetapi sesuatu tempat persediaan barang-barang apa yang menjadi kebutuhannya anggota .... *Cooperatie* tentu hatganya murah .... *Cooperatie* berlainan dengan N. V. (*Naam-looze Venootschap*), *cooperatie* itu kumpulannya orang, tapi N. V. itu boleh kita sebut kumpulan uang (Halim, 1936: 16).

Sebagai penganjur, K. H. Abdul Halim tidak hanya sebatas mengajak secara lisan, tetapi juga memberikan contoh dengan mendirikan koperasi di lingkungan Persjarkatan Oelama. Ia juga kemudian mendirikan dan menghidupkan kembali pabrik tenun sejak tahun 1939 (pabrik ini pernah didirikan oleh *hayatul qulub* tahun 1912). Pabrik tenun ini dikelola melalui koperasi oleh Persatuan Goeroe Persjarkatan Oelama (PGPO). Selain itu, PGPO juga memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang perkoperasian (Jalaludin, 1990: 127).

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita**

Foto 4: Buku Karya K. H. Abdul Halim  
*Economie dan Cooperatie dalam Islam*

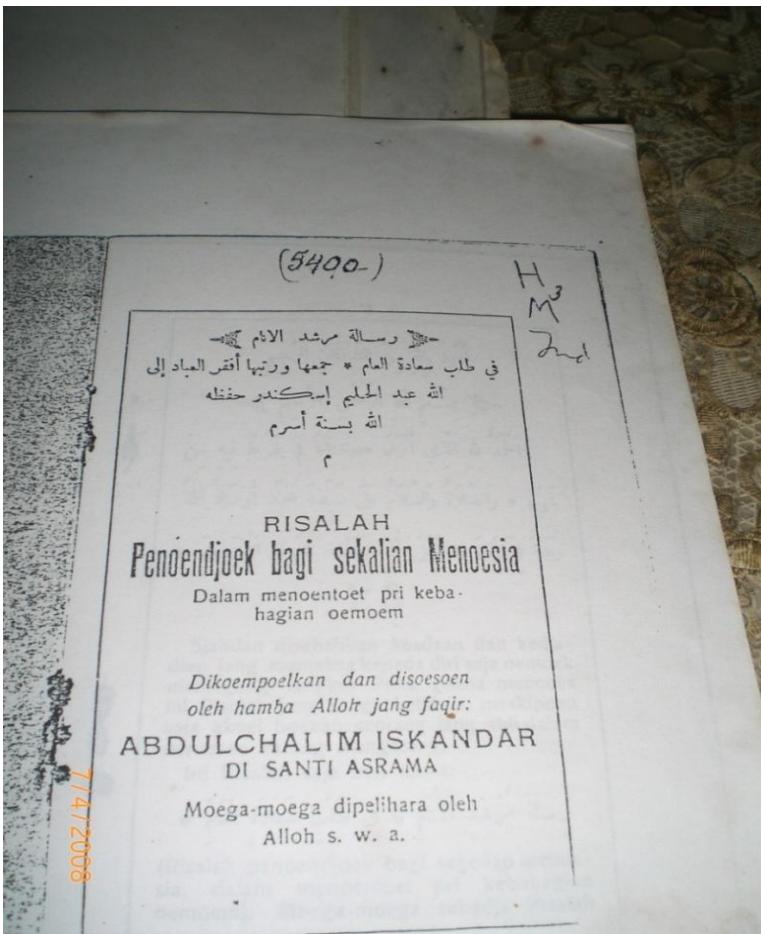


Segala poedji hak bagi Alloh, jang mendjadikan  
malam sebagai pakaian, tidoer menjadi tempat mengaso  
(beristirohat) dan siang ia (Alloh) mendjadikan oentoek  
mentjahari pengidoepan (beroesaha). Rahmat dan salam  
Kapada iang menjadi

Sumber: Dokumentasi Santi Asromo, 2008.

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Berjuang Menggapai Cita-Cita**

Foto 5: Buku Karya K. H. Abdul Halim  
Tentang Upaya Mencapai Kebahagian Dunia Akhirat



Sumber: Dokumentasi Santi Asromo, 2008.

### **III. MENDIRIKAN SANTI ASROMO**

#### **1. Keadaan Pendidikan pada Awal Abad Ke-20**

Pendidikan di Hindia Belanda baru mendapatkan kepastian hukum ketika Raja Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 95 Tanggal 30 September 1848. Melalui keputusan itu, Gubernur Jenderal Rochussen diberi wewenang untuk memasukkan dana pendidikan dalam anggaran Pemerintah Hindia Belanda. Dana pendidikan sebesar 25.000 gulden per tahun anggaran itu, dimaksudkan untuk mendirikan sekolah bumiputera untuk menghasilkan calon-calon pegawai di lingkungan birokkrasi kolonial (Ekadjati et al., 2004: 121).

Dalam pelaksanaan, proses menyebarluaskan kesempatan sekolah bagi penduduk bumiputera tidaklah sama untuk setiap wilayah dan strata sosial penduduk. Pada awalnya, sekolah bumiputera itu pun didirikan hanya untuk kalangan masyarakat dari strata sosial tertinggi, seperti keturunan bupati. Sementara itu, bagi kalangan masyarakat dari strata sosial rendah, pemerintah membuka sekolah desa. Di Majalengka, sekolah desa baru diperkenalkan pada awal abad ke-20 oleh Bupati R. A. A. Sasra Ningrat (1902-1922). Akan tetapi, sekolah pri-bumi yang bukan didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sudah dikenal oleh masyarakat Majalengka, di antaranya pesantren dan madrasah (Kartika, 2008: 91).

Lembaga pendidikan pesantren masih terus hidup dan berkembang di Majalengka ketika pendidikan formal mulai dibuka oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pada upaya penguasaan ilmu keislaman. Istilah pesantren itu sendiri berasal dari kata *santri* yang diberi awal *pe* dan akhiran *an* sehingga terbentuk istilah '*pesantrian*' yang berarti tempat tinggal para santri. Dalam perkembangannya, istilah *pesantrian* itu mengalami perubahan bunyi menjadi *pesantren* yang kemudian menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia.

Secara umum, dikenal dua pendapat mengenai asal usul pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Pen-

dapat pertama mengemukakan bahwa pesantren merupakan bagian dari tradisi Islam. Mereka menyatakan bahwa pesantren lahir dari pola kehidupan tassauf yang dikenal dengan sebutan *zawiyat*. Pola kehidupan tersebut kemudian berkembang di dunia Islam, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara (Madjid, 1985: 104). Pendapat kedua, yang umumnya dikemukakan oleh para orientalis, mengatakan bahwa pesantren merupakan ke lanjutan dari tradisi Hindu dan Budha. Pendapat mereka didasarkan pada adanya kemiripan istilah santri dan *shastri*. Bahkan dikemukakan oleh mereka bahwa istilah santri diambil dari bahasa India '*shastri*' yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu (Berg dalam Dhofier, 1982: 18). Senada dengan Berg, ada juga yang mengatakan bahwa istilah *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan (Chatuverdi dan Tiwari dalam Dhofier, 1982: 18). Namun demikian, kedua pendapat itu sepakat bahwa lembaga pendidikan Islam itu sudah ada sebelum kedatangan bangsa Eropa di Nusantara pada akhir abad ke-16.

Sebagai pusat pendidikan Islam, sudah barang tentu pesantren memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, karena lembaga pendidikan tersebut berkedudukan sebagai pusat penyebaran dan pemantapan ketaatan masyarakat terhadap

Islam. Dengan perkataan lain, pesantren merupakan lembaga pendidikan umum bagi rakyat Indonesia selama berabad-abad (Peacock, 1986: 19). Kenyataan tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal, di antaranya (1) pesantren merupakan lembaga yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia; (2) pesantren memegang peranan yang paling penting dalam penyebaran Islam sampai ke daerah pelosok; (3) beberapa manuskrip tentang ajaran Islam, yang dikumpulkan oleh para pengembara Inggris dan Belanda sejak abad ke-16, dihasilkan oleh pesantren; (4) memahami eksistensi pesantren akan memudahkan kita memahami sejarah Islamisasi di Asia Tenggara (Soebardi, 1978: 215).

Meskipun pesantren lebih berperan pada aspek sosial budaya, bukan berarti tidak memiliki peran politik. Walaupun sangat terbatas, pesantren masih memiliki pengaruh politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki *religious power* sehingga dapat dipakai oleh pemerintah dan para politisi sebagai alat untuk mendapat dukungan politik. Walaupun demikian, acap kali *religious power* yang dimiliki pesantren itu menjadi pendorong bagi perjuangan politik seperti yang terjadi pada gerakan-gerakan: sosial, keagamaan, dan pembaharuan pendidikan baik di Jawa maupun di luar Jawa

pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Kartodirdjo, 1984: 125). Menjelang tahun 1900, ideologi politik keagamaan yang bercorak menentang kekuasaan kolonial Belanda terbentuk di pesantren (Geertz, 1982: 81).

Pola umum pendidikan di pesantren tradisional dilakukan dengan cara memberikan teladan dari kyai tentang sesuatu yang ideal menurut ajaran Islam, yaitu perilaku, pola pikiran dan perasaan, symbol-simbol, dan amalan-amalan Islam. Selain diberikan secara langsung oleh kyai dalam kehidupannya sehari-hari, para kyai pun memberikannya melalui majelis taklim yang lebih dikenal dengan pengajian. Pengajian yang diberikan oleh kyai itu, tidak sebatas di dalam lingkungan pesantren saja, melainkan juga menjangkau masyarakat yang bukan santri.

Sementara itu, sistem pengajaran yang berlaku di pesantren biasanya dalam bentuk *sorogan* dan *bandongan* atau disebut juga system *weton*. *Sorogan* diberikan kepada santri tingkat awal yang dianggap telah menguasai pembacaan al Quran. Santri memperoleh kahliannya dalam membaca al Quran dari seorang guru yang biasanya memiliki murid tidak lebih dari empat orang. *Sorogan* merupakan sistem pengajaran paling awal dalam sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan system ini, seorang santri dapat dibimbing oleh gurunya sehingga ia

dapat menguasai pembacaan al Quran, menguasai bahasa Arab, dan pada akhirnya dapat mengikuti pendidikan lanjutan di pesantren, yang menerapkan sistem *bandongan*, secara optimal.

Sistem *bandongan* merupakan sistem pengajaran utama di lingkungan pesantren. Sekelompok santri yang berjumlah antara 5 – 500 orang mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Hal-hal yang dianggap sulit dicatat oleh santri di atas bukunya sehingga akan memudahkan dirinya dalam proses memahami inti ajaran yang diberikan guru. Kelompok belajar ini lebih dikenal dengan sebutan *halaqah* yang secara harfiyah berarti lingkaran santri atau sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan seorang guru. Materi pokok yang diberikan oleh para kyai kepada para santrinya selalu berkenaan dengan ilmu-ilmu keagamaan, seperti fiqh, tauhid, hadits, tafsir quran, dan materi lain yang berasal dari kitab kuning. Pesantren dengan metode dan kurikulum seperti ini kemudian dikenal dengan sebutan pesantren tradisional.

Di samping pendidikan pesantren, sampai awal Abad ke-20 di Majalengka pun sudah dikenal lembaga pendidikan formal yaitu sekolah-sekolah yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda. Lembaga pendidikan ini lebih menekankan pada upaya pengu-

saan ilmu pengetahuan umum sehingga ilmu keagamaan tidak diperhatikan dan memang tidak tercantum dalam kurikulumnya. Sistem pengajaran yang diterapkan di lembaga sekolah-sekolah umum adalah dengan menggunakan sistem kelas.

Sebanarnya, pendidikan jenis ini sudah dikenal pada abad ke-19, seperti yang dikemukakan pada awal bab ini. Akan tetapi, sampai tahun 1907, masyarakat pribumi sangat terbatas untuk dapat sekolah di lembaga pendidikan formal ini. Hal tersebut terjadi karena tujuan pembukaan sekolah ini adalah untuk masyarakat Eropa (Belanda) dan masyarakat pribumi kelas atas (ningrat). Baru sejak tahun 1907, kesempatan sekolah bagi anak-anak pribumi semakin terbuka seiring dengan dibukanya sejumlah *Volkschol* (Sekolah Rakyat) yang disebut juga Sekolah Rakyat atau Sekolah Desa (Kutoyo (ed.), 1986: 81). Meskipun demikian, dilihat dari kurikulum dan tujuan pendidikannya, sekolah ini sangat berbeda dengan sekolah dasar bagi masyarakat Belanda dan masyarakat pribumi kelas atas.

Seiring dengan diperkenalkannya Politik Ethis tahun 1901, dalam kerangka kepentingan kolonialisme Belanda, pemerintah membuka sekolah-sekolah bagi kalangan penduduk pribumi. Meskipun demikian, diskriminasi terhadap kemudahan mendapatkan pendidikan masih juga belum dapat dihapus, karena memang kebijakan

pendidikan, sekali lagi, tidak dapat dilepaskan dari politik kolonial Belanda. Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, pendidikan kolonial yang berkembang di Majalengka dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian.

**Pertama**, pendidikan umum yang bertujuan hendak memberi pengetahuan dasar bagi semua lapisan masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Secara umum, sekolah umum dikelompok menjadi empat kategori, yaitu sekolah rakyat (sekolah desa dan sekolah gubernemen kelas II), sekolah Belanda untuk pribumi (*Hollandsch Inlandsch School-HIS, Meer Uitgebreid Lager onderwijs-MULO*, Sekolah Partulir, *Hoogere Burgersschool-HBS*), sekolah Belanda untuk orang Cina (*Hollandsch Chinesse School-HCS*), dan sekolah Belanda untuk orang Belanda/Eropa lainnya (DHS dan KWS) (Kartika, 2008: 92-93).

Selain sekolah umum seperti disebutkan di atas, dikenal pula sekolah khusus yang bertujuan mencetak **calon** bagi pekerjaan tertentu. Sekolah jenis ini cukup banyak, di antara (1) *Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA), yakni sekolah bagi anak-anak kaum bangsawan yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan birokrasi kolonial; (2) *Bestuurschool*; (3) *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijs* atau dikenal juga dengan sebutan Sekolah Raja;(4)

*Normaalschool voor Indlandshe Onderwijs* atau Sekolah Normal.

Dengan sekolah yang cukup beragam, namun diskriminatif, Pemerintah Hindia Belanda ingin memenuhi tuntutan kelompok liberal agar pendidikan bagi penduduk pribumi diperhatikan secara serius. Meskipun demikian, pembukaan sekolah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik kolonial, sehingga pendidikan pada masa ini memperlihatkan ciri-ciri yang bersifat kolonial juga. Beberapa ciri utama dari sistem pendidikan kolonial adalah gradualisme, dualisme, pengawasan pusat yang sangat ketat, pendidikan pegawai diprioritaskan, konsolidasi, perencanaan yang tidak sistematis (Nasution dalam Jalaludin, 1990: 36-38). Pendidikan ini juga bersifat heterogen, diskriminatif, kolonialistik, dan intelektualistik. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan intelektualistik di sini adalah suatu kecenderungan aktifitas pendidikan hanya untuk mengembangkan daya cipta sehingga daya rasa dan daya karsa anak didik diabaikan. Kecenderungan ini akan membawa anak didik ke arah pendidikan yang verbalistik yang pada akhirnya akan merugikan mereka (Jalaludin, 1990: 37; Surjomihardjo, 1976: 251).

Kondisi pendidikan seperti itu mendorong lulusannya kurang mampu untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan yang disediakan pemerintah. Menurut Ki

Hajar Dewantara, sikap seperti itu merupakan sikap yang tidak berinisiatif dan lemah. Oleh karena itu, ketika pemerintah mengurangi pegawai di jajaran birokrasinya sebagai dampak *melaise* tahun 1930, pengangguran menjadi begitu tinggi. Ironisnya, pengangguran itu di-dominasi oleh mereka yang memiliki ijazah sekolah umum (Jalaludin, 1990: 178). Kondisi tersebut mendapat perhatian mendalam dari K. H. Abdul Halim yang dituangkan dalam sebuah artikel panjang *Soeara Persjarikatan Oelama* (1931: 98). Ia mengatakan

Oleh Aneta ada disiarkan pekabaran buat satu pekerjaan sebagai *verkeercontroleur* (pengawas) yang tidak berbeda jauh dari *mandoor stort* (kepala bagian penyetoran) pada *Provincie Batavia*, ada 503 orang yang datang melamar itu ada Ir. Jeritten Planters dan lain-lain yang hidup sekarang dengan penganggur. Di sini kita bisa mudah mengukur bagaimana hebatnya malaise itu waktu, suatu *provincie* yang hanya memakai tidak lebih dari lima orang *controleur* jalanan sudah sekian banyaknya orang-orang berebut mengadu untungnya, lebih hebat pula sifatnya di antara pelamar-pelamar itu pengetahuannya jauh tinggi dari keperluannya untuk satu pekerjaan.

Demikian juga dengan pendidikan pesantren belumlah menghasilkan lulusan yang ideal menurut pemikiran K. H. Abdul Halim. Mereka masih mengandalkan

pekerjaan sesuai dengan kemampuan pengetahuan keagamaannya, yakni menjadi guru agama atau paling tinggi menjadi penghulu. Apabila hal itu tidak memungkinkan, mereka kemudian membantu pekerjaan orang tuanya berdagang atau bertani. Mereka tidak memiliki sikap untuk menciptakan suatu pekerjaan yang tidak bergantung terhadap dua jenis pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, mereka memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menciptakan pengangguran (Jalaludin, 1990: 189; Noer, 1991: 82-83).

Di samping kondisi pendidikan yang tidak seimbang, keadaan masyarakat pun begitu mempengaruhi pemikiran K. H. Abdul Halim di bidang pendidikan. Kemiskinan dan keterbelakangan penduduk pribumi mayoritas merupakan kaum muslimin. Hampir semua sumber penghidupan duniawi dikuasai oleh masyarakat bukan muslim. Keterbelakangan disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang diterima oleh kaum muslimin (Halim, 1936: 6-7). Dengan kebodohan itu, kaum muslimin banyak meninggalkan perintah Allah SWT dan justru, karena kebodohnya itu, banyak menjalankan larangannya. Kalaun pendidikan yang baik diberikan kepada kaum muslimin, niscaya mereka tidak akan hidup dalam keterbelakangan (Halim, 1932: 79).

Meskipun kondisi kaum muslimin seperti itu, bukan berarti mereka tidak dapat mengubah nasibnya. Sa-

lah satu sumber perubahan itu adalah mengurangi pertentangan di antara kaum muslimin mengenai latar belakang pendidikannya. Perasaan bahwa lulusan sekolah lebih maju pengetahuannya dan lulusan pesantren dipandang lebih lemah, atau sebaliknya, harus dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sulit memang menyatukan pendapat yang berbeda itu, sehingga mendorong K. H. Abdul Halim memikirkan cara lain, yakni membangun suatu sistem pendidikan yang mengintegrasikan kedua sistem pendidikan itu. Dengan perkataan lain, K. H. Abdul Halim meyakini bahwa memperbarui pendidikan akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perbaikan pendidikan yang diinginkan oleh K. H. Abdul Halim kemudian dikenal dengan sebutan *Ishlah al-Tarbiyyat* yang merupakan salah satu dari delapan pemikirannya yang terkandung dalam konsep *al-Salam*. *Al-Salam* itu sendiri mengandung makna sebagai upaya membina umat untuk dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat kelak. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dan dibina secara kontinyu adalah aspek pendidikan. Aspek ini mendapat perhatian luar biasa dari K. H. Abdul Halim karena pada saat itu pendidikan dirasakan oleh dirinya sangat pincang. Pendidikan keagamaan yang dipusatkan di pesantren-pesantren tradisional, hanya mementingkan aspek

keakhiratan saja. Sementara itu, pendidikan umum yang dipusatkan di sekolah-sekolah umum, hanya memeningkan aspek keduniawian semata. Dengan demikian, tidak ada keseimbangan dalam aspek pendidikan sedangkan Islam mengajarkan manusia untuk mencari kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat secara harmonis. Bagi K. H. Abdul Halim, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang berhasil memadukan sistem pendidikan pesantren tradisional dengan pendidikan modern (yakni pendidikan yang yang diterapkan di sekolah-sekolah pemerintah). Perpaduan dua sistem pendidikan ini akan mencetak anak-anak muslim yang berharga dunia akhirat (Halim, 1931: 80). Dengan dorongan seperti itu, K. H. Abdul Halim kemudian mendirikan Santi Asromo, sebuah lembaga pendidikan yang memadukan konsep pendidikan pesantren dan pendidikan modern plus keterampilan.

## **2. Berdirinya Santi Asromo**

Pada 29-30 Agustus 1931, Persyarikatan Oelama (PO) menggelar kongres ke-9 di Majalengka. Kongres itu mendapat perhatian cukup tinggi dari masyarakat yang diperlihatkan dengan kehadiran sekitar 1.500 orang dalam kegiatan *openbare vergadering* (rapat terbuka) sebagai bagian dari kegiatan kongres (SPO, Juni-Agustus

1931: 65). Dalam laporan Pemerintah Hindia Belanda, *openbare vergadering* itu dihadiri sekitar 500 orang dan sekitar 100 orang perempuan yang merupakan utusan dari 25 cabang PO dan organisasi yang bernaung di bawah PO, seperti Perserikatan Goeroe PO, Hizboel Islam, Koperasi PO, dan sekolah PO (Indonesia, 1931: 1). Kongres pun dihadiri oleh utusan dari Pengurus Besar dan cabang Fatimijah (organisasi perempuan PO), utusan dari pemerintah (wedana, asisten wedana, menteri polisi, dan utusan dari kantor Adviseur voor Inland-sche Zaken (SPO, Juni-Agustus 1931: 66).

Dalam kongres itu, K. H. Abdul Halim mencetuskan ide bahwa pendidikan harus diperbaharui sehingga akan mampu melahirkan anak didik mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain. Untuk mencapai kondisi itu, para siswa harus dibekali bukan hanya pengetahuan agama dan pengetahuan umum saja, melainkan juga harus dibekali dengan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Konsep yang dikemukakan oleh K. H. Abdul Halim itu kemudian dikenal dengan istilah *Santri Lucu*.

Konsep tersebut lahir dari pemahaman K. H. Abdul Halim terhadap ajaran Islam bahwa jika agama tersebut dijadikan pedoman secara benar, umat muslimin akan mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Untuk menyebarkan ide atau pemahamannya tersebut, K. H. Abdul Halim membuat sebuah tulisan yang merupakan tafsir dari Quran Surat Al Mu'minun ayat 12-14. Firman Allah SWT inilah yang dijadikan pedoman bagi K. H. Abdul Halim untuk mencari kehidupan dunia yang layak sekaligus sebagai bekal bagi kesejahteraan hidup di akhirat kelak. Dia menulis

... Maka dengan keterangan dari Surat Al Mu'minun ayat 12-14, kita dapat mengambil pokok arti bahwa penghidupan manusia ialah pertanian. Sesudah pertanian berhajat kepada pertukangan. Maka dari dua pekerjaan tadi, timbullah perdagangan. Menurut faham pelajaran Islam, jika manusia mengadakan pokok keperluan hidup yang tiga: satu, makanan; dua, pakaian; dan tiga, tempat kediaman. Daripada yang tiga di atas tadi, ialah pertanian, pertukangan, dan perdagangan, Insya Allah pergaulan hidup sempurna dengan aturan (*maatschapelijke levensorde*) (Halim dalam Jalaludin, 1990: 143).

Dengan tafsir demikian, K. H. Abdul Halim menginginkan adanya perubahan dalam sistem pendidikan bagi kaum muslimin. Pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan yang mandiri, yang dapat memberikan kemampuan mencari penghasilan yang halal, dan mampu memberikan bantuan kepada orang lain. Konsep inilah yang mendasari sistem pendidikan yang diinginkan oleh K. H. Abdul Halim yang dikemukakan dalam Kongres ke-9

*Persjarikatan Oelama* di Majalengka tahun 1931. Konsep *Ishlah al-Tarbiyyat* dengan ide *santri lucu*-nya tersebut diterima dengan sangat baik oleh seluruh peserta kongres. Untuk merealisasikan rencana perbaikan pendidikan tersebut, kongres menyerahkan sepenuhnya kepada K. H. Abdul Halim.

Untuk merealisasikan gagasannya tersebut, K. H. Abdul Halim melakukan serangkaian pembicaraan dengan beberapa orang rekan seperjuangannya. Suatu ketika, sekitar bulan Januari 1932, K. H. Abdul Halim bersama-sama dengan Muhammad Dardjo pergi ke Maja. Setelah keperluan organisasinya selesai, ia melanjutkan pembicaraan mengenai kondisi pendidikan hingga larut malam. Dalam pembicaraan itu, dibahas pula mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan rencananya membangun sebuah kompleks pendidikan sebagaimana diamanatkan Kongres PO ke-9 kepada K. H. Abdul Halim.

Dalam pembicaraan itu terungkap bahwa kendala utama dari rencana mendirikan sekolah tersebut adalah ketiadaan dana untuk membeli tanah. Tanah yang diperlukan oleh K. H. Abdul Halim harus terletak di daerah yang sepi, pemandangannya bagus, dan udaranya sejuk. Sebenarnya, tanah yang diinginkan oleh K. H. Abdul Halim sudah ada di Desa Gintung, tetapi belum dapat dibeli karena organisasi dan dirinya tidak memiliki dana. Men-

dengar masalah yang dihadapi oleh K. H. Abdul Halim, M. Arjasubrata atau mas Arja Brata Kumetir (anak sulung M. Arjawinata, meminta dia untuk membicarakan masalah itu di rumahnya di Ciomas (Fatah, 1980: 1-2; Wawancara dengan Muh. Mukri, tanggal 30 Maret 2008). Tawaran tersebut diterima oleh K. H. Abdul Halim dan selang beberapa hari kemudian, dengan ditemani oleh Braiasurya, K. H. Abdul Halim pergi ke Ciomas. Sesampainya di Ciomas, K. H. Abdul Halim, Braiasurya, dan M. Arjasubrata membicarakan rencana mendirikan sebuah kompleks pendidikan.

Di Ciomas, belum ada kesepakatan apapun mengenai realisasi mendirikan kompleks pendidikan. Mereka hanya sepakat untuk meninjau tanah yang dimaksud oleh K. H. Abdul Halim. Setelah melihat tanah itu, mereka kembali ke rumah M. Arjasubrata dan di sana sudah ada M. Arjawinata, ayahanda M. Arjasubrata. Mereka berempat membicarakan kembali rencana K. H. Abdul Halim tersebut. Pada akhir pembicaraan, baik M. Arjawinata maupun M. Arjasubrata bersepakat untuk membeli tanah itu dan menghadiahkannya kepada K. H. Abdul Halim. Mereka meminta kepada K. H. Abdul Halim untuk segera mewujudkan kompleks pendidikan itu sebagai sarana mendidik anak-anak muslim. Dengan hadiah tanah itulah, K. H. Abdul Halim segera mewujudkan kom-

pleks pendidikan sebagaimana dicita-citakannya dan diamanatkan dalam Kongres PO ke-9.

Pada bulan April 1932, berdirilah lembaga pendidikan yang diberi nama **Santi Asromo**. Lembaga pendidikan ini terletak di Desa Pasirayu, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Jarak ke Majalengka sekitar 17 km ke arah timur laut dan keseluruhannya sekitar 15 hektare (Wawancara dengan Abdul Fatah, tanggal 30 Maret 2008 dan S. Wanta, tanggal 7 April 2008). Semen-tara itu, nama Santi Asromo diambil dari bahasa Jawa Kuna, yang berarti tempat yang damai dan sunyi (Sukarsa, 2007: 104; Wawancara dengan Muh. Mukri, tanggal 30 Maret 2008).

Pada Kongres Persjarikatan Oelama Ke-9 tanggal 14-17 Juli 1932 di Majalengka, diputuskan bahwa konsep pendidikan yang akan diterapkan di Santi Asromo akan diintensifkan. Terkait dengan hal tersebut, Pengurus Besar Persjarikatan Oelama memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Sistem pendidikan yang akan diterapkan di Santi Asromo adalah sistem pondok pesantren. Akan tetapi, sistem pondok pesantren Santi Asromo berbeda dengan sistem pondok pesantren yang telah dikenal pada waktu itu. Di Pondok Santi Asromo, para santri akan diberi pelajaran ilmu-ilmu agama (*ruhaniyah-geestelijk*), pengetahuan umum (*aqliyah-intellect*),

- dan keterampilan (*amaliyah-praktik*), antara lain pertanian, pertukangan (kayu), dan kerajinan tangan.
2. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Santi Asromo bertujuan menghasilkan lulusan yang mandiri dan percaya diri pada kemampuannya. Para santrinya akan digembleng menjadi *santri lucu* bukan *santri kaku* sehingga begitu lulus tidak akan menggantungkan diri pada pertolongan orang lain.
  3. Para santri akan diwajibkan tinggal di asrama dan diwajibkan membawa beras sebanyak 30 kati dan menyerahkan uang 60 sen tiap bulannya untuk bekal selama menuntut ilmu di Santi Asromo. Lama pendidikan direncanakan antara 5 sampai 10 tahun (Sukarsa, 2007:104-105; Wanta, 1986: 7).

Dalam salah satu sumber, pada tahun 1932, K. H. Abdul Halim membeberkan secara rinci asas dan tujuan pendidikan yang hendak diterapkan di Pondok Pesantren Santi Asromo. Pada dasarnya, rencana tersebut tidaklah jauh berbeda dari penjelasan yang dikemukakan oleh Pengurus Besar Persyarikatan Oelama. Sebagian dari asas dan tujuan pendidikan di Santi Asromo dapat dibaca berikut ini.

Foto 6: Bekas Santri K. H. Abdul Halim



Keterangan: Abdul Fatah (Kiri) dan Muh. Mukri (Kanan)

Sumber: Dokumentasi Penulis 2008

1. Nama Pondok Mufidah "Santi Asromo" yang berarti Tempat Damai, untuk memperpadukan pengetahuan barat dan timur atas dasar-dasar Islam. Pelajaran yang diusahakan pada permulaan ini dibagi tiga bagian, yaitu: (a) Pelajaran Tahdiri; (b) Pelajaran Ibtidaiyah; dan (c) Pelajaran Tsanawiyah.  
Pelajaran dan ketrampilannya tidak ada bedanya dengan madrasah-madrasah PO yang sudah ada, ditambah dengan praktek, dengan disediakannya rupa-rupa perkakas keperluannya seperti : perkakas bercocok tanam, tukang besi dan kayu , pertenunan sederhana, obat-obatan dan sebagainya. Pelajaran rupa-rupa bahasa pun tidak dilupakan, kesemuanya ini akan menjadi penolong anak-anak murid kita dalam mencari rizki yang halal dikemudian hari jika sudah dewasa serta dapat hidup dengan penghidupan yang bebas dan merdeka.
2. Murid-murid akan tetap tinggal selama belajar dalam tempat itu dengan mendapat pimpinan dari salah seorang guru yang ditetapkan untuk memimpinnya pada tiap-tiap hari dan dibantu oleh beberapa pergaulan dengan teman-temannya. Pada siang selalu mendapatkan pengamatan, demikianpun makan, mimum, pakaian diatur dengan sederhana dan dikerjakan oleh mereka sendiri.
3. Tempat pelajaran diatur dengan cara yang sederhana juga, agar anak-anak itu tidak merasa asing dari tempat kediamannya sendiri. Seminggu sekali murid-murid diberi pelajaran riwayat atau tarikh ulama-ulama dan pemuka-pemuka Islam, terutama tarikh Nabi-Nabi dengan secara opentucht.
4. Pelajaran khutbah ( pidato ) diajarkan pula agar anak-anak itu kelak dapat berbicara dimuka umum dengan tangkas dan dapat menarik hati orang banyak untuk

mengerjakan segala kebaikan bersama yang diperintahkan Alloh SWT. Adapun azas dan tujuannya tak usah saya terangkan kembali, karena dalam permulaan risalah inipun saudara-saudara telah bersua dengan keterangan-keterangan saya, ialah tafsiran ayat 61 surat Al Baqoroh tadi.

Di sini saya perlu mengemukakan sedikit perbedaan pelajaran dan pendidikan. Sebagaimana tuan-tuan pembaca yang terhormat telah maklum bahwa pelajaran dan pendidikan itu memang pada hakekatnya ada perbedaan. Pelajaran memadai dengan apa-apa yang diajarkan, sedangkan pendidikan melengkapi segala pimpinan jasmani dan rokhaninya (*Leiding bij de geesbeleijken en lickameleyken groel*). Maka yang saya maksudkan dan cita-citakan ialah yang kedua, ialah pendidikan.

5. Dari hal pendidikan akhlaq buat kita kaum muslimin yakni menurut aturan agama Islam, tidak saya khususkan satu-satunya vak. Adapun pembagian pelajaran dan macam-macamnya ilmu dan caranya memberi pelajaran saya atur dalam judul harian dengan singkat susunan pelajaran ini bukan school system akan tetapi pondok system. Dan dituntun juga tentang cara menjaga keamanannya diantara sesama murid-murid, agar jangan sampai ada kejadian diantara sesama mereka yang bertabiat rakus, tamak, penindas, penghianat, judas dan lain sebagainya, yang mana sifat-sifat ini dapat tuan-tuan pembaca melihat dalam pergaulan hidup pada masa sekarang ini.
6. Perkara prieribadatan terhadap Alloh SWT. Seperti sembahyang dan lain-lainnya, tuntunannya akan

dibuatkan juga, agar anak-anak kita kelak di hari kemudiannya biasa beribadah kepada Alloh SWT.

7. Buat melakukan yang tersebut dalam no 5 dan 6 diatur dengan secara gemeente Islam, ini saya ambil dari kitab karangan Abu Hasan Mawardi. *Publiek en Administratief reeht van der Islam*.

Sampai disini rencana ini saya habisi dan bantuan dari segenap Muslin dan Muslimat sangat kami harapkan.

Wassalam

Santi Asromo  
Ramadhon 1350/Januari 1932

H. Abdul Halim

Keterangan:

Tulisan K. H. Abdul Halim ini ditulis ulang dua kali oleh Abdul Fatah pada 14 Rajab 1377/3 Pebruari 1958 dan pada 18 Rabiul Awal 1400/23 Pebruari 1980. Pada 16 Syawal 1408/01 Juni 1988, kembali ditulis ulang Dedi Masy-hudi dengan menggunakan komputer.

Pada tahap awal pembangunan Santi Asromo, hanya dibangun sebuah **tajug** (gubuk) bambu beratap ilalang dengan luas sekitar 27 m<sup>2</sup>. Bangunan ini belum difungsikan sebagai asrama untuk tempat tinggal santri secara tetap. Tajug sederhana ini dipergunakan oleh K. H. Abdul Halim sebagai tempat belajar 13 orang santrinya selama tiga hari dalam seminggu. Empat hari berikutnya, ketiga belas santrinya itu belajar di Dar al-Ulum Persyarikatan Oelama (PO) di Majalengka. Dar al-

Ulum merupakan lembaga pendidikan (madrasah) yang bertujuan hendak mencetak calon tenaga guru agama untuk keperluan intern Persyarikatan Oelama. Mereka belajar di Dar al-Ulum karena ketiga belas santri angkatan pertama Santi Asromo itu merupakan siswa dari Dar al-Ulum ini (Jalaludin, 1990: 149).

Sesuai dengan cita-citanya dan amanat Kongres Persyarikatan Oelama Tahun 1932, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh K. H. Abdul Halim di Santi Asromo tidak sepenuhnya bercorak pesantren. Para santri tidak hanya diberi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu keislaman saja, melainkan juga dibekali dengan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan. Dengan demikian, K. H. Abdul Halim berupaya memadukan pengatahan dunia dengan pengetahuan akhirat. Hal ini dapat dipandang sebagai sebuah pembaharuan pendidikan dengan tujuan mencetak lulusan yang mandiri.

Dalam laporan E. Gobee, Adviseur voor Inlandsche Zaken, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pelaksanaan Kongres Ke-13 Persyarikatan Oelama pada September 1935, terungkap bahwa ada 10 pelajaran yang diberikan kepada para santri di Santi Asromo. Kesepuluh pelajaran itu adalah keagamaan dengan Qur'an sebagai basisnya (*Godsdienst*); bahasa-bahasa asing (*vreemde talen*): Arab, Belanda, Inggris; sejarah (*geschiedenis*); ilmu bumi (*aardrijkkunde*); ilmu ukur

(*meetkunde*); ilmu alam (*natuurkunde*); ilmu bentuk (*vormleer*); menggambar (*teekenen*); ilmu pasti (*wiskunde*); dan kerajinan tangan (*handenarbeid*). Lama pendidikan selama 10 tahun yang terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu lima tahun pertama para santri diberi pengetahuan kearaban dengan basisnya bahasa Arab; dua tahun kemudian para santri masuk ke jenjang HIS dengan basisnya Quran; dan tiga tahun terakhir para santri memperdalam ilmu keagamaan sambil diberi keterampilan membuat berbagai produk dari kerajinan tangan (Indonesia, 1935: 3).

Hal yang menonjol dari sistem pendidikan yang dikembangkan di Santi Asromo adalah pelajaran keterampilan. Di antara sekian banyak keterampilan yang diterima oleh para santri Santi Asromo, yang pada masa awal berdirinya Santi Asromo diberikan langsung oleh K. H. Abdul Halim adalah penyamakan kulit, pembuatan kapur, dan pembuatan sabun. Bahkan untuk proses penyamakan kulit, secara sengaja Ia membuat sebuah catatan tangan mengenai proses penyamakan kulit tersebut. Catatan itulah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan bagi para ustaz dan santri di Santri Asromo untuk memperdalam pengetahuan mengenai penyamakan kulit (Wawancara dengan Abdul Fatah, tanggal 30 Maret 2008).

**Foto 7: Lokasi Kompleks Santi Asromo  
Ketika Mulai Didirikan Tahun 1932**



Keterangan: Di sebalah Barat (terhalang pohon) adalah Masjid; sebelah utara masjid adalah Madrasah (Tahun 1952 dijadikan asrama putra); dan sebelah selatan tempat tinggal K. H. Abdul Halim.

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

Untuk pelajaran keislaman, K. H. Abdul Halim tidak hanya merujuk pada kitab-kitab klasik yang umum diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Ia pun menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh para pembaharu dari Timur Tengah yang diterbitkan di Mesir. Untuk tafsir, misalnya, K. H. Abdul Halim pun menggunakan kitab *Fathul Qadir; Jami'ul Bayan fi Riwayah wa Dirayah*

*min Ilmi Tafsir* yang diterbitkan di Kairo, Mesir tahun 1351 Hijriah. Walaupun demikian, K. H. Abdul Halim tidak melepaskan diri dari Mazhab Syafi'i, sehingga dalam proses belajar mengajarnya, para santri pun diwajibkan untuk membaca kitab *Risalah Imam Sjafi'i* yang diterbitkan tahun 1309 Hijriah.

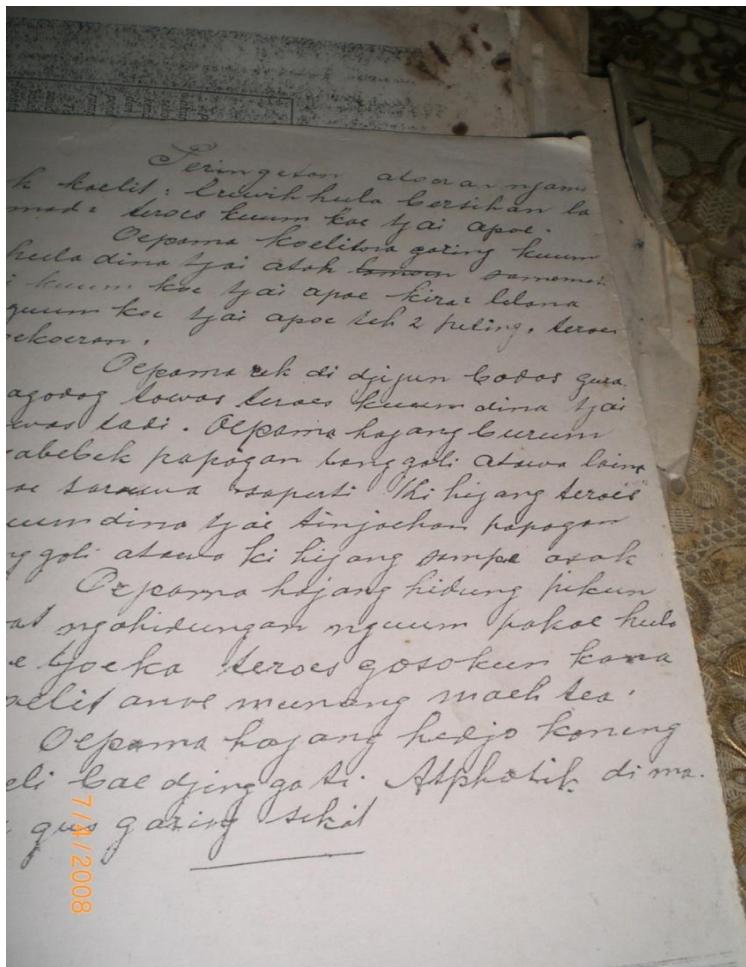
Perlu sekitar empat tahun bagi K. H. Abdul Halim untuk secara bertahap membangun berbagai bangunan yang dibutuhkan untuk sebuah pondok pesantren. Oleh karena itu, baru sekitar tahun 1936 Santi Asromo difungsikan sebagai pondok pesantren dan bengkel kerja bagi para santrinya (Wawancara dengan S. Wanta, tanggal 7 April 2008). Menurut penuturan Abdul Fatah (bekas santri dan sekarang menjadi salah seorang ustad di Santi Asromo), para santri pun diberi keterampilan membuat sabun, menyamak kulit, dan kapur tulis (Wawancara tanggal 30 Maret 2008).

Seiring dengan perjalanan waktu, prasarana di kompleks Santi Asromo semakin bertambah. Setelah memugar masjid tahun 1935, tiga tahun kemudian (1938) K. H. Abdul Halim mulai membangun ruang belajar yang terletak di sebelah utara masjid. Dengan dibangunnya ruang belajar itu, kegiatan belajar mengajar tidak seluruhnya dilakukan di masjid. Masjid lebih banyak difungsikan sebagai tempat para santri memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Pada tahun itu juga, tepat di depan

masjid dan rumah K. H. Abdul Halim dibangun sebuah tugu untuk menentukan waktu shalat. Tugu yang memuat angka tahun pendiriannya (1938) itu dikenal dengan nama *Benjet* dan alat untuk menentukan waktu shalat, penentuan waktu ramadhan, dan lain-lain dinamakan *Rubu'* (Wawancara dengan Ustadz Asep Zacky, tanggal 30 Maret 2008).

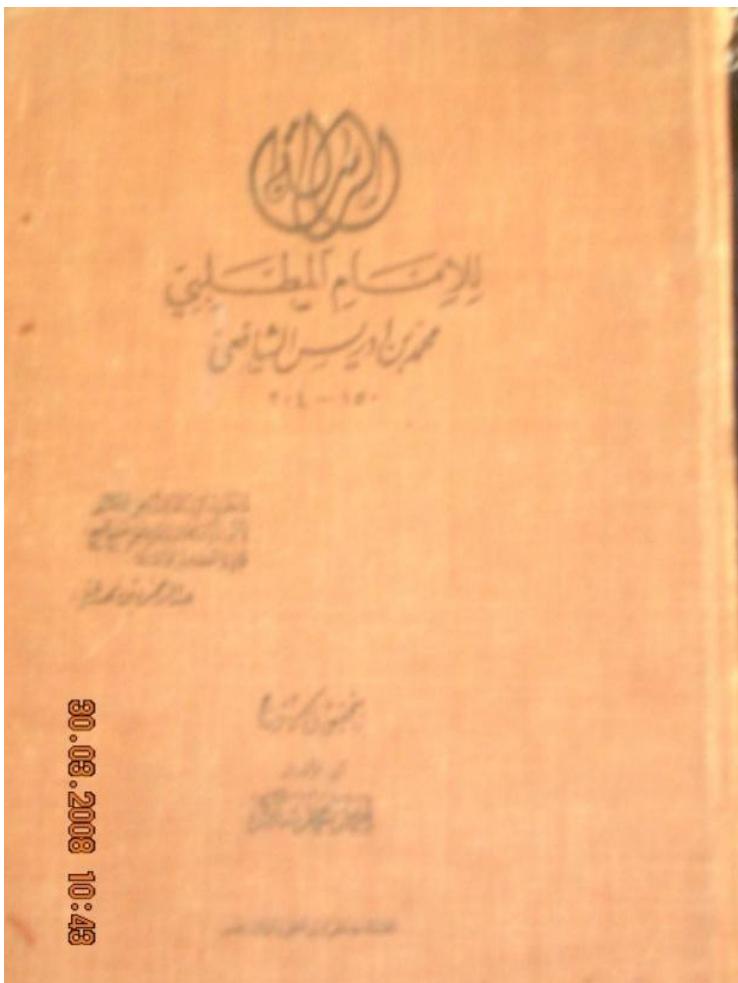
Pada masa pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan, pembangungan prasarana pendidikan tidak dapat dilakukan. Pembangunan prasarana pendidikan baru dilakukan lagi secara ekstensif pada tahun 1952 seiring dibangunnya kompleks baru sebagai pusat pendidikan di Santi Asromo. Kompleks tersebut terletak di sebelah timur kompleks lama dan secara hampir bersamaan dibangun ruang belajar, pendopo, dan asrama putri.

Foto 8: Tulisan Tangan K. H. Abdul Halim  
Tentang Cara Menyamak Kulit



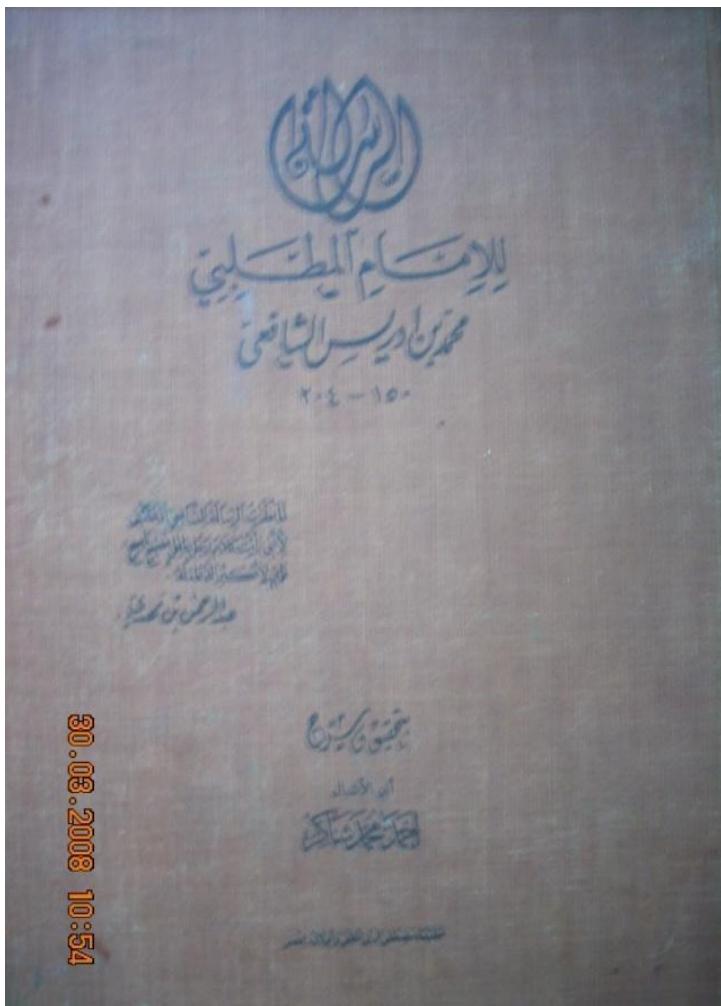
Sumber: Dokumentasi Santi Asromo, 2008.

Foto 9: Kitab Fathul Qadir (1351 H).



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 10: Kitab Risalah Imam Syafi'i



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 11: Masjid Santi Asromo



Keterangan: Kecuali arsitekturnya, bangunan masjid ini sudah dipugar, termasuk cat bangunannya.

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 12: Tempat Mengambil Air Wudlu di  
Masjid Santi Asromo (1938)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 13: Dinding Masjid Santi Asromo  
yang dibangun Tahun 1938



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 14: Tugu Benjet  
Untuk Menentukan Waktu Shalat (1938)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 15: Rubu' (Alat Menentukan Waktu Shalat)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 16: Tugu Benjet Tempat Rubu Ditempelkan (dinding sebelah selatan)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Sejak Santi Asromo didirikan, terlihat sekali upaya pembaharuan yang ingin dilakukan oleh K. H. Abdul Halim di bidang pendidikan. Dia sendiri menegaskan bahwa Santi Asromo itu tidak menerapkan sistem sekolah, tetapi sistem pondok. Meskipun sistem pondok, tetapi pelajarannya akan memadukan pengetahuan barat dengan pengetahuan timur dengan landasan Islam (Halim, 1932: 7). Upaya-upaya pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh K. H. Abdul Halim dan diterapkan dalam di Santi Asromo lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Thantawi Jauhari, Amir Syakib al-Arslan, dan Al Gazhali. Sementara itu, pengaruh Tagore dengan *Santineketan*-nya hanya berpengaruh pada keyakinan bahwa pendidikan akan jauh lebih berhasil kalau dilaksanakan di tempat yang sunyi, jauh dari hiruk pikuk kota (Jalaluddin, 1990: 356-357).

Santi Asromo dapat dikatakan sebagai puncak perwujudan pemikiran K. H. Abdul Halim di bidang pendidikan. Ketika Santi Asromo berdiri dan dijadikan sebagai bagian dari Majelis Pengajaran Persyarikatan Oelama, K. H. Abdul Halim secara penuh mengurus pondok pesantren tersebut. Konsepnya tentang santri lucu, betul-betul diterapkan oleh K. H. Abdul Halim sehingga para santrinya tidak hanya menguasai pengetahuan agama saja, melainkan juga menguasai bidang pertanian dan keterampilan tangan lainnya, seperti menyamak ku-

lit, membuat sabun, dan membuat kapur tulis (Wawancara dengan Abdul Fatah, tanggal 30 Maret 2008).

Sebagai lembaga pendidikan yang memadukan sistem pesantren dengan sistem sekolah, jelas sekali usaha pembaharuan yang dilakukan oleh K. H. Abdul Halim di pondok pesantrennya itu. Setidak-tidaknya ada empat aspek yang diperbaharui oleh K. H. Abdul Halim dalam membina dan mengembangkan Santi Asromo. **Pertama**, pembaharuan kelembagaan pondok pesantren. Pada umumnya, sebuah kompleks pesantren terdiri dari beberapa bangunan utama, yaitu: masjid, pondok, dan asrama (bagi pesantren tradisional), dan madrasah (bagi pesantren modern). Pondok pesantren Santi Asromo lebih dari itu, karena di dalam kompleks pun dibangun poliklinik, bengkel kerja, koperasi, dan prasarana untuk keterampilan. Selain itu, K. H. Abdul Halim pun memasukkan unsur-unsur non-Arab dalam menamai unsur-unsur pesantrennya. Nama-nama Santi Asromo, Panti Mardhi Waluyo, Wisma Prio Nindito, Wisma Rini, dan Hamong diambil dari bahasa Jawa Kuna bukan dari bahasa Arab. Pada waktu itu, tindakan K. H. Abdul Halim merupakan penyimpangan dari tradisi pesantren yang sudah mapan.

**Kedua**, pembaharuan di bidang konsep pendidikan pondok pesantren. Secara umum, pendidikan keterampilan yang diterima oleh para santri di berbagai pondok

pesantren belum direncanakan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang produktif. Keterampilan hanyalah sebuah kegiatan sampingan belaka yang dipandang memiliki nilai ekonomis baik bagi kepentingan kyai maupun para santrinya. Hal berbeda ditunjukkan oleh K. H. Abdul Halim ketika mendirikan dan mengembangkan Santi Asromo. Keterampilan dijadikan sebagai rencana pendidikan secara komprehensif agar seluruh komponen pesantren dapat memiliki jiwa yang produktif. Keterampilan yang diberikan oleh K. H. Abdul Halim kepada para santrinya bertujuan untuk menciptakan kemandirian hidup sehingga para lulusannya dapat melakukan bekerja secara mandiri.

**Ketiga**, pembaharuan sistem pengajaran. Sejak didirikan, metode demonstrasi dan pengajaran situasi telah diterapkan oleh K. H. Abdul Halim. Hal tersebut menunjukkan bahwa Santi Asromo berbeda dengan pesantren lainnya yang pada waktu itu masih menutup diri dari persinggungan dengan dunia di luar pesantren. Para santri dibagi ke dalam beberapa kelompok dan di bawah para *hamong* (pembimbing) mereka kemudian berbaur dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dengan secara langsung belajar membina masyarakat sekitarnya.

**Keempat**, pembaharuan kurikulum dan administasi-trasi pesantren. Pada umumnya, pondok pesantren yang

ada pada waktu itu tidak terlalu memerhatikan masalah administrasi. K. H. Abdul Halim, melalui Majelis Pengajaran Persjarikatan Oelama, melangkah lebih maju dengan menerbitkan sebuah buku Ketetapan Pedoman Pengajaran yang menjadi rujukan bagi proses pengajaran, kurikulum, dan buku pelajaran di sekolah-sekolah dan pesantren di lingkungan Persjarikata Oelama.

Keempat jenis pembaharuan tersebut kemudian diterapkan secara konsisten di Santi Asromo sehingga tidaklah berlebihan kalau dikatakan Santi Asromo merupakan sebuah pondok pesantren modern. Masa-masa tua K. H. Abdul Halim diisi dengan mengawasi dan men-garah para pengasuh Santi Asromo agar tujuan pendidi-kan yang hendak dicapainya tidak menyimpang dari cita-citanya. Sampai tahun 1950-an konsep santri lucu masih diterapkan secara konsisten oleh K. H. Abdul Halim, karena memang kondisinya masih memung-kinkan. Para santri masih diberi keterampilan di bidang pertanian, peternakan, penyamakan kulit, pembuatan sabun, dan kapur tulis. Selain oleh K. H. Abdul Halim, un-tuk pelajaran pertanian diberikan oleh Pak Usman (Wawancara dengan Abdul Fatah, tanggal 30 Maret 2008).

Foto 17: Para Santri Santi Asmoro (1952)

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim; Mendirikan Santi Asromo*



Sumber: Sukarsa, 2007: 108.

Foto 18: Para Santri sedang Belajar Bercocok Tanam  
(1953)



Sumber: Sukarsa, 2007: 110.

Sebagai sebuah pesantren yang ingin melakukan pembaharuan di bidang pendidikan, buku-buku yang dipakai dalam proses belajar mengajar pun tidak hanya sebatas kitab-kitab yang selama ini digunakan oleh pesantren-pesantren tradisional. Tidak juga hanya mempergunakan buku-buku pelajaran pengetahuan umum yang biasa dipergunakan di sekolah-sekolah umum. K. H. Abdul Halim pun mempergunakan kitab-kitab yang ditarik oleh para pembaharu Islam. S. Wanta dan Abu Sjahid Hidajat dalam keterangannya kepada Jalaludin (1990: 221) mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada tiga buah buku yang selalu dipergunakan oleh K. H. Abdul Halim sebagai bahan tambahan adalah buku *Al-Quran wa 'Ulum al-'Ashriyyat* dan *Tafsir Al-Jawahir* karangan Thanthawi Jauhari, serta buku *Limadza Taakkhaar Al-Muslimun wa Limadza Taqaddama Ghairuhum* karangan Emir Syakib Al-Arslan. Buku pertama pernah dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda masuk ke Indonesia karena semangat ilmiah yang terkandung dalam karangan tersebut. Sementara itu, buku kedua merupakan tafsir Quran berdasarkan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengaitkannya kemajuan bangsa Barat (Wawancara dengan Ustadz Asep Zacky, tanggal 30 Maret 2008).

Dengan pembaharuan seperti itu, Santi Asromo merupakan perwujudan dari pemikiran tentang pen-

didikan Islam yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya. Artinya, untuk mencapai kehidupan dunia yang layak dan berupaya untuk meraih kehidupan yang bahagia di akhirat, tidak hanya dapat dilakukan dengan mencari dan memperdalam ilmu keagamaan saja. Ilmu-ilmu duniawi pun penting dipelajari dan didalami secara seimbang dengan ilmu-ilmu keagamaan.



## **IV. MENGABDI KEPADA REPUBLIK**

### **1. Berjuang Melawan Matahari Terbit**

Pada tanggal 8 Maret 1942, secara resmi Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan wilayah jajahannya kepada Jepang. Sejak saat itu, wilayah Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh Kemaharajaan Jepang yang bercita-cita hendak membangun sebuah wilayah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Terhadap Jepang, sikap K. H. Abdul Halim berbeda dengan sikapnya kepada Pemerintah Hindia Belanda. K. H. Abdul Halim memilih bersikap kooperatif dengan penguasa militer Jepang. Sudah

barang tentu, sikap ini bukan tanpa alasan. Rupanya, K. H. Abdul Halim mempercayai Jepang sebagai negara yang memiliki sikap persahabatan dengan dunia Islam. Padahal itu semua hanyalah sebuah propaganda untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia.

Kebijakan politik Jepang terhadap golongan nasionalis sekuler memang berbeda dengan golongan nasionalis Islam. Terhadap golongan nasionalis Islam, Jepang memberikan kelonggaran karena memang mendapat perhatian istimewa. Sejak tahun 1942, Pemerintah Militer Jepang melarang semua organisasi politik yang berdiri pada zaman Hindia Belanda, kecuali *Majelis Islam A'la Indonesia* (MIAI) yang tetap diberi izin untuk tetap beraktivitas. Pada awal tahun 1943, MIAI dihidupkan kembali setelah Anggaran Dasarnya diubah dengan menambahkan kalimat "turut bekerja dengan sekuat tenaganya dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon". Meskipun demikian, pada akhir tahun 1943, MIAI pun dibubarkan oleh Pemerintah Militer Jepang karena dipandang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kepentingan politik Jepang.

Dengan dibekukannya MIAI, secara praktis hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang diakui secara hukum oleh Pemerintah Militer Jepang. Kedua organisasi

Islam tersebut kemudian melakukan kerja sama atau persetujuan kerja yang kemudian melahirkan *Majelis Syuro Muslim Indonesia* (Masyumi) pada bulan November 1943. Pengakuan hukum terhadap organisasi baru langsung diberikan oleh Pemerintah pada saat didirikan. Ketika berdiri, praktis tidak ada lagi organisasi massa Islam yang diakui oleh Jepang, termasuk Persjariakatan Oelama (PO) yang dibekukan aktivitasnya sejak tahun 1942. Meskipun demikian, K. H. Abdul Halim tidak lantas berhenti berjuang memperbaiki umat. Pendidikan dan pengajian terus menerus ia lakukan meskipun tanpa organisasi.

Pada pertengahan tahun 1943, Perdana Menteri Toiso mengumumkan bahwa Pemerintah Militer Jepang akan memberi kesempatan kepada orang Indonesia duduk di jajaran birokrasi. Selain itu, mereka pun akan membentuk semacam lembaga perwakilan yakni *Chuo Sangi In* dan *Chuo Sangi Kai* yang dibentuk tanggal 5 September 1943 berdasarkan keputusan *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Militer) yang dimuat dalam *Osamu Seirei* No. 36 Tahun 1943. Berdasarkan peraturan itu, tugas utama *Chuo Sangi In* adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Militer. *Chuo Sangi In* beranggotakan 43 orang yang diangkat oleh

*Saiko Shikikan* dan anggota dari kalangan Islam lebih banyak dibandingkan dengan badan sejenis pada masa Penjajahan Belanda. Golongan Nasionalis Islam diwakili oleh enam orang ulama yang menurut Harry J. Benda sebagai ulama terkemuka pada waktu itu. Salah seorang ulama tersebut adalah K. H. Abdul Halim yang pada waktu berkedudukan sebagai pendiri sekaligus ketua Perikatan Oemat Islam (POI) (Gunseikanbu, 1986: 430; Poesponegoro & Notosusanto, 1990<sup>6</sup>: 14, 26).

Ketika masih berstatus sebagai anggota *Cuo Sangi In*, K. H. Abdul Halim mengaktifkan kembali Persyarikatan Oelama (PO). Untuk mendapat pengakuan dari Pemerintah Militer Jepang, ia membicarakannya dengan beberapa orang ulama terkemuka di antaranya K. H. Ahmad Sanusi dari Sukabumi dan para ulama dari PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada dasarnya, rencana K. H. Abdul Halim mendapat respons positif dari mereka dan mendorong agar rencana itu dapat segera diwujudkan. Setelah semua persiapan dipandang rampung, ia bersama M. Asyikin Hidayat dan K. H. Ahmad Ambari mengajukan permohonan pengakuan secara hukum terhadap Persyarikatan Oelama kepada Pemerintah Militer Jepang melalui perantaraan Residen Cirebon. Pada 1 Februari 1944, *Gunseikan* mengabulkan permohonan K. H. Abdul Halim sehingga sejak saat itu, Persyarikatan Oelama diakui secara hukum dengan nama

baru, yakni Perikatan Oemat Islam (POI) dengan K. H. Abdul Halim sebagai ketuanya. Pengakuan tersebut diberikan setelah POI menerima tujuan-tujuan Perse-makmuran Asia Timur Raya dalam anggaran dasarnya (*Asia Raya*, 4 Februari 1944). Pada tanggal 25 Mei 1944, POI diterima sebagai bagian dari Masyumi dan Siddiq Zainuddin duduk dalam kepengurusan Masyumi me-wakili POI (*Asia Raya*, 2 Juni 1944; Benda, 1980: 303).

Dengan sikap kooperatif itu, Pemerintah Militer Jepang tidak mengambil tindakan yang merugikan perjuangan umat Islam. Malah sebaliknya, K. H. Abdul Halim dapat menyuarakan kepentingan umat Islam karena dirinya diangkat menjadi anggota *Chuo Sangi In* (Badan Pertimbangan Pusat) maupun di Masyumi. Pengaktifan kembali POI didorong oleh sikap politik K. H. Abdul Halim yang kooperatif dengan Jepang. Sikap ini memang berbeda ketika Pemerintah Hindia Belanda masih men-guasai Indonesia. Sikap bersahabatnya itu ia perlihatkan bukan sebagai perwujudan bahwa ia sebagai pion politik atau boneka Jepang, tetapi untuk mencegah agar umat tidak memiliki tabiat iri hati. Terkait dengan hal tersebut, K. H. Abdul Halim (1944<sup>a</sup>: 12) menulis di *Soeara Moeslimin Indonesia* sebagai berikut.

Maka kita para putera Indonesia yang tengah ter-pimpin oleh Balatentara Dai Nippon untuk menda-pat kebahagiaan bersama, marilah kita kerjakan se-

cara ikhlas, tulus hati, jangan kita mempunyai tabi'at iri hati, umpamanya: di antara kita ada terdapat di-hampiri oleh saudara tua kita bangsa Nippon, lalu lain-lain iri hati.

Memang sepertinya, kata-kata iri hati ditujukan kepada kawan-kawan ulama-nya yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Namun demikian, secara tegas dalam kalimat itu sendiri mengandung makna bahwa perpecahan tidak akan membawa kebahagian bersama. Sikap iri hati merupakan tabiat manusia yang akan menjerumuskannya ke jurang pertentangan yang tiada henti. Pada kesempatan lain, K. H. Abdul Halim menulis pula yang isinya berupa anjuran untuk membantu Jepang agar segera mendapat kemenangan.

Seluruh tenaga ulama dan umat yang bersatu padu ini dapat kita sumbangkan kepada Balatentara Dai Nippon, sehingga dapat membajakan benteng perjuangan yang maha hebat, guna menyelesaikan penyerangan ini hingga mencapai kemenangan di pihak kita (Halim, 1944: 4).

Sudah barang tentu, kesediaan K. H. Abdul Halim mau bekerja sama dengan Jepang didasarkan atas beberapa pertimbangan. Sebagai seorang ulama dan Ketua Persyarikatan Oelama, mengakibatkan dirinya merasa kesulitan mengambil sikap terhadap Pemerintah Militer Jepang. Di satu sisi, ulama merupakan seorang tokoh masyarakat yang segala tindak tanduknya cenderung

akan diikuti oleh masyarakat. Penentangan secara terang-terangan akan juga diikuti oleh masyarakat dan ini akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri mengingat kekuatan militer Jepang yang begitu superior (Halim, 1944<sup>b</sup>: 3). Di sisi lain, bekerja sama dengan Pemerintah Militer Jepang akan mengundang tuduhan bahwa dirinya bertindak sebagai boneka politik Jepang. Namun demikian, dengan keyakinannya pada prinsip *Al-Salam*, K. H. Abdul Halim mengatur strategi perjuangannya dengan mengambil sikap kooperatif dengan Pemerintah Militer Jepang. *Al Salam* itu sendiri merupakan salah satu landasan perjuangannya yang menganjurkan untuk membimbing manusia mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan memfungsikan ulama sebagai panutan masyarakat. Dengan sikap yang kooperatif itu, K. H. Abdul Halim mengharapkan agar Pemerintah Militer Jepang mau mendengarkan suara ulama sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan rakyat (Jalaludin, 1990: 108).

Sikap kooperatif K. H. Abdul Halim terhadap Pemerintah Militer Jepang tidak terlepas dari keberhasilan Jepang berperan sebagai negara yang secara sungguh-sungguh akan membantu rakyat Indonesia melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan Belanda. Padahal se-sungguhnya, sikap bersahabat Jepang terhadap umat Islam Indonesia merupakan suatu propaganda politik be-

laka agar rencana ekspansinya ke Indonesia mendapat “sambutan hangat dari saudara mudanya”.

Kita dapat melihat betapa seirusnya Jepang menggarap propaganda tersebut yang dilakukannya setidak-tidaknya sejak tahun 1920. Di antara sekian banyak kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Jepang adalah membangun Mesjid Kobe pada tahun 1935 dan menyelenggarakan Pameran Budaya Islam dari tanggal 5 – 29 November 1939 yang dihadiri oleh utusan dari Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) (Benda, 1980: 133-134.). Propaganda terhadap umat Islam Indonesia dapat pula dilihat dari *Sabda Tenno Heika* tentang pernyataan perang terhadap Amerika dan Inggris yang diawali dengan kalimat “Kami, TENNO dari Kerajaan Dai Nippon, jang dengan koernia **Allah ta’Ala**, ada toeroenan dari TENNO JANG PERTAMA, ... bahwa Kami telah mengoemoemkan perang kepada Amerika dan Inggris” (*Pandji Poestaka*, Nomor Istimewa (No. 34/35), 8 Desember 1943: 1169). Pernyataan dengan menggunakan kalimat *koernia Allah ta’Ala* merupakan indikasi kuat agar umat Islam Indonesia yakin terhadap kebijakan Islam yang dikembangkan oleh Jepang. Selain itu, untuk menarik simpati umat Islam, Pemerintah Pendudukan Jepang memuat pengumuman dalam surat kabar yang berisi tentang bujukan agar masyarakat memberikan sumbangan bagi fakir miskin, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam yang

dimuat dalam surat kabar *Tjahaja* edisi Saptoe 6 Gogatu 2604.

Tingkatkan kebaikan toean, njonja, saoedagar, hartawan!  
Apa joega kejakinan toean, tentoe toean ingin menaiki tingkat kebaikan! Istimewa bagi seorang moeslim, tentoelah ia akan hidoepl di dalam djalan kebaikan.

Tetapi, toean! Djangan toean harapkan kebaikan itoe, selama toean beloem tahoe apa tangga kebaikan!

Dalam Qoeran ada diseboetkan begini: "lan tanaaloel birra hatan toenfigoeoena mimman toehil boen" jang artinja: tidak bisa seseorang meningkatkan kebaikan, sebeloem ia dapat mendermakan apa jang disajangnya!

Nah! Inilah tangga kebaikan!

Toean hendak ikoet mendermakan pakaian toean kepada Djawa Hoo Koo Kai, jang akan dibagikan kepada fakir miskin? Djika ikoet, naikilah tangga kebaikan ialah dengan mendermakan pakaian toean jang toean sajangi, djangan jang ..... terboeang!

Dengan propagandanya itu, K. H. Abdul Halim menilai sikap Jepang tidak memusuhi umat Islam. Apalagi, sejak mendarat di Indonesia pada 8 Maret 1942, Pemerintah Militer Jepang mendirikan Kantor Departemen Agama (*Shumuba*) dan sejak tahun 1944 membuka cabangnya (*Shumuka*) di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan itu, K. H. Abdul Halim memandang bahwa usaha Jepang itu tidak ditujukan kepada ulama, melainkan ditujukan untuk kepentingan Al-Islam (Halim, 1944: 3).

Apa yang dilakukan oleh K. H. Abdul Halim dengan sikap kooperatifnya itu tidak berarti ia berposisi sebagai pendukung politik Pemerintah Militer Jepang. Sikap kooperatifnya itu hanya ditujukan sebagai suatu bentuk strategi perjuangannya untuk menyelamatkan umat dari kekejaman penjajahan Jepang. Dan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah dengan keberhasilan Jepang meyakinkan bangsa Indonesia melalui propagandanya, agak sulit mencari tokoh-tokoh yang tidak ikut membantu Jepang. Kondisi tersebut secara terbuka dikemukakan oleh Mohammad Hatta yang menggambarkan sikap dan posisi politik para pemimpin Indonesia pada masa pendudukan Militer Jepang (Jalaludin, 1990: 133; Yasni, 1983: 134-135). Bahkan Mohammad Hatta pun bersedia bekerja sama dengan Jepang karena yakin akan ketulusan Jepang dalam janjinya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia atau paling tidak suatu pemerintahan sendiri, seperti yang ditegaskan Jepang dalam propagandanya sebelum menyerbu Hindia Belanda (Poesponegor & Notosusanto, 1990<sup>6</sup>: 15).

Pada saat perilaku Jepang sudah mulai dirasakan sebagai negara penjajah, sikap politik K. H. Abdul Halim pun mulai memperlihatkan perubahan meskipun tidak secara ekstrem. Ia tetap menunjukkan sikap yang kooperatif, tidak melakukan perlawanan secara fisik karena seperti yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa rakyat

Indonesia tidak mungkin melakukan perlawanan terbuka mengingat kekuatan militer Jepang yang sangat kuat (Adams, 1966: 267). Perubahan sikap itu dapat dilihat dari sikap K. H. Abdul Halim yang sudah tidak menganjurkan rakyat untuk membantu Jepang, sebagaimana yang ia lakukan pada awal kedatangan Jepang di Indonesia.

Selain itu, K. H. Abdul Halim menyarankan kepada Pemerintah Militer Jepang untuk mencetak Al Quran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saran ini dikemukakan oleh dirinya mengingat pada masa itu untuk mendapatkan kertas sangat sulit, kecuali mendapat izin dari pemerintah. Ketika dirinya dibawa ke Surabaya dan ditawarkan sesuatu, mungkin jabatan politik, K. H. Abdul Halim menolaknya dan terus menerus mendesak pemerintah agar segera mencetak Al Quran (Akim, 1964: 21-22). Anjuran ini dilakukannya agar rakyat dapat mengkaji lebih mendalam Al Quran yang sarat dengan nilai-nilai perjuangan. Dengan demikian, patutlah diduga bahwa anjuran tersebut sebagai upaya K. H. Abdul Halim untuk menumbuhkan sikap perlawanan yang dimulai dengan menumbuhkan keyakinan terhadap kebenaran jihad yang terkandung dalam Al Quran.

Tindakan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah menyelamatkan akidah umat dari kemosyrikan, sekaligus menyelamatkan umat dari kekejaman penjaja-

han Jepang. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Jepang menguasai Indonesia, mereka segera mengeluarkan kebijakan menjepangkan Indonesia. Salah satu kebijakan itu adalah adanya kewajiban untuk melaksanakan *Seikeirei* yakni membungkukkan badan (seperti ruku') ke arah Tokyo (Istana Kaisar Jepang) sebagai bentuk persembahan loyalitas kepada kaisar. Upacara ini oleh para ulama sebagai bentuk penyembahan kepada matahari mengingat kaisar dipandang sebagai keturunan Dewa Matahari. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau *Seikeirei* dianggap sebagai bentuk kemusyrikan, seperti yang dikatakan oleh K. H. Zaenal Mustafa kepada K. H. Rukhiyat di Tasikmalaya tahun 1943 (Rukhiyat dalam Lubis, 2006<sup>b</sup>: 123).

Pandangan bahwa *Seikeirei* itu perbuatan musyrik diperlihatkan juga oleh K. H. Abdul Halim. Sehubungan dengan itu, untuk menyelamatkan aqidah umat dari kemurtadan, K. H. Abdul Halim memberlakukan **Intisab** sebagai pengganti *Seikeirei* (Wawancara dengan: K. H. Cholid Fadlulloh dan S. Wanta, 7 April 2008). Intisab itu sendiri dilakukan bersamaan dengan upacara *Seikeirei*, tetapi dengan mengubah niat dan ucapannya. Secara fisik, dirinya beserta pengurus dan anggota Persyarikatan Oelama serta para siswanya seakan-akan melakukan *Seikeirei*, padahal jiwanya melakukan Intisab. Apakah

Intisab itu? Dan bagaimana Intisab itu menjadi pengganti upacara *Seikeirei*?

Intisab merupakan ajaran tauhid yang terdiri atas empat bagian. **Pertama**, pembacaan Basmalah dan Syahadat sebagai pokok landasan tauhid. **Kedua**, landasan beramal yang memuat empat buah kompenen yakni *Allahu Ghoyatuna* (Allah tujuan pengabdian kami), *Wal-Ikhlasu mabda'una* (dasar pengabdian kami adalah ikhlas), *Wal-Ishlahu sabiluna* (cara mengabdi kami adalah ishlah), dan *Wal-Mahabbatu syi'aruna* (cinta kasih merupakan lambang pengabdian kami). **Ketiga**, janji atau sumpah yang dirangkaikan dalam kalimat “Kami berjanji/bersumpah kepada Allah SWT untuk melaksanakan kebenaran, keikhlasan, keyakinan kepada Allah SWT dan mendapat keridhoan Allah dalam bera-mal di kalangan hamba-hamba Allah dengan bertawakal kepada-Nya”. **Keempat**, ucapan “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang. Dengan nama Allah, tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali pada Allah Yang Maha Agung. Allah Maha Besar (Fadlul-loh, 1994: 15-16; Jalaludin, 1990: 110-111; Persatuan Umat Islam, 1997: 9-24). Menurut Jalaludin (1990: 111), meskipun Intisab ini disahkan menjadi doktrin PO pada masa pendudukan Militer Jepang, tetapi materi pokoknya sudah ada jauh sebelum Jepang menguasai Indonesia. Materi pokok dari Intisab itu sendiri diambil

dari buku *Al Washiyyat al Zahabiyyat* karangan Hasan Al Bana yang merupakan salah satu buku wajib di Santi As-romo.

Intisab inilah yang selalu dibacakan para siswa setiap sebelum memulai kegiatan belajar mengajarnya. Demikian juga kalau ada kegiatan di Perikatan Oemat Islam (POI), selalu didahului oleh pembacaan Intisab sehingga terhindar dari perbuatan musyrik. Pemerintah Militer Jepang tidak melakukan tindakan represif terhadap K. H. Abdul Halim karena intisab itu dilakukan dengan gaya *Seikeirei* (Wawancara dengan Muh. Mukri tanggal 29 Maret 2008).

Pada pertengahan tahun 1944, Angkatan Perang Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur yang ditandai dengan penguasaan Pulau Saipan oleh Pasukan Amerika Serikat. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) "diperkenan merdeka kelak di kemudian hari (*Pandji Poestaka*, 15 September 1944: 561). Seiring dengan semakin membayangnya kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pada 1 Maret 1945 *Saiko Shikikan* Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan ini bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal

penting yang berhubungan dengan rencana pembentukan negara Indonesia merdeka. Badan ini beranggotakan seorang ketua (*kaico*), dua orang ketua muda (*fuku kaico*), dan 60 orang anggota (*giin*). Keanggotaan badan ini sebagian besar diambil anggota *Cuo Sangi In* yang ditambahkan dengan empat orang keturunan Arab dan peranakan Belanda dan tujuh orang anggota Jepang tanpa hak suara. Badan ini diketuai oleh R. T. Radjiman Wediodiningrat, sedangkan Soekarno hanya menjadi anggota biasa (*Asia Raja*, 5 Juni 1945; *Kan Po*, No. 62, 10 Maret 1945).

Pada 28 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) diresmikan oleh Pemerintah Militer Jepang bertempat di Gedung *Cuo Sangi In* (sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri RI). Peresmian itu dilanjutkan dengan pelantikan ketua dan para anggota BPUPK yang diiringi dengan pengibaran bendera Merah Putih dan *Hinomaru*. Sebagai anggota *Cuo Sangi In*, K. H. Abdul Halim pun kemudian diangkat sebagai anggota *Docuritsu Junbi Cosakai*. Dalam setiap persidangan, K. H. Abdul Halim menempati kursi nomor 19, di sebelah kanan Ketua BPUPK dan tepat di belakang Moh. Hatta (Bahar (ed.), 1995: xxvii).

Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945, K. H. Abdul Halim ditetapkan sebagai anggota Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso. Panitia ini

bertugas mempelajari (*bunkakai*) hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembelaan negara (Bahar (ed.), 1995: 202-204). Sebelum secara mendalam mempelajari masalah pembelaan negara, K. H. Abdul Halim mengikuti dulu Rapat Besar Panitia Hukum Dasar pada tanggal 11 Juli 1945. Rapat dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan agenda membicarakan Rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam rapat tersebut, K. H. Abdul Halim men-gusulkan kepada pimpinan rapat agar bentuk negara Indonesia merdeka berupa kesatuan atau uni. Sementara itu, negara Indonesia merdeka harus dipimpin oleh seorang presiden (Bahar (ed.), 1995: 212).

Setelah rapat selesai, K. H. Abdul Halim bersama-sama dengan anggota lainnya mulai mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembelaan negara. Setelah beberapa hari bekerja, Panitia Pembelaan Negara berhasil merumuskan sebuah rancangan pembelaan yang disahkan oleh BPUPK pada 16 Juli 1945. Rancangan Panitia Pembelaan Negara selengkapnya berbunyi sebagai berikut yang dikutip dari Saafroedin Bahar (ed.) (1995: 396-398).

### **PEMBELAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

1. Republik Indonesia dilahirkan di tengah-tengah pertem-puran seluruh bangsa-bangsa Asia Timur Raya melawan kenafsuhan Amerika, Inggris, dan Belanda, pertama kali ini ingin menyatakan peringatan kehormatan terhadap

rakyat Indonesia yang telah berjuang untuk melaksanakan Indonesia merdeka dan terutama pula terhadap Balatentara Dai Nippon serta ratusan ribu tenaga Indonesia yang telah berkorban jiwa di luar dan di dalam tanah air Indonesia di dalam Perang Asia Timur Raya.

2. Meneruskan pertempuran tadi sehingga kemenangan akhir tercapai, serta menjaga dan membela kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia dan agama adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Berkenaan dengan kewajiban tersebut, maka bangsa Indonesia yakinlah perlu adanya pembentukan TENTARA INDONESIA yang harus dibentuk dengan jalan mengadakan kewajiban milisi. Di samping itu perlu pula dibentuk Barisan Rakyat. Cara melaksanakan milisi, begitu pun aturan pembelaan tanah air oleh Barisan Rakyat disusun tersendiri.
3. Untuk menyempurnakan lagi tenaga perang seharusnya-lah diadakan mobilisasi umum.
4. Kepentingan pembelaan negara meminta dalam susunan pusat pemerintahan pembentukan Kementerian Pembelaan yang mengurus Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai langkah pertama dari kementerian ini adalah mempersatukan segenap prajurit bangsa Indonesia sebagai tentara Indonesia di bawah pimpinan Kepala Negara Republik Indonesia. Prajurit-prajurit bangsa Indonesia yang sekarang dan yang akan termasuk dalam Balatentara Dai Nippon menjalankan tugas kewajibannya menurut perjanjian antara Dai Nippon Teikoku dan Pemerintah Republik Indonesia.
5. Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara yang kuat dan sentosa, maka Negara Indonesia menaruh penuh kepercayaan atas kesanggupan segenap rakyat Indonesia untuk melakukan: Jihad di jalan Allah terutama

atas semangat dan tenaga pemuda Indonesia yang dengan keteguhan tekad sanggup mengorbankan jiwa raga. Kecuali daripada itu bangsa Indonesia mengharapkan keeratan bekerja bersama dengan Balatentara Dai Nippon. Bentuk dan isi perhubungan tersebut akan dilukiskan dalam perjanjian antara Dai Nippon Teikoku dan Republik Indonesia.

6. Tentara musuh telah menduduki beberapa daerah Republik Indonesia. Tindakan ini terang-terangan merupakan pelanggaran atas kedaulatan Negara Indonesia. Perkosaan ini sewajibnya dibalas dengan pengumuman perang kepada Amerika, Inggris, Belanda, dan sekutunya.
7. Terhadap tindakan-tindakan mata-mata musuh dan pembantu-pembantunya, maka perlulah diadakan badan-badan istimewa, terdiri dari pecinta-pecinta nusa, bangsa, dan agama, yang telah diuji budi pekerti, kejujuran, kecakapan, dan rasa keadilannya. Badan tersebut ditempatkan di bawah Kepala Negara dan cara susunan dan kedudukannya diatur tersendiri.
8. Peperangan totalitair ini mengharuskan bukan saja pembentukan tentara yang kuat, akan tetapi pula susunan seluruh masyarakat yang kukuh, syarat yang terpenting guna pengembangan seluruh lapisan masyarakat itu ialah terjaminnya ketenteraman sosial dari segala lapisan rakyat. Oleh kare itu, maka usaha-usaha pembentukan tentara sekutu dan serapi-rapinya harus disertai penyempurnaan usaha-usaha sosial yang menjamin ketenteraman sosial di segala lapangan dan dari segenap lapisan rakyat. Di samping itu, hendaknya dibangkitkan suatu Barisan Kesehatan untuk menjaga kesehatan rakyat dalam arti seluas-luasnya.

9. Persenjataan dan peralatan tentara hendaklah selekas mungkin dilengkапkan dengan jalan (a) mendapatkan dari Dai Nippon; dan (b) menyelenggarakan pembikinan dalam negeri sendiri.
10. Penyempurnaan tentara Indonesia mengharuskan di samping pembentukan tentara bersenjata, penggerahan dan pemeliharaan barisan pekerja yang sehat dan rasional guna menjamin perlengkapan perang, baik di depan maupun di belakang garis.
11. Agar supaya semangat pembelaan tanah air lebih kuat, hendaknya lah di kalangan wanita dibangkitkan rasa berkewajiban turut bertanggung jawab mempertahankan kemerdekaan.
12. Nasib para perajurit dalam arti luas beserta keluarganya haruslah mendapat penghargaan yang sepadan dengan jasa-jasanya.

Kedua belas poin rancangan pembelaan tersebut bukanlah sepenuhnya hasil pemikiran K. H. Abdul Halim, melainkan hasil kesepakatan 23 orang anggota panitia. Meskipun demikian, sangat terlihat sekali bahwa K. H. Abdul Halim mampu memberikan warna dalam rumusan tersebut, terutama dalam hal hubungan agama dengan negara. Intinya adalah kedaulatan negara harus diperlakukan meskipun harus dengan mengorbankan jiwa dan raganya.

Pada 7 Agustus 1945, BPUPK dianggap telah selesai masa tugasnya seiring dengan pembentukan sebuah badan yang bernama *Dokuritsu Junbi Iinkai* (Panitia Per-

siapan Kemerdekaan Indonesia-PPKI). Peresmian badan tersebut dilakukan oleh Jenderal Besar Terauchi sekaligus melantik para anggotanya sebanyak 21 orang. Dalam keputusannya itu, Jenderal Besar Terauchi menyatakan bahwa para anggota PPKI diperkenankan untuk melakukan kegiatan menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia. Namun demikian, Panglima Tentara Umum Selatan itu pun mewajibkan PPKI untuk memperhatikan dua hal, yakni:

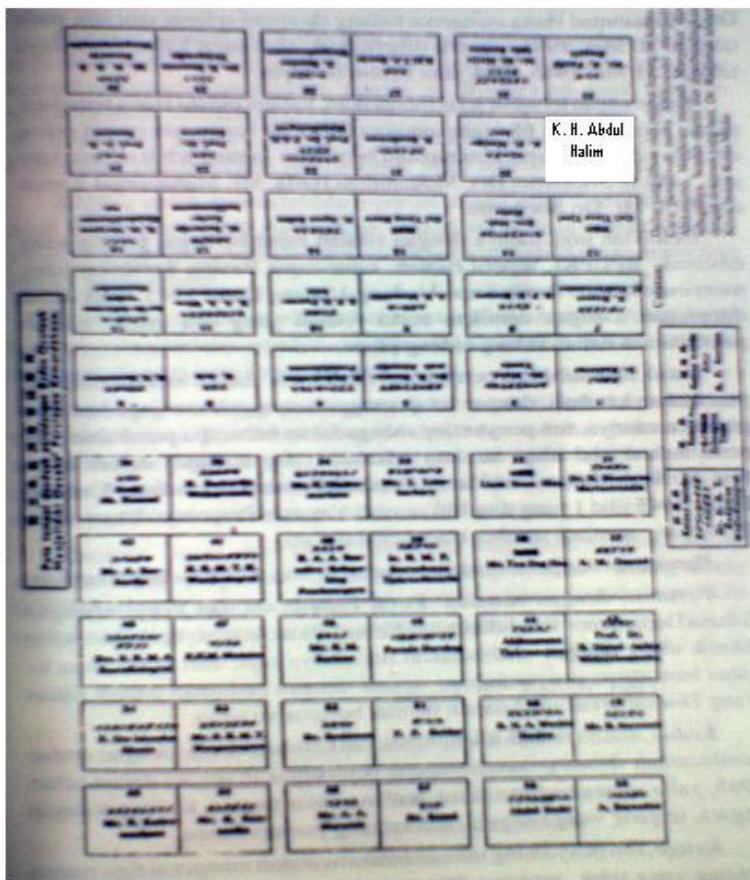
1. Bangsa Indonesia agar sekuat tenaga mengerahkan potensinya untuk kepentingan perang. Kemerdekaan Indonesia sangat bergantung pada cepat lambatnya perang diselesaikan dengan kemenangan di pihak "kita".
2. Negara Indonesia merupakan anggota dari Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, sehingga cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita Pemerintah Jepang dengan semangat *Hakko Iciu* (*Kan Po*, No, 72, 10 Agustus 1945: 12).

Pernyataan Terauchi di atas dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa Indonesia dengan mengangkat enam orang anggota baru tanpa seizin Pemerintah Militer Jepang. Keenam orang itu adalah Ki Hajar Dewantara, R. A. A. Wiranatakusumah, Mr. Kasman Singodimedjo, Sa-juti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Soebardjo.

Hal tersebut menandakan bahwa PPKI tidak secara mutlak dikendalikan oleh Pemerintah Militer Jepang (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990<sup>6</sup>: 79).

Seiring dengan pembentukan PPKI, K. H. Abdul Halim kembali ke kampung halamannya di Majalengka, karena dalam badan itu ia tidak menjadi anggota. Di sini, K. H. Abdul Halim kembali melakukan aktivitas keagamaannya dengan membina secara lebih intensif POI dan juga pondok pesantren Santi Asromo-nya. Selama berjuang di *Cuo Sangi In* dan *Docuritsu Junbi Cosakai*, K. H. Abdul Halim menyerahkan tampuk pimpinan Perikatan Oemat Islam kepada K. H. Ahmad Ambari (Akim, 1964: 23; Hernawan, 2007: 37; Jalaludi, 1990: 380). Penyerahan ini dimaksudkan kegiatan POI tidak terhambat dan sebagai penasihat POI, ia akan memiliki waktu yang cukup leluasa untuk memperjuangkan umat di tingkat “nasional”.

Foto 19: Peta Tempat Duduk dalam Persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan



Sumber: Diolah dari Bahar, Saafroedin (ed.). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Setneg RI.

## **2. Proklamasi Kemerdekaan**

Pada 16 Agustus 1945, situasi politik di Jakarta semakin memanas karena adanya perbedaan pendapat antara kelompok Soekarno-Hatta dan kelompok pemuda menyangkut teknis pelaksanaan pengumuman proklamasi. Soekarno-Hatta menginginkan pengumuman proklamasi dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan sidang PPKI. Sementara itu, kelompok pemuda menginginkan pengumuman proklamasi harus segera dilakukan tanpa melibatkan PPKI, karena badan itu bentukan Jepang. Seandainya proklamasi itu dilakukan di depan PPKI, mereka khawatir kemerdekaan Indonesia akan dicap sebagai pemberian Pemerintah Militer Jepang. Alasan lain yang dikemukakan para pemuda adalah sejak tanggal 14 Agustus 1945 Balatentara Jepang telah menyerah kepada Pasukan Sekutu sehingga tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi dan dengan sendirinya kewenangan Jepang untuk memerdekakan Indonesia pun sudah tidak dimiliki lagi. Perbedaan pendapat tersebut semakin tajam sehingga terjadilah peristiwa Rengasdengklok yaitu tindakan perwira Peta yang mengamankan Soekarno-Hatta dari situasi politik yang tidak menentu ke Rengasdengklok (Wirasoeminta, 1995).

Setelah mengetahui keberadaan Soekarno-Hatta, pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Soebardjo berangkat ke Rengas-

dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan memberikan jaminan kepada para perwira Peta bahwa keseleaman Soekarno-Hatta selama berada di Jakarta akan terjamin. Tindakan Ahmad Soebardjo itu didorong oleh situasi yang sangat mendorong untuk segera diambil keputusan politik menyangkut masalah kemerdekaan Indonesia. Mengingat kapasitas Soekarno-Hatta sebagai pemimpin nasional utama, keputusan politik itu hanya dapat dilakukan oleh mereka berdua.

Setibanya di Jakarta, Soekarno-Hatta segera menghubungi *Somubicho* Mayor Jenderal Nishimura untuk mengetahui sikap Pemerintah Militer Jepang berkenaan dengan rencana kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Mayor Jenderal Nishimura diketahui bahwa Pemerintah Militer Jepang mulai tanggal 16 Agustus 1945 pukul 12.00 waktu Jawa, sudah menjadi alat Sekutu dan diperintahkan untuk tidak mengubah keadaan politik apapun juga. Dengan perkataan lain, Pemerintah Militer Jepang tidak mungkin melanjutkan rencana pemberian kemerdekaan kepada Indonesia karena kewenangan mereka untuk telah dicabut oleh Sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Sikap Pemerintah Militer Jepang tersebut melahirkan keyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan tanpa bantuan Jepang. Hal tersebut mendorong bagi Soekarno-Hatta untuk segera menyelengga-

rakan rapat persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan di rumah Marsekal Muda Maeda seorang pembesar Angkatan Laut Jepang yang simpati terhadap perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Rapat yang dilaksanakan sampai menjelang subuh tanggal 17 Agustus 1945, berhasil mengambil keputusan untuk membentuk panitia kecil terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Mohamad Hatta, dan Ahmad Soebardjo untuk merumuskan teks proklamasi. Proses perumusan teks proklamasi ini disaksikan oleh Soekarni, B. M. Diah, Mbah Diro, Sajuti Melik, dan beberapa orang Jepang yang berada di luar ruangan. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan disetujui oleh peserta rapat, pada pagi harinya teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di hadapan rakyat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di kediaman Ir. Soekarno Jln. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sebelum membacakan proklamasi kemerdekaan, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan yang singkat.

Saudara-saudara sekalian! Saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluhan-puluhan tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk

mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam jaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam jaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratannya itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-Saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi kami:

#### PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia! Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05  
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

Demikianlah saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara kita! Negara Merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu (Poesponegoro dan Noto-susanto, 1990<sup>6</sup>: 93-94).

Sementara itu, kabar tentang akan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diketahui oleh Penghulu Lubis yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Bagian Penyiaran Kantor Berita *Domei* Jakarta dari seorang kurir utusan Soekarni. Dengan menggunakan stempel perwira Jepang, Penghulu Lubis segera meneruskannya ke Bagian Morse Kantor Berita *Domei* Jakarta disertai catatan singkat "untuk diisiarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia". Berita yang diterima oleh bagian morse itu dapat ditangkap oleh Bagian Morse Kantor Pos, Telepon, dan Telegram (PTT) Bandung dan Sutoko sebagai Wakil Kepala Bagian Telegram segera memerintahkan untuk mengirimkannya ke seluruh kantor PTT di Indonesia (Suwardjo et al., 1984: 42).

Langkah awal untuk menyambut Kemerdekaan Indonesia adalah pembentukan pemerintahan daerah lengkap dengan organ pendukungnya. Pembentukan pemerintahan daerah didasarkan pada keputusan rapat

PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa untuk sementara waktu wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi delapan daerah propinsi dan tiap propinsi dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten dan kota otonom. Kepala pemerintahan daerah (gubernur, residen, bupati, dan walikota) akan dibantu oleh Komite Nasional Daerah setempat. Kedelapan propinsi itu adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Mengacu pada Ketetapan PPKI tersebut, maka pemerintahan Majalengka *Si* menjelma menjadi Kabupaten Majalengka dipimpin oleh R. A. Umar Said sebagai bupati dan berada di bawah Keresidenan Cirebon Propinsi Jawa Barat.

Pada sidang yang sama, Rancangan Pembelaan Negara yang telah dirumuskan oleh K. H. Abdul Halim dalam sidang BPUPK ditolak oleh PPKI. Penolakan tersebut didorong oleh suatu kenyataan bahwa rancangan itu mengandung politik perang sehingga tidak dapat diterima oleh anggota PPKI. Demikian juga lembaga-lembaga kemiliteran yang dibentuk Jepang akan segera dibubar kan karena tidak memiliki kepastian hukum internasional. Meskipun pemikiran K. H. Abdul Halim dan kawan-kawannya ditolak PPKI, namun ada juga bagian-bagian dari rancangan itu yang diterima PPKI. Setidak-tidaknya, PPKI memandang perlu dibentuk alat pertahanan yang sebaik-baiknya guna mengamankan ke-

daulatan negara (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990<sup>6</sup>: 99).

Pada tanggal 19 Agustus 1945 (malam hari), Presiden Soekarno melakukan pembicaraan dengan Wapres Moh. Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Oto Iskandardinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A. G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuluddin. Inti pembicaraan itu adalah membahasa nama-nama calon yang akan diangkat menjadi anggota KNIP. Mereka menyepakati bahwa KNIP itu akan beranggotakan 60 orang dan disepakai pula bahwa tanggal 29 Agustus 1945, KNIP akan menggelar rapat pertama di Gedung Komidi (sekarang Gedung Kesenian), Pasar Baru, Jakarta.

Hasil pembicaraan di atas oleh Soekarno dibawa dalam sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang menerima pembentukan KNIP sebagai penjelamaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sesuai dengan rencana, Presiden Soekarno kemudian mengangkat K. H. Abdul Halim bersama dengan 60 orang anggota lainnya sebagai anggota KNIP. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat menyelenggarakan musyawarah di Jakarta. Tujuan musyawarah ini adalah untuk membulatkan tekad mempertahankan kemerdekaan se-

bagai bagian perjuangan panjang bangsa Indonesia. Melalui musyawarah itu, dihasilkan mosi rakyat Indonesia yang ditujukan kepada rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Intisari dari mosi rakyat Indonesia itu adalah:

1. menuntut pengakuan Kemerdekaan Indonesia dari seluruh dunia sebagai syarat bagi terwujudnya perdamaian internasional;
2. mewajibkan rakyat Indonesia untuk menyempurnakan kemerdekaan dengan cara melakukan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, segera membentuk pemerintahan daerah, dan menjalankan semua ketetapan yang terkandung di dalam mosi ini (Raliby, 1953: 495).

Selain membentuk KNIP, di daerah pun dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Kedudukannya dalam struktur pemerintahan daerah cukup kuat karena tujuan pembentukan KNID sejalan tujuan pembentukan KNIP. Oto Iskandardinata dan Mr. Kasman Singodimedjo menegaskan bahwa tujuan pembentukan Komite Nasional adalah

Untuk mendapatkan tenaga yang sebulat-bulatnya dari seluruh rakyat dan Komite Nasional harus memperlihatkan kebulatan cita-cita rakyat Indonesia yang merdeka dan mampu menjadi benteng yang kokoh untuk membangun negara (*Tjahaja*, 25 Agustus 1945).

Untuk Propinsi Jawa Barat, terlebih dahulu KNID dibentuk di tingkat keresidenan karena pemerintahan propinsi belum berperan optimal, keadaan politik yang belum stabil, dan keamanan yang masih penuh ketidakpastian (Sjafrudin et al., 1993: 395). Kedudukannya dalam struktur pemerintahan daerah semakin jelas dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1945 tanggal 21 Oktober 1945 yang menetapkan KNID sebagai Badan Perwakilan Rakyat dan bersama-sama dengan kepala daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tidak semua anggota KNID menjadi pelaksana pemerintahan sehari-hari, melainkan paling banyak lima orang yang dikukuhkan oleh KNID setempat. Mereka inilah yang disebut sebagai Badan Pekerja atau Badan Eksekutif KNID dan dibawah pimpinan kepala daerah setempat bertugas menjalankan roda pemerintahan sehari-hari (Raliby, 1953: 541).

Pada awal September 1945, KNID Keresidenan Cirebon berhasil dibentuk dengan Dr. Soedarsono sebagai ketuanya. Sebagai tokoh pejuang dan perintis kemerdekaan, K. H. Abdul Halim pun kemudian diangkat sebagai anggota KNID Keresidenan Cirebon. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KNID Keresidenan Cirebon memilih anggotanya untuk duduk di Badan Pekerja KNID. Tiga orang terpilih menjadi anggota Badan

Pekerja, yakni K. H. Abdul Halim, Ir. Setiadi, dan Sostrosuwirjo (Hidajat, 1967: 19). Ketiga orang anggota KNID beserta dengan Residen Murdjani, yang menjadi pemimpinnya, berkedudukan sebagai Badan Eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di wilayah Keresidenan Cirebon.

### **3. Mempertahankan NKRI**

Kemerdekaan Indonesia ternyata tidak diakui oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Bahkan sebaliknya mereka bermaksud menjadikan kembali wilayah Indonesia sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Di lain pihak, bangsa Indonesia sudah bulat hendak mempertahankan kemerdekaan sehingga melahirkan apa yang disebut dengan perang kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, perang kemerdekaan bukan hanya kisah sentral dalam sejarah bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia dalam mencari identitas diri. Selain itu, perang kemerdekaan bertujuan juga untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penyatuan dan kebangkitan nasional yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya. Di lain pihak, bagi Belanda, perang kemerdekaan merupakan ajang penghancuran sebuah negara merdeka yang dipimpin oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang.

Mereka berusaha untuk membangun kembali suatu rezim kolonial yang menurut keyakinan mereka telah berdiri sejak 350 tahun yang lalu (Ricklefs, 1991: 317-318).

Dengan demikian, Belanda menganggap wilayah Indonesia masih sebagai wilayah jajahannya dan merasa memiliki kekuatan hukum untuk memberangus setiap gerakan yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan Agresi Militer I ke wilayah Republik Indonesia. Agresi Militer I ini merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Linggajati yang telah ditandatangani pada 10 November 1946. Perjanjian baru ditandangani tanggal 17 Januari 1948 di atas Kapal Renville, sehingga kemudian perjanjian itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Renville. Tidak puas dengan itu, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II ke wilayah Republik Indonesia. Meskipun Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta berhasil ditangkap, namun eksistensi NKRI tetap terjaga mengingat sebelumnya telah dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Apa yang dilakukan oleh K. H. Abdul Halim dalam menghadapi serangan militer Belanda itu? Sebagai seorang ulama dan pemimpin, K. H. Abdul Halim tidak hanya ikut-ikut mengungsi mengamankan diri dan ke-

luarganya. Ia ikut bergerilya bersama para pejuang lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan basis di sekitar kaki Gunung Ciremai. Dalam aksi gerilyanya itu, K. H. Abdul Halim langsung memimpin anak buahnya menghadang pergerakan militer Belanda di wilayah Keresidenan Cirebon. Pada masa itulah, ia kemudian diangkat sebagai “Bupati-Masyarakat” Majalengka oleh Residen Hamdani. Sebagai bupati masyarakat, tugas pokoknya adalah menjadi penghubungan antara Bupati Mr. Makmun dengan seluruh lapisan masyarakat Majalengka. Atas jasanya, komunikasi antara rakyat Majalengka dan pemimpinnya menjadi tidak terputus sehingga rakyat Majalengka pun dapat mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Belanda (Akim, 1964: 40; Hidajat, 1967: 19; Lubis, 2007: 20).

Dengan peran seperti itu, militer Belanda kemudian menyerang Pasirayu, tempat tinggal K. H. Abdul Halim. Di tempat inilah, ia menyiapkan kader-kader bangsa yang memiliki jiwa nasionalis dan mandiri. Oleh Belanda, tempat itu dianggap sebagai pusat pertahanan TNI dan laskar PI untuk wilayah Majalengka. Serangan Belanda itu mengakibatkan sebagian bangunan di kompleks Santi Asromo hancur, yakni sebagian ruangan yang dijadikan madrasah dan sebagian bangunan asrama santri putra (Wawancara dengan Muhammad Mukri dan

Abdul Fatah, 30 Maret 2008). K. H. Abdul Halim kemudian ditangkap oleh Belanda dan diinterogasi Nefis, tetapi penangkapan itu tidak menjadikan dirinya mau bekerja sama dengan Belanda. Ia tetap berjuang demi tegaknya proklamasi kemerdekaan meskipun anak dean menantunya ditawan pihak Belanda. Ia kemudian menjadi penyuplai logistik TNI sehingga mereka tidak pernah kekurangan makanan meskipun dikepung oleh tentara Belanda (Hidajat, 1967: 19).

Demikian juga terhadap gerakan H. Sarip di Burujulwetan, Jatiwangi tahun 1947, sangat dimungkinkan K. H. Abdul Halim menentang gerakan tersebut. Gerakan H. Sarip merupakan suatu gerakan separatis yang bersifat millenaristis dan mencoba mengajak rakyat Majalengka untuk mendukung upaya Belanda mengembalikan kekuasaannya di daerahnya. Ia mengatakan bahwa pada tanggal 12 Rajab akan terjadi peperangan hebat dan semua orang yang salah akan mengalami kekalahan. Para leluhurnya akan membantu dalam peperangan itu sampai tegaknya pemerintahan baru yang dijalankan oleh orang Belanda. Orang Belanda yang membangun pemerintahan baru itu bukanlah orang Belanda yang dulu menjajah Indonesia, melainkan para leluhurnya yang menjelma menjadi orang Belanda. Oleh karena yang memerintah itu para leluhurnya, kemakmuran akan segera dirasakan oleh segenap rakyat Majalengka (Indonesia,

1945-1949). Dengan tidak adanya dukungan K. H. Abdul Halim, para ulama dan rakyat pun tidak mendukung gerakan H. Sarip sehingga gerakannya seumur jagung. K. H. Abdul Halim malah selalu menganjurkan rakyat untuk terus berjuang demi mempertahankan proklamasi ke-merdekaan dan keutuhan NKRI.

Itu perjuangan K. H. Abdul Halim di bidang militer dalam menghadapi agresor Belanda. Tidak hanya itu, K. H. Abdul Halim pun berjuang lewat pemikirannya. Belanda tidak hanya menyerang Indonesia secara militer, tetapi menyerang juga secara politis. Dibuatlah suatu strategi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Belanda merencanakan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara federal yang didalamnya berisi negara-negara bagian bentukan Belanda. Negara-negara bagian inilah yang nantinya dikendalikan oleh Belanda sehingga kekuasaan Belanda akan tetap eksis di Indonesia.

Demikianlah, di Jawa Barat pun Belanda membentuk sebuah negara yang bernama Negara Pasundan. Mengenai Negara Pasundan, proses pembentukan dan perkembangannya terjadi dalam dua versi yang berbeda. Negara Pasundan pertama didirikan oleh R. A. A. Muhammad Musa Suria Kartalegawa yang diawali dengan mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP) pada tanggal 18 November 1946 di Bandung. PRP kemudian menda-

pat dukungan dari para pembesar sipil dan militer Belanda dan berusaha untuk mencari simpati rakyat Jawa Barat dengan berbagai cara, seperti memunculkan isu kesundaan, membagi-bagikan uang, makanan, dan pakaian, memaksakan keanggotaan kepada rakyat Jawa Barat dengan menggunakan kekuasaan Belanda, dan memperlihatkan kekuatannya dengan melakukan tindak kekerasan dan penyerobotan. Merasa PRP telah kuat, pada tanggal 4 Mei 1947, Kartalegawa memproklamirkan Negara Pasundan sekaligus mengangkat dirinya sebagai presiden dan jabatan perdana menteri diserahkan kepada Mr. Katamso (Sewaka, 1955: 91).

Eksistensi Negara Pasundan versi Kartalegawa tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Negara ini tidak mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Jawa Barat, bahkan keluarganya pun tidak mendukung tindakan politik Muhammad Musa Suria Kartalegawa tersebut. Keberadaannya semakin terpuruk ketika Belanda menarik dukungannya karena keberadaan Negara Pasundan tidak memberikan keuntungan politik signifikan terhadap kepentingan politik Belanda (Yong Mun Cheong dalam Zuhdi, 1995: 130).

Segara setelah Belanda menarik dukungannya kepada Kartalegawa, mereka memikirkan kembali untuk membentuk Negara Pasundan versi baru. Diawali dengan menyelenggarakan Konferensi Jawa Barat I dari

tanggal 13-18 Oktober 1947, proses pembentukan Negara Pasundan segera dimulai. Dua bulan kemudian, tanggal 16-20 Desember 1947, diselenggarakan Konferensi Jawa Barat II yang memutuskan akan segera dibentuk pemerintahan sementara di Jawa Barat, mengingat Gubernur Sewaka berada di daerah pengungsian, yakni di Tasikmalaya. Keberadaan pemerintah sementara dikukuhkan dalam Konferensi Jawa Barat III yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari-5 Maret 1948 yang memutuskan

1. Pemerintahan sementara Jawa Barat harus diartikan sebagai Negara Jawa Barat.
2. Penunjukkan R. A. A. Muharam Wiranatakusumah sebagai Wali Negara Jawa Barat.
3. Menetapkan Konferensi Jawa Barat III sebagai Parlemen Jawa Barat Sementara (Ekadjati, 1995: 15; Indonesia, 1953: 161).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, negara bentukan Recomba ini berubah nama menjadi Negara Pasundan. Sebagai sebuah negara, berbagai kelengkapan kenegaraan segera dibentuk, yakni parlemen dan kabinet. Parlemen Pasundan diketuai oleh R. T. Juwarsa, sedangkan Kabinet Pasundan dipimpin oleh R. Adil Puradiredja sebagai perdana menteri merangkap menteri dalam negeri. Sejak saat itu, di Jawa Barat berdirilah Ne-

gara Pasundan sebagai negara tandingan bagi Republik Indonesia.

Namun demikian, perkembangannya pun tidak sejalan dengan harapan Belanda ketika membentuk negara tersebut. Meskipun mampu bertahan sampai melebur ke dalam Republik Indonesia Serikat sejak 27 Desember 1949 sampai 8 Maret 1950, rakyat Jawa Barat tidak secara total mendukung keberadaan Negara Pasundan. Rakyat Jawa Barat memandang bahwa pembentukan Negara Pasundan telah keluar dari cita-cita kebangsaan mereka sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan eksistensi Republik Indonesia di Jawa Barat, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan militer Belanda (Sugardo, 1948: 14). Anggapan bahwa eksistensi Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah berakhir seiring dengan penangkapan Gubernur Sewaka tidak terbukti karena kepemimpinannya dilanjutkan oleh Oekar Bratakoesoe-mah.

Dalam situasi politik seperti inilah, K. H. Abdul Halim tampil ke depan untuk mengembalikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun keberadaan Negara Pasundan dalam periode 1949-1950 diakui oleh hukum, karena pada waktu itu Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, K. H. Abdul Halim tetap memandang eksistensinya telah

keluar dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejalan dengan pemikirannya yang diutarakan dalam sidang BPUPK yang menginginkan bentuk kesatuan untuk negara Indonesia merdeka, K. H. Abdul Halim berupaya untuk sesegera mungkin membubarkan Negara Pasundan dan kembali melebur ke Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan harapannya itu, K. H. Abdul Halim melakukan kontak komunikasi dengan rekan-rekan seperjuangannya di Bandung seperti Kyai Ahmad Hasan, H. Zamzam, Isa Anshari, Ardiwinangun, Achsi, dan lain-lain. Tidak hanya sekali K. H. Abdul Halim melakukan diskusi dengan mereka mengenai eksistensi RIS dan Negara Pasundan. Setelah sekian lama melakukan diskusi dan berkali menempuh perjalanan Majalengka-Bandung, pada akhirnya mereka sepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama Gerakan Muslimin Indonesia (GMI) di Bandung. GMI dibentuk dengan maksud memelopori gerakan menentang federalisme, mendukung unitarisme, dan menentang keberadaan Negara Pasundan, sebagai salah satu negara bagian RIS. Oleh rekan seperjuangannya, K. H. Abdul Halim kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum GMI dan berkewajiban melaksanakan persiapan untuk suatu gerakan membubarkan Negara Pasundan (Hidajat, 1967: 29).

Pada akhir tahun 1949 dan awal 1950, GMI menyelenggarakan Rapat Akbar Pembubaran Negara Pasundan di Bandung. Rapat akbar itu tidak hanya dihadiri oleh kaum muslimin yang tinggal di Bandung, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Barat. Rapat akbar itu berhasil merumuskan sebuah mosi atau pernyataan yang menolak federalisme dan menuntut pemerintah untuk segera menerapkan kembali unitarisme. Sebagai konsekuensi penolakan itu, GMI menolak keberadaan Negara Pasundan di Jawa Barat dan menginginkan agar sesegera mungkin membubarkan Negara Pasundan serta wilayahnya harus dilebur ke wilayah Republik Indonesia. K. H. Abdul Halim kemudian ditunjuk dalam rapat akbar itu sebagai ketua delegasi yang akan menyampaikan mosi tersebut kepada R. Sewaka sebagai Komisaris RIS untuk Negara Pasundan (Hidajat, 1967: 20).

Rapat akbar dan mosi dari GMI yang dimotori oleh K. H. Abdul Halim secara langsung atau tidak telah membuat gerakan unitarisme di Negara Pasundan semakin menguat. Berbagai kalangan masyarakat menuntut agar wilayahnya dikembalikan ke Republik Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 8 Maret 1950 ketika rakyat Jawa Barat berdemonstrasi secara besar-besaran di Bandung agar Negara Pasundan dibubarkan dan seluruh wilayahnya dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia. Perlu diingat bahwa ketika RIS berdiri, Republik Indone-

sia merupakan salah satu negara bagian dengan ibukotanya di Yogyakarta. Akibat tekanan dari berbagai lapisan masyarakat, pada akhir Maret 1950, Negara Pasundan pada akhirnya dibubarkan dan menyatakan diri melebur ke wilayah Republik Indonesia. Pembubaran Negara Pasundan diikuti dengan pembentukan kembali Propinsi Jawa Barat sebagai bagian dari RI dan Sewaka kemudian diberhentikan sebagai Komisaris RIS dan selanjutnya ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Barat (Sewaka, 1955: 192).

Sikap serupa ternyata ditunjukkan pula oleh rakyat Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST), sehingga pada tanggal 8 April 1950 diselenggarakan konferensi RIS-NIT-NST. Pada tanggal 12 Mei 1950, kedua negara bagian itu menyerahkan mandatnya kepada PM RIS, Moh. Hatta untuk mempersiapkan peleburannya ke wilayah RI. Pada akhirnya, tanggal 19 Mei 1950 tercapailah kesepakatan antara RIS dan RI untuk membentuk kembali negara kesatuan bernama Republik Indonesia. Tepat pada peringatan ke-5 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1950, UUD Sementara diberlakukan yang menandai berakhirnya RIS dan tegaknya kembali NKRI (Poesponegoro dan Noto-susanto, 1990<sup>6</sup>: 209-210).

Dengan berlakunya UUD Sementara, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri, tetapi den-

gan sistem pemerintah yang berbeda dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Periode ini kemudian dikenal juga sebagai masa demokrasi parlementer, karena sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem parlementer. Berdasarkan sistem ini, presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara dan masalah pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh kabinet dibawah pimpinan seorang perdana menteri.

Pada tahun 1955, diselenggarakan pemilihan umum untuk legislatif dan konstituante. Dalam pemilu itu, muncul sebagai pemenangnya empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Terkait dengan pemilu untuk anggota Dewan Konstituante, K. H. Abdul Halim terpilih menjadi anggota yang dewan itu yang tugas pokoknya menyusun undang-undang dasar yang akan mengganti UUD Sementara. Namun sayang, tugas-tugas kenegaraan yang diembannya itu tidak dapat dijalankan secara optimal seiring kesehatannya yang menurun. Sejak tahun 1956, K. H. Abdul Halim terkena penyakit gula (diabetes) yang mengharuskan dirinya mengurangi aktivitas politiknya. Meskipun demikian, sampai Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1959, K. H. Abdul Halim masih tercatat sebagai anggota Dewan Konstituante sebagai wakil Masyumi (Hidajat, 1967: 20).

Ketika negara dilanda gerakan separatisme, di Jawa Barat pun muncul gerakan yang berusaha untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Gerakan ini kemudian dikenal dengan DI/TII di bawah pimpinan R. M. Kartosuwiryo. Dalam perkembangannya, gerakan DII/TII tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga menyebar ke luar Jawa, seperti Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Terhadap gerakan DII/TII, K. H. Abdul Halim tidak pernah menyetujuinya, apalagi ambil bagian dalam gerakan separatisme itu. Bagi K. H. Abdul Halim, apa yang dilakukan oleh Kartosuwiryo merupakan kesalahan yang tidak dapat ditoleransi. Kekerasan, kezaliman, dan lain-lain bukanlah watak agama Islam. Sesuai dengan sifatnya, dia kemudian memilih untuk menghindar berkonfrontasi langsung dengan DII/TII. Sebaliknya, K. H. Abdul Halim selalu menyambut dan memberikan informasi tentang keberadaan DI/TII pada saat TNI mendatangi kampung halamannya (Wawancara dengan Abdul Fatah, yang tanggal 30 Maret 2008).

## **V. MENDIRIKAN PERSATUAN UMAT ISLAM (PUI)**

Perjuangan K. H. Abdul Halim dilandasi pada upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di kalangan umat muslimin. Perpecahan yang kerap terjadi di kalangan mereka justru akan merugikan kepentingan kaum muslimin. Persatuan dan kesatuan akan mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin dari keterpurukannya di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Namun demikian, cara mempersatukan umat yang ditempuh oleh K. H. Abdul Halim tidak dilakukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara *ishlah*. Strategi *ishlah* bukan hanya sebatas anjuran, namun se-

cara langsung dilakukan oleh K. H. Abdul Halim ketika mempersatukan dua organisasi pada tahun 1952 menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI). Bagi para kader PUI, kemampuan K. H. Abdul Halim mempersatukan dua organisasi Islam merupakan sebuah prestasi yang mengagumkan. Betapa tidak, karena tindakannya itu dilakukan ketika umat Islam menghadapi ancaman perpecahan, khususnya di dunia politik (Wawancara dengan Jaja Jahari, tanggal 14 April 2008).

Memang bukan hanya semata-mata keinginan K. H. Abdul Halim sebagai Ketua Umum Perikatan Ummat Islam, tetapi ada juga keinginan yang sama dari K. H. Ahmad Sanusi, Ketua Umum Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUUI). Kesamaan dalam pemikiran antara kedua ulama tersebut mendorong relatif lancarnya penyatuan (fusi) kedua organisasi Islam tersebut yang sama-sama telah berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Keduanya pun memiliki persahabatan yang cukup panjang, sejak mereka belajar di Mekkah dan bersama-sama berjuang pada masa pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan. Oleh karena itu, sebelum membahas proses mendirikan Persatuan Ummat Islam (PUI), ada baiknya sekilas melihat dulu sosok K. H. Ahmad Sanusi beserta perkembangan organisasi yang dibentuknya.

## **1. K. H. Ahmad Sanusi Pendiri PUUI**

K. H. Ahmad Sanusi dilahirkan pada tanggal 18 September 1889 di Desa Cantayan, Kecamatan Cikembar, Sukabumi sebagai anak ketiga pasangan K. H. Abdurrahim dan Ny. Epok. Sebagai orang yang memiliki tradisi pesantren sangat kuat, ia mendapatkan pendidikan keislamananya langsung dari kedua orang tuanya yang pada waktu itu sebagai pengasuh Pesantren Cantayan. Ketika usia mencapai 15 tahun, ia mulai belajar di beberapa pesantren selama enam tahun. Pada usia 21 tahun, ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibada haji sekaligus menuntut ilmu sampai tahun 1915.

Sekembalinya dari Mekkah, K. H. Ahmad Sanusi mulai beraktivitas menyebarkan syiar Islam di Pesantren Cantayan. Setelah tujuh tahun mengasuh para santri di pesantren milik orang tuanya, tepatnya tahun 1922, K. H. Ahmad Sanusi mendirikan pesantren di Kampung Genteng, Kecamatan Cibadak. Keberadaan pesantren itu sangat didukung oleh masyarakat setempat dan ketokohan K. H. Ahmad Sanusia begitu dihormati sehingga ia pun dikenal dengan julukan *Ajengan Genteng* (Iskandar dalam Sulasman, 2007: 4). Kharisma yang dimilikinya semakin menyebar sehingga sepak terjang K. H. Ahmad Sanusi mendapat perhatian dari Pemerintah Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda semakin memperketat pengawasannya kepada *Ajengan Genteng* seiring semakin menyebarunya fatwa-fatwa dia yang pada waktu itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa fatwanya yang melahirkan penentangan keras dari Pemerintah Hindia Belanda adalah masalah zakat, zakat fitrah, selamatan, dan kebiasaan mendo'akan bupati dalam Jumatan. Kedekatannya terhadap Sarekat Islam cabang Sukabumi mengakibatkan ia pernah ditangkap oleh Peemerintah Hindia Belanda karena dituduh menyebarluaskan kebencian. Akan tetapi, ia segera dibebaskan karena pemerintah kekurangan bukti (Sulasman, 2007: 6).

Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memisahkan K. H. Ahmad Sanusi dari lingkungan masyarakatnya. Kesempatan itu datang pada tahun 1927 ketika terjadi aksi pengrusakan jaringan kawat telepon yang menghubungkan Kota Sukabumi dengan Bogor dan Bandung. Pemerintah Hindia Belanda menuduh K. H. Ahmad Sanusi berada di balik aksi itu dan tanpa proses pengadilan, Pemerintah Hindia Belanda mengasingkan K. H. Ahmad Sanusi ke Batavia Centrum (Iskandar dalam Sulasman, 2007: 8).

Meskipun menjadi tahanan pemerintah kolonial, tetapi K. H. Ahmad Sanusi tetap berjuang menyebarluaskan fatwanya mengenai masalah keagamaan. Hal tersebut

dimungkinkan karena orang-orang yang menjenguknya, kadang-kadang menyampaikan masalah keagamaan kepada K. H. Ahmad Sanusi. Masalah-masalah itu menjadi bahan pemikirannya selama di tahanan dan jawa-bannya ia tuliskan untuk kemudian dipelajari dan disebarluaskan oleh rekan-rekan seperjuangannya.

Pada tahun 1931, ketika masih menjadi tahanan di Batavia Centrum, K. H. Ahmad Sanusi mendirikan organisasi yang diberi nama *Il-Ittihadijatul Islamijjah* (AII). Organisasi ini tidak bergerak di bidang politik, tetapi secara militan mengembangkan kegiatan di bidang sosial keagamaan dan juga dalam soal pergerakan nasional. Sebagai organisasi sosial, AII banyak mendirikan sekolah, yayasan yatim piatu, koperasi, dan baitul maal. Pada tahun 1932, K. H. Ahmad Sanusi dipindahkan ke Sukabumi dengan status sebagai tahanan kota. Meskipun demikian, perkemangan AII tidak lantas menjadi mandek, justru berkembang sehingga memiliki 24 cabang yang tersebar di daerah Batavia, Bogor, dan Priangan (Sulasman, 2007: 14). Dua tahun kemudian, K. H. Ahmad Sanusi mendirikan perguruan *Sjamsael Oeloem* di atas tanah seluas 1,5 hektare yang terletak di belakang rumah tahanannya di Jln. Dr. Van Vogel No. 100 Sukabumi (Jaya, 1995: 19). Pada tahun itu pula, ia berhasil mendirikan organiasasi pemudanya yang diberi nama Barisan Islam Indonesia (BII) di bawah kepemimpinan

K. H. Muhammad Basyuni (Sulasman, 2007: 14). Pada tahun 1939, melalui keputusan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, status sebagai tahanan kota bagi K. H. Ahmad Sanusi dicabut oleh pemerintah. Dengan demikian, ia memiliki kebebasan lagi untuk menyebarkan pemeikirannya tentang perbaikan umat menuju kebaikan hidup.

Ketika kekuasaan berpindah dari Belanda ke Jepang tahun 1942, K. H. Ahmad Sanusi memutuskan untuk bersikap kooperatif terhadap Jepang. Meskipun demikian, Jepang mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan semua organisasi, termasuk membekukan aktivitas AII. Ketika datang tawaran bekerja sama dengan Jepang, K. H. Ahmad Sanusi menggunakan kesempatan itu untuk meminta Jepang menghidupkan kembali AII. Ia berhasil meyakinkan penguasa militer Jepang bahwa AII berbeda dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sehingga pada tanggal 1 Februari 1944, AII dihidupkan kembali dengan nama Persatoean Oemat Islam Indonesia (POII) (Mawardi dalam Sulasman 2007: 17). Di bawah organisasi inilah, K. H. Ahmad Sanusi kemudian berjuang baik di bidang politik, sosial, maupun keagamaan sesuai dengan cita-citanya mencapai kebahagian hidup bagi ummatnya.

POII merupakan salah satu dari dua organisasi keislaman (di luar Muhammadiyah dan NU yang memen-

tuk wadah kerja sama di Masyumi) yang diizinkan oleh Jepang melakukan aktivitasnya. Organisasi lainnya adalah Perikatan Oelama (PO) pimpinan K. H. Abdul Halim di Majalengka. Proses ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi memang di antara kedua *ajengan* itu telah terjalin tali ukhuwah yang begitu kuat sejak mereka bertemu dan bersama-sama belajar di Mekkah dari tahun 1908-1911. Ikatan ukhuwah tersebut ditambah dengan kesamaan visi dan misi kedua organisasi itulah yang mendorong terjadinya fusi tahun 1952.

## **2. Proses Fusi antara POI dan POII**

Persatuan Ummat Islam terbentuk didahului oleh terjalannya persahabatan di antara pucuk pimpinan kedua organisasi tersebut. K. H. Abdul Halim bertemu dengan K. H. Ahmad Sanusi di Mekkah dan selama hampir tiga tahun kedua sahabat itu selalu bertukar pikiran mengenai berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh ummat muslimin di tanah airnya. Meskipun K. H. Abdul pulang duluan ke tanah airnya (tahun 1911), namun komunikasi keduanya tidak lantas menjadi terhenti. Bahkan persahabatan yang mereka jalin sejak di Mekkah semakin menguat sekembalinya K. H. Ahmad Sanusi dari Mekkah tahun 1915. Hasan Muarif Ambary (2006: 253)

menggambarkan keeratan persahabatan itu karena mereka “satu guru dan satu ilmu”.

Ketika tahun 1935, AII menggelar muktamar di Sukabumi, K. H. Ahmad Sanusi mengundang K. H. Abdul Halim untuk memberikan cermah. Di situlah, pembicaraan ke arah persatuan dan kesatuan ummat mulai bersemi secara kuat. Mereka kemudian sering melakukan pertemuan, baik dalam acara resmi maupun acara pribadi, dan selalu membicarakan kemungkinan untuk menyatukan organisasi perjuangan ummat Islam. Demikian juga ketika kedua ulama itu menjadi anggota BPUPK (1944-1945), masalah tersebut acapkali dibicarakan di waktu-waktu senggang.

Dalam kurun waktu 1945-1950, pembicaraan menyatukan organisasi mereka tidak hanya sebatas kemungkinan, tetapi sudah hampir dapat diwujudkan. Nama organisasi, rancangan kepengurusan, dan lain-lainnya sudah disepakati oleh K. H. Abdul Halim dan K. H. Ahmad Sanusi. Akan tetapi, sebelum fusi itu terwujud, K. H. Ahmad Sanusi dipanggil oleh Sang Khalik pada tahun 1950. Dengan meninggalnya K. H. Ahmad Sanusi, upaya mempersatukan PO dan POII menjadi terhambat. Meskipun demikian, keinginan untuk melakukan fusi tidak pernah hilang di kedua organisasi itu.

Tidak lama setelah K. H. Ahmad Sanusi meninggal dunia, Mr. Syamsudin mengirim surat kepada K. H. Abdul

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)**

Halim. Mr. Syamsudin merupakan salah seorang murid K. H. Ahmad Sanusi yang dipercaya untuk mengirimkan surat wasiat dirinya kepada K. H. Abdul Halim di Majalengka. Isi surat itu sendiri secara umum merupakan ajakan dari Mr. Sjamsudin untuk melanjutkan usaha ke arah penyatuan PO dengan POII. Selengkapnya, surat itu berbunyi sebagai berikut.

Djakarta, (CBZ), 9-10-1950  
Jang Terhormat  
Saudara Kiai Abdul Halim  
Di Majalengka

Assalaau'alaikum Warohm.

Sajang sekali dalam keadaan saja begini ini (sakit) saja menulis surat kepada Kakanda tentang soal penting djuga kiranya. Sejak tanggal 26 bulan jang lalu saja kembali berada di Indonesia, terpaksa disebabkan terganggunya kesehatan saja, sehingga sedatang di Djakarta djuga tidak lama kemudian saja harus dirawat di Rumah Sakit. Mudah-mudahan sadja dengan do'a Kakanda, Tuhan akan mengidzinkan kembali saja sembuh segera supaja dapat kiranya saja menjumbangkan tenaga guna kepentingan ummat. Soal jang saja hendak kemukakan kepada Kakanda itu, ialah soal „ P. U. I.” dan „ P. U. I. I.” (Persatuan Ummat Islam Indonesia).

Kakanda dapat meraba, bagaimana ruwetnya pikiran dinda setelah tertinggal oleh Almarhum Kiai H. A. Sanusi (mudah-mudahan Tuhan akan memberi tempat sebaik mungkin padanya). Waktu beliau masih ada saja menjadi Wakil Ketuanja.

Kakanda dahulu pernah kiranya antara Almarhum Kiai H. A. Sanusi dengan Kakanda dipertjakapkan setjara be-

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)***

lum mendalam kemungkinan dilakukannja FUSI antara „PUI” dan „PUII”. Tidaklah hal itu pada waktu ini lebih lagi beralasan untuk diwujudkan?

Di dalam gambaran saja, Kakandalah jang kemudian memimpinnja; saja sendiri merasa gembira kalau saja dapat menjumbangkan tenaga untuk mengatur organisasinya.

Kakanda, saja sedikit-dikitnya Insja Allah akan berada 2 bulan di Indonesia. Selama itu semuanja ini apat kita atur. Saja akan bersjukur dan gembira sekali kalau Kakanda membalaas surat saja ini, lebih lagi kalau Kakanda sudi datang di Djakarta (Adres saja kalau tidak masih di CBZ adalah d/a Ir. Pangeran Noor Djalan Surabaja No. 2 Djakarta).

Sekian dulu, dengan pengharapan mudah-mudahan Tuhan akan mengaruniai kita lekas bertemu satu sama lain.

Wassalam  
Adinda,

ttd.

SAMSUDDIN (Mr. Samsuddin)

Surat tersebut sampai di tangan K. H. Abdul Halim bersamaan dengan pengumuman di radio yang menginformasikan bahwa Mr. Samsuddin telah meninggal dunia di Jakarta. Dengan demikian, K. H. Abdul Halim hanya bisa membaca dan memikirkan isi surat tersebut, tanpa pernah membalaasnja. Meskipun demikian, ajakan tersebut segera ditindaklanjuti oleh K. H. Abdul Halim dengan melakukan serangkaian pembicaraan dengan pengurus Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) di Sukabumi.

K. H. Abdul Halim kemudian mengutus beberapa orang Pengurus Besar Perikatan Ulama untuk melakukan pembicaraan dengan Pengurus Besar PUII. Pertemuan pertama diselenggarakan di Bandung pada tanggal 4-5 Agustus 1951. Mereka membicarakan secara organisasi kemungkinan penyatuan PUI dengan PUII. Mereka sepakat membawa kesepakatan pertemuan itu dalam rapat pleno masing-masing organisasi. Tiga bulan kemudian, kedua pengurus besar organisasi itu menlakukan pertemuan lagi tempat yang sama. Pertemuan dua hari itu (26-27 November 1951) menyepakati bahwa secara teknis penyatuan atau fusi kedua organisasi Islam dapat segera terwujud. Selain itu, rancangan anggaran dasar organisasi yang akan mereka dirikan telah disepakati juga.

Kesepakatan-kesepakatan dalam pertemuan tersebut akan dibahas secara mendalam di masing-masing organisasi. Selama empat bulan pembahasan rancangan anggaran dasar dan kesepakatan lainnya, sangat dimungkinkan terjadi pertemuan-pertemuan lanjutan yang bertujuan menyamakan persepsi dalam perubahan-perubahan yang terjadi. Akan tetapi, perubahan-perubahan itu tidak lantas menjadikan rencana fusi menjadi mentah lagi, karena pembahasan di tingkat organisasi ditujukan semata-mata untuk memperjelas kedudukan organisasi yang mereka rencanakan. Setelah perubahan-perubahan disepakati kedua organisasi, mereka sepakat untuk mendeklarasikan penyatuan organisasi mereka pada tanggal 5-6 April 1952 di Bogor. Direncanakan, dalam pertemuan itu tidak hanya membacakan

fusi kedua organisasi, tetapi juga menetapkan anggaran dasar dan kepengurusan organisasi sebelum dapat dilaksanakan muktamar.

Mengapa kedua organisasi ini bersedia meleburkan diri dan membentuk sebuah organisasi baru yang independen? Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang mendorong terjadinya fusi. **Pertama**, adanya persamaan yang terdapat dalam dua organisasi itu, khususnya dalam dasar dan prioritas program perjuangan yang sama-sama berdasarkan Islam dan mengutamakan program perjuangan di bidang pendidikan. Baik Perikatan Ulama maupun Persatuan Ummat Islam Indonesia sama-sama didirikan dengan tujuan memperbaharui sistem pendidikan agar ummat Islam tidak menjadi ummat yang terpinggirkan. Sejak kedua organisasi masih bernama Persyarikatan Oelama dan Al-Ittihadijatul Islamiyyah, telah banyak lembaga pendidikan yang mereka dirikan, mulai dari tingkat dasar sampai lanjutan. Kedua organisasi itu pun sama-sama tidak meninggalkan pesantren, tetapi yang dilakukan mereka adalah memperbaharui sistem pendidikan di pesantren.

**Kedua**, masing-masing organisasi menyadari bahwa kader potensial yang dimiliki mereka sangatlah minim, sedangkan perjuangan mereka masih sangat panjang. Selain itu, permasalahan yang akan mereka hadapi pun akan semakin kompleks. Penyatuan kedua organisasi itu akan mempersatukan kader potensial sehingga tantangan organisasi di masa depan akan dapat dihadapi jauh lebih ringan. Dengan menyatukan kader mereka dalam satu wadah organisasi, mereka yakin potensi yang

dimiliki para kader dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki peri kehidupan ummat. Berbeda jika masing-masing kader berjalan sendiri-sendiri, perbaikan ummat mugkin tidak akan dapat dilakukan secara optimal.

**Ketiga**, kedua oragnisasi memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kondisi ummat Islam yang pada waktu sedang terancam disintegrasi. Ancaman itu muncul sebagai dampak dari semakin tajamnya perbedaan di kalangan umat Islam mengenai pemikiran, praktik keagamaan, dan politik (Wanta, 1991: 8). Di pemikiran, polemik antara golongan tradisional dan golongan modernis semakin sulit untuk dipersatukan. Masing-masing merasa memiliki pemikiran yang paling benar. Dalam praktik keagamaan pun, sangat dirasakan semakin menjam perbedaan di antara mereka. Masalah hilafiyah selalu menjadi hambatan dalam upaya ummat Islam membentuk kekuatan yang tunggal. Paling dirasakan di bidang politik, yang dapat dilihat suatu bentuk permusuhan di antara kaum muslimin karena perbedaan kepentingan. Benih-benih perpecahan di Masjumi, misalnya, sangat mengancam kesatuan dan persatuan ummat Islam.

Nah, berangkat dari kondisi seperti itulah, PUI dan PUII bermufakat untuk melakukan fusi dengan tujuan agar perpecahan di kalangan ummat Islam tidak semakin meluas dan mendalam. Visi dan misi kedua organisasi itu relatif sama sehingga proses terbentuknya sebuah organisasi keislaman baru melalui fusi dua organisasi keislaman dengan tradisi perjuangannya yang cukup pan-

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)*

jang, relatif begitu lancar untuk diwujudkan. Demikianlah, pada tanggal 5-6 April 1952 di Bogor, mereka kembali menggelar pertemuan dengan agenda meresmikan fusi antara PUI dan PUII. Pada tanggal 5 April 1952, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bogor, pertemuan ketiga digelar secara resmi dimulai. Dalam pertemuan itu, K. H. Abdul Halim mengutus beberapa orang pengurus besarnya sebagai anggota delegasi Perikatan Ulama. Mereka adalah Muh. Junaedi Mansur (Ketua), Mr. Sudjono Hardjosudiro, Moh. Wachyudin, H. Ahmad Nawawi, Affandi Ridwan, Moh. Akim, S. Wanta, dan K. H. Soleh Solehuddin. Sementara itu, delegasi PUUI diketuai oleh R. Utom Sumaatmadja yang didampingi oleh beberapa orang anggota, yaitu: M. Mitraatmaja, Moh. Ma'sum, R. A. Sumantri, K. H. Acep Zarkasyi Sanusi, M. A. Badri Sanusi, S. Garda Supena, K. H. Soleh, K. Dadun Abdul Qohar, H. Abdulghani, dan Yusuf Iskandar (Wanta, 1991: 3).

Hari pertama diisi dengan pembacaan fusi kedua organisasi itu yang dibacakan oleh Affandi Ridwan. Disaksikan oleh para anggota delegasi dan jamaah dari kedua organisasi itu, Ridwan Affandi membacakan dengan penuh keyakinan fusi organisasi PUI dan PUII. Selengkapnya, pernyataan itu berbunyi sebagai berikut.

### **PERNYATAAN**

Setelah kedua Pengurus Besar PUI dan PUII mengadakan dua kali pertemuan pada tanggal 4-5 Agustus 1951 dan 26-27 November 1951 di rumah kediaman H. M. Fadil Dasuki (Firma Mustika) jalan

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)*

Cicenndo, Bandung, kemudian diadakan lagi pertemuan ketiga (terakhir) di Kota Bogor pada tanggal 5-6 April 1952 yang masing-masing Pengurus Besar telah mendapat kekuasaan (mandat) penuh dari mu'tamarnya.

Dalam pertemuan terakhir ini tampak hadir dari kedua organisasi yang diwakili oleh masing-masing delegasinya.

**Pertama**, Pengurus Besar PERIKATAN UMMAT ISLAM yang berpusat di Majalengka;

**Kedua**, Pengurus Besar PERSATUAN UMMAT ISLAM INDONESIA yang berpusat di Sukabumi;

maka masing-masing dengan penuh keikhlasan dan bertanggung jawab kepada Allah SWT atas keselamatan Ummat Islam Indonesia dan berhasrat besar untuk bersatu dalam mencapai cita-cita ISLAM RAYA dan KEBAHAGIAAN UMMAT DI DUNIA DAN AKHIRAT-sebagai pencerminan hikmat dari Intisab

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN**

1. Leburnya Persatuan Ummat Islam Indonesia dan Perikatan Ummat Islam;
  2. Berdirinya Persatuan Ummat Islam sebagai hasil pergabungan (fusi) dari dua perkumpulan tersebut di atas dengan berkedudukan pusatnya di Bandung;
- (PP PUI, 2006: 2).

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)*

Pernyataan fusi tersebut menandakan telah lahirnya organisasi baru yang bernama Persatuan Ummat Islam (PUI). Peranan K. H. Abdul Halim tidak dapat diabaikan karena dengan dorongannya lah para pengurus yang mempersiapkan fusi itu dapat merencanakannya secara matang. Sebagai seorang ulama, K. H. Abdul Halim dengan sangat bijaksana melihat bahwa penyatuan dua organisasi keislaman itu akan sangat menguntungkan ummat Islam. Setelah dibacakan pernyataan fusi, kedua delegasi melanjutkan pembicaraan mereka untuk membahas masalah kepengurusan dan anggaran dasar PUI. Dalam kepengurusan sebelum digelar muktamar, K. H. Abdul Halim duduk sebagai penasihat sehingga secara tidak langsung ia menolak permintaan Mr. Samsuddin untuk memimpin organisasi baru hasil fusi antara PUI dan PUII.

Rancangan anggaran dasar hasil pertemuan kedua di Bandung (26-27 November 1951) beserta perubahannya kemudian disahkan oleh peserta pertemuan. Untuk sementara waktu, sambil menunggu digelarnya Muktamar PUI Ke-1, kepengurusan PUI terdiri atas Dewan Harian, Majelis (Keuangan, Pendidikan dan Pengajaran, Penyiaran dan Penerangan, Perusahaan (Ekonomi), Sosial, Pemuda, dan Wanita), dan Dewan Penasihat. Dalam kepengurusan sementara itu, K. H. Abdul Halim duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat, bukan sebagai ketua

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)**

dewan harian. Dewan Harian sendiri dipegang oleh Moh. Djunaidi Mansur sebagai Ketua I (PUI) dan R. Utom Sumaatmadja sebagai Ketua II (PUII).

Pada 29 Agustus 1954, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Muktamar Ke-2 PUI yang diselenggarakan di Sukabumi. Berdasarkan anggaran dasar hasil Muktamar Ke-2 tersebut ditetapkan bahwa PUI merupakan organisasi sosial, pendidikan, dan da'wah yang bersifat independen serta berasaskan Pancasila. PUI didirikan dengan tujuan melaksanakan syariah Islamiyah Ahlussunnah wa-Jamaah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridloai Allah SWT. Untuk mencapai tujuan itu, PUI akan bergerak di bidang peribadatan, pendidikan Islam, dan da'wah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ummat Islam. Untuk mewujudkan itu, PUI akan senantiasa menekankan pada nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah* dan akan melakukannya kerja sama dengan badan atau lembaga lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (PP PUI, 1997: 2-3). Sementara itu, dalam Aturan Rumah Tangga PUI, ditetapkan bahwa landasan perjuangan PUI adalah intisab yang telah dipraktikkan oleh K. H. Abdul Halim ketika organisasi masih bernama Perikatan Ummat Islam (PP PUI, 1997: 7). Selain menetapkan AD/ART, dalam Muktamar ke-2 itu dietapkan juga lambang PUI yang di-

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)*

ciptakan oleh K. H. Acep Zarkasyi Sanusi, Muh. Ma'sum, dan K. H. M. Fadil Dasuki.

Dengan lahirnya PUI, cita-cita K. H. Abdul Halim memperbaiki ummat semakin mendapat dukungan masyarakat luas. Banyak pemikiran K. H. Abdul Halim dijadikan sebagai asas dan tujuan PUI, seperti Intisab dan konsep Al Salam yang mengandung delapan perbaikan menuju terwujudnya kabahagiaan hidup ummat.

Pada penyelenggaraan Muktamar PUI ke-3 Tahun 1957, seorang peserta muktamar yang bernama Mr. Sujono Haryosudiro mengusulkan agar PP PUI segera mengajukan status badan hukum kepada pemerintah. Dari sisi legalitas, status badan hukum ini sangat penting untuk menjamin keamanan organisasi dan seluruh asetnya. Usulan tersebut diterima oleh muktamar, tetapi baru pada bulan Juli 1958, PP PUI mengajukan permohonan agar PUI diberikan status sebagai badan hukum. Setelah semua persyaratan dianggap mencukupi, pemerintah melalui Menteri Kehakiman mengeluarkan Ketetapan Menteri Kehakiman No. JA 5/86/23 tanggal 10 September 1958 yang mengukuhkan status badan hukum bagi Persatuan Ummat Islam (PUI). Dengan status sebagai badan hukum itu, berarti eksistensi PUI telah diakui sebagai sebuah organisasi yang sah menurut hukum. Artinya, aktivitas PUI di bidang pendidikan, sosial, agama, ekonomi, dan budaya dijamin oleh hukum. Dan dalam

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)***

kenyataannya, eksistensi PUI tidak hanya berkibar ketika pendirinya masih hidup, namun sekarang pun keberadaannya masih kuat berdiri.

Foto 20: Lambang Persatuan Ummat Islam (PUI)



Keterangan mengenai arti lambang PUI (berdasarkan keputusan PP PUI No. 03/PP/VII/1983 tanggal 18 Juli 1983).

*Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim;  
Mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI)*

1. Bulat berarti kebulatan tekad dan akidah yang tercermin dalam intisab PUI.
2. Tali yang melingkar merupakan simbol bagi persatuan yang teguh dan persaudaraan yang erat; tidak mudah diceraikan.
3. Bintang sudut lima, artinya melambangkan ke-Mahaesa-an dan keluhuran Allah SWT.
4. Bulan sabit sebagai simbol penuh harapan dan optimistik.
5. Ka'bah berarti titik arah dari perpaduan dalam mengabdi.
6. Sinar yang artinya tidak membedakan tingkat sosial karena yang ditekankan adalah kekompakkan dalam pengabdian yang menuju satu arah.

Sementara itu, warna yang dipakai oleh PUI sebanyak empat buah warna.

1. Hitam berarti kesetiaan dan ketaatan dalam takwa.
2. Putih berarti kesucian dalam mengabdi (ibadah) dan keikhlasan.
3. Kuning tua (emas) berarti kebanggaan dan kemenangan.
4. Hijau tua berarti kesuburan dan kesejahteraan (PP PUI, 1987: 1-2).

## **VI. TITIP SANTI ASROMO DAN PUI**

### **1. Masa Tua**

Selain membina dan mengembangkan Santi Asromo, masa-masa tua K. H. Abdul Halim diisi juga dengan kegiatan membina organisasi PUI. Aktivitasnya di PUI bukan sebagai pengurus harian, namun duduk di dewan penasihat. K. H. Abdul Halim selalu mengingatkan para pengurus dan warga PUI agar senantiasa berpegang teguh pada Intisab PUI agar cita-cita memperbaiki ummat dapat diwujudkan. Pada suatu kesempatan yakni pada tahun 1957 yang bertepatan dengan peringatan

ulang tahun ke-5 PUI, K. H. Abdul Halim mengatakan bahwa persatuan (fusi) antara PUI dan PUII merupakan sebuah peristiwa yang sangat jarang terjadi. Sebaliknya, perpecahan organisasi Islam menjadi lebih dari satu sering terjadi sehingga acapkali merugikan kepentingan ummat. Dalam kesempatan itu, K. H. Abdul Halim memberi amanat kepada generasi penerus PUI agar mengutamakan akhlaq (budi perangai) dan bersikap ramah tamah kepada sesama manusia, terutama kepada sesama ummat Islam. Dia pun mengharapkan agar PUI dapat memberikan manfaat bagi perikehidupan dan penghidupan ummat seperti yang tersirat dan tersurat dalam Intisab PUI. Apabila pengurus dan segenap warga PUI berpegang pada Intisab PUI, mereka tidak akan terbawa arus yang menggoncangkan masyarakat (PP PUI, 2006: 8-9; Wawancara dengan K. H. Cholid Fadlulloh, tanggal 7 April 2008).

Sampai sekarang, PUI tetap berkibar sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang independen. Pendidikan tetap menjadi perhatian utamanya meskipun kemudian tidak semua konsep atau pemikiran K. H. Abdul Halim diterapkan dalam lembaga pendidikan yang dibina PUI. Bahkan, konsep santri lucu misalnya, mulai ditinggalkan oleh PUI karena memang kondisi masyarakatnya sudah berbeda. Konsep pendidikan yang seka-

rang dikembangkan oleh PUI lebih kepada upaya merevitalisasi sistem sekolah dengan landasan Islam.

Tidak lama setelah memberikan amanat tersebut, K. H. Abdul Halim jatuh sakit. Ia menderita diabetes yang telah dideritanya sejak tahun 1956. Akibat penyakitnya itu, aktivitasnya di Santi Asromo dan di PUI menjadi terganggu. Dari tahun ke tahun, penyakitnya itu semakin memburuk sehingga K. H. Abdul Halim harus istirahat total. Selama sakit, ia selalu ditetami oleh santrinya yang bernama Abdul Fatah. Abdul Fatah, sekarang menjadi salah seorang ustadz di Santi Asromo, dengan setia melayani semua kebutuhan gurunya itu, sampai urusan memijit pun dilakukannya (Wawancara dengan Abdul Fatah, tanggal 30 Maret 2008).

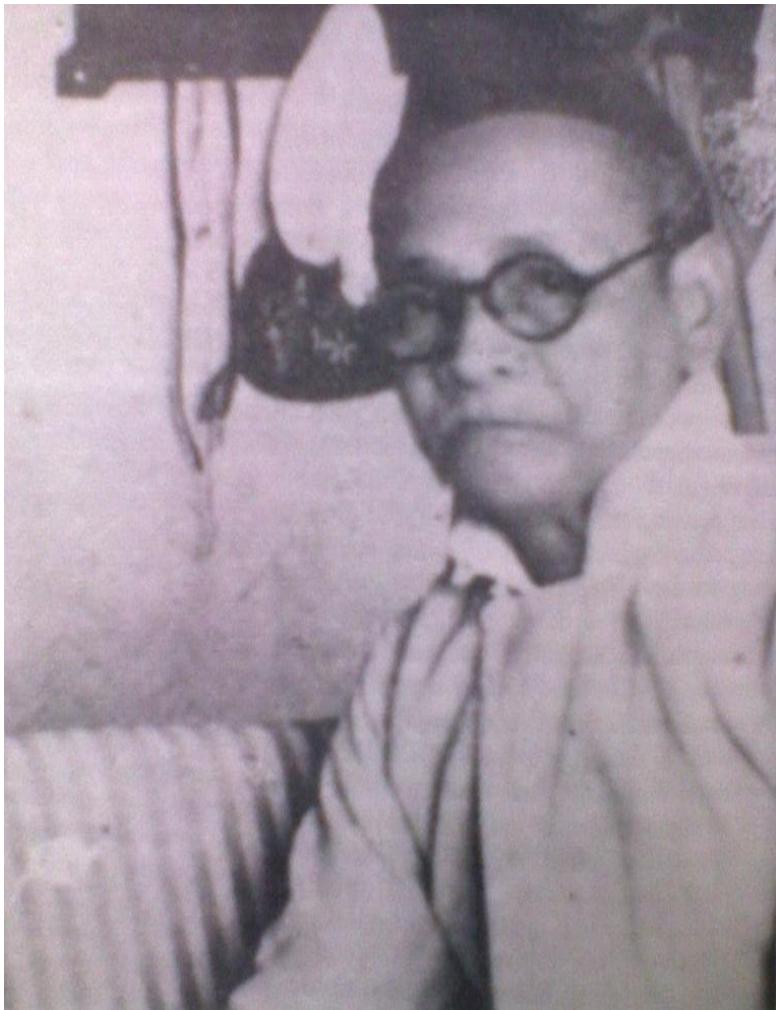
Ketika dirinya sudah mulai menderita sakit, K. H. Abdul Halim masih menyempatkan diri memenuhi undangan Dewan Nasional yang hendak menyelenggarakan rapat akbar di Istana Negara. Undangan itu diterimanya mengingat K. H. Abdul Halim masih menyandang sebagai anggota Dewan Konstituante. Rapat akbar itu sendiri diselenggarakan dalam acara memperingati hari lahir Pancasila pada tanggal 5 Juni 1958. Dalam kesempatan itu, Mohammad Yamin, anggota Dewan Nasional menyempatkan diri untuk berpidato dan mengatakan ...

Satu per satu saya pelajari nama 50 orang (di antaranya Kiai H. Abdul Halim) yang masih hidup itu. Dengan rasa bangga saya melihatnya bahwa dari anggota yang masih hidup tiadalah satu orang yang mengkhianati kepada Republik Indonesia atau yang menyeleweng ke pihak Belanda. Dari masyarakat kaum sahabat Pancasila yang menghadiri rapat Pejambon pada tanggal 1 Juni 1945 itu benar-benar memperjuangkan Revolusi 13 tahun yang lampau .... (Hidajat, 1967: 20).

Ketika kesehatannya semakin memburuk, karena memiliki penyakit paru-paru juga, K. H. Abdul Halim memanggil seluruh putra-putrinya dan para pengurus PUI yang ada di Majalengka ke Santi Asromo. Ia kemudian memberikan amanat kepada mereka untuk terus berusaha mewujudkan dan mengembangkan usaha-usaha yang telah dirintisnya, karena ...

Aku sudah tidak dapat lagi menyumbangkan atau menumpahkan pikiran, jiwa, dan ragaku bagi perjuangan nusa, bangsa, dan negara. Usiaku kini sudah termasuk tinggi dan hidup hanya sebatang kara. Kawan-kawan dan sahabatku seperjuangan sudah banyak yang mendahului Aku menghadap ke Hadlirat Ilahi 'Azza Wadjalla. Bakti dan khittah perjuanganku kepada Allah SWT seru sekalian alam, goresan dan perjuangan hidupku sejrahlah yang mencatatnya. Titip Santi Asromo dan PUI kepada kalian (Hidajat, 1967: 20).

Foto 21: K. H. Abdul Halim (1952)



Sumber: Sukarsa, 2007: 126

Foto 22: K. H. Abdul Halim (1960)



Sumber: Sukarsa, 2007: 154

Foto 23: Siti Murbiyah  
(Istri K. H. Abdul Halim)



Sumber: Sukarsa, 2007: 156.

Pada tahun 1960-an, kesehatan K. H. Abdul Halim menunjukkan gejala yang semakin parah sehingga tubuhnya pun semakin kurus. Sehari-harinya hanya bisa berbaring di tempat tidur sambil sesekali menanyakan perkembangan Santi Asromo dan PUI. Pada tanggal 7 Mei 1962, K. H. Abdul Halim meninggal dunia dengan tenang di tempat yang damai dan sunyi, Santi Asromo. Berita meninggalnya K. H. Abdul Halim pertama kali diumumkan oleh RRI Regional Bandung yang keesokan harinya dimuat juga di *Pikiran Rakyat* dengan menuliskan riwayat singkat perjuangannya. Pada tanggal 1 Juni 1962, *Gema Islam* menerbitkan juga riwayat perjuangan K. H. Abdul Halim secara panjang lebar di kolom *Kronik*.

K. H. Abdul Halim meninggal dunia dalam usia 75 tahun dan meninggalkan seorang istri yang dinikahinya pada tahun 1907. Tidak ada harta melimpah yang diwariskan kepada istri dan keenam anaknya. Warisannya adalah semangat perjuangannya untuk melakukan perbaikan ummat. Istrinya pun hanya ditinggali penghasilan berupa tunjangan sebagai janda seorang Perintis Kemerdekaan. Tidak banyak hartanya, tetapi semangat perjuangannya yang tidak dapat diukur oleh materi.

Foto 24: Makam K. H. Abdul Halim  
Di Kompleks Santi Asromo



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Meskipun K. H. Abdul Halim telah dipanggil oleh Allah SWT, namun jejak langkah perjuangannya akan terus dilakukan oleh para generasi berikutnya. Mereka telah diberi bekal wadahnya, yaitu Santi Asromo dan PUI. Dengan perkataan lain, keduanya merupakan warisan yang paling berarti bagi ummat yang ditinggakan oleh K. H. Abdul Halim. Sampai sekarang kedua warisannya itu masih terus berkembang meskipun tidak semua konsep pemikirannya masih diterapkan oleh para pengurusnya. Bukan karena mereka melupakan cita-cita K. H. Abdul Halim, namun semata-mata karena perju-

gan para generasi penerusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan PUI sulit mengikuti konsep pendidikan seperti yang diterapkan K. H. Abdul Halim di Santi Asromo. Paling-paling dalam batas tertentu diterapkan dalam sistem pendidikan kejuruan, seperti yang diterapkan di SMK PUI di Kuningan (Wawancara dengan Jaja Jahari, tanggal 14 April 2008).

Sebenarnya, masih ada satu lagi warisan yang ditinggalkan K. H. Abdul Halim untuk ummatnya, yakni berbagai tulisannya. Selama berjuang mewujudkan cita-citanya, K. H. Abdul Halim tidak hanya sebatas ucapan atau tindakan saja. Ia juga berjuang melalui penanya dengan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk buku atau tulisan lainnya. Menurut Gunseikanbu (1986) karya tulis K. H. Abdul berjumlah sembilan buah. Kesembilan tulisannya itu adalah *Da'wat Al-'Amal, Tarikh Islam, Neraca Hidup, Kitab Petunjuk bagi Sekalian Manusia, Risalat, Ijtimaiyyat wa 'Ilajuhā, Kitab Tafsir Surat Tabarak, Kitab 262 Hadits Indonesia*, dan *Bab Al-Rizq*. Selain itu, ada juga sebuah buku karangan K. H. Abdul Halim yang berjudul *Ekonomi dan Koperasi dalam Islam* dan sebuah buku *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah-Sekolah Ibtidaiyah Persyarikatan Oelama*. Buku terakhir merupakan buku yang dikerjakan oleh sebuah panitia yang diketuai oleh K. H. Abdul Halim.

Namun sayangnya, buku-buku karya K. H. Abdul Halim terbakar sewaktu kampung halamannya diserang Belanda pada saat melakukan Agresi Militer II tahun 1948. Hanya dua buku yang tidak terbakar, yaitu *Kitab Petunjuk bagi Sekalian Manusia* dan *Ekonomi dan Koperasi dalam Islam*. Meskipun demikian, pemikiran-pemikiran K. H. Abdul Halim tidak lantas hilang begitu saja, karena ia pun aktif menulis artikel yang dimuat di berbagai media massa, di antaranya majalah: *Soeara Persjarikatan Oelama*, *As-Sjuro*, dan *Pelita*. Ia pun pengisi kolom “Roeangan Hadits” majalah *Soeara MIAI* (Lubis, 2007: 22).

Mengingat jasanya pada negara yang begitu besar, Pemerintah RI kemudian menetapkan dirinya sebagai Perintis Kemerdekaan. Selain itu, beberapa bintang jasa disematkan juga oleh pemerintah kepada K. H. Abdul Halim, yaitu Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan Satyalancana Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1961. Bintang jasa paling tinggi bagi anak bangsa dianugrahkan juga kepada K. H. Abdul Halim pada tahun 1992. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992, Presiden Soeharto menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasanya. Selain dari pemerintah, pada tahun 1999, Yayasan Asih Fatmah memberikan penghargaan kepada

K. H. Abdul Halim sebagai Ulama Pejuang yang dipandang telah memperkenalkan dan mempromosika Majalengka ke luar daerah Majalengka.

Foto 25: Bintang Maha Putera Utama (1992)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 26: Piagam Bintang Maha Putera Utama (1992)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

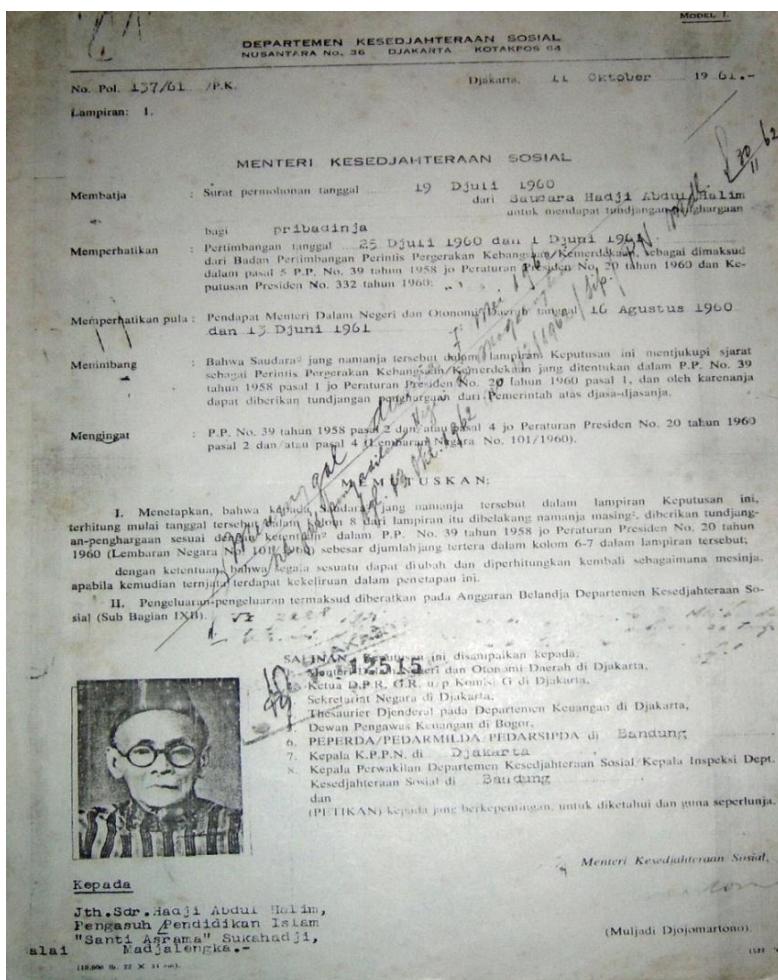
Foto 27: Piagam Penghargaan dari  
Yayasan Asih Fatmah (1999)



Sumber: Dokumentasi Wawan Hernawan, 2008.

Foto 28: Surat Keterangan Pemberian Tunjangan bagi K. H. Abdul Halim sebagai Perintis Kemerdekaan

## Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim; Titip Santi Asromo dan PNU



Sumber: Dokumen Keluarga, 2008.

Foto 29: Jalan K. H. Abdul Halim  
(Jalan Protokol di Kota Majalengka)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Nama K. H. Abdul Halim pun diabadikan sebagai nama jalan protokol di Kota Majalengka. Jalan sepanjang

kurang lebih 2,5 km dimulai di daerah Munjul (Cijati) sampai daerah Cigasong. Sebelumnya, jalan ini dikenal dengan nama Jln. Raya Timur yang kemudian diganti menjadi Jln. Ibu Tien Soeharto. Tidak lama setelah Tutty Hayati Anwar, M. Si. menjabat sebagai Bupati Majalengka, nama jalan ini diganti menjadi Jln. K. H. Abdul Halim. Pemberian nama jalan ini sebagai salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah atas perjuangan K. H. Abdul Halim yang mulai di daerah yang sekarang menjadi bagian dari jalan protokol itu.

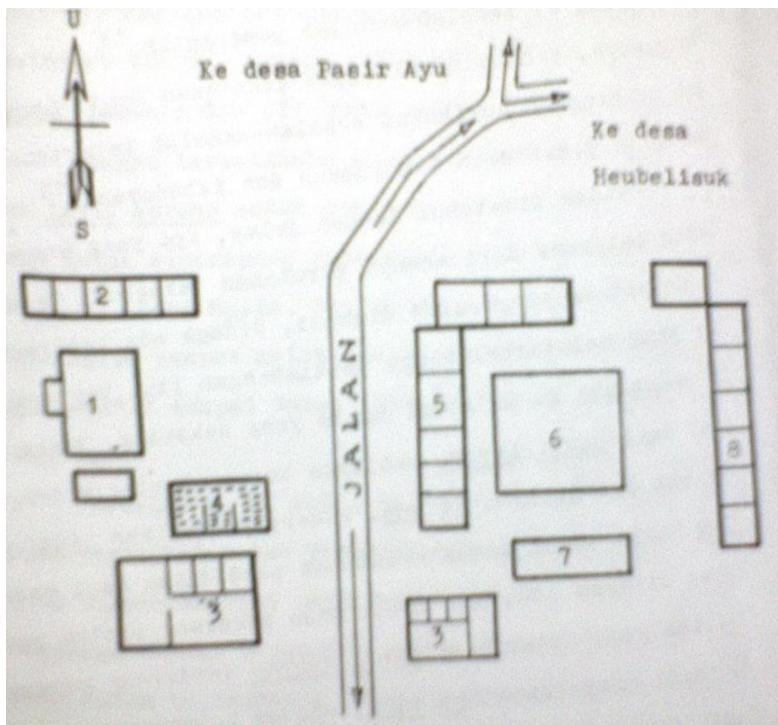
## **2. Santi Asromo**

Sepeninggalnya K. H. Abdul Halim, keberadaan Pondok Pesantren Santi Asromo terus berdiri. Konsep pendidikan yang dikembangkan pun tidak jauh berbeda dengan konsep pendidikan yang diinginkan oleh pendirinya. Para keturunan dan bekas santrinya, berupaya untuk mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Santi Asromo karena mereka mendapat amanat dari K. H. Abdul Halim. Para santri yang belajar di pondok pesantren ini sudah mencapai ratusan untuk berbagai jenjang pendidikan. Selain menyelenggarakan pendidikan formal, di Pondok Pesantren Santi Asromo pun diselenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti Majelis Taklim.

Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, dibentuklah sebuah yayasan yang sekarang ini dipimpin oleh K. H. Cholid Fadlulloh. Yayasan inilah yang paling bertanggung jawab untuk mengembangkan keberadaan Pondok Pesantren Santi Asromo. Selain itu, dibangun juga sebuah bangunan dua lantai yang sebagian difungsikan sebagai ruang belajar dan sebagian lagi difungsikan sebagai ruang guru dan aula. Sementara itu, bangunan yang dibangun tahun 1952, masih tetap berdiri dan difungsikan sebagai ruang belajar, koperasi, dan pusat kegiatan ekstrakurikuler para santri Santi Asromo.

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dari sisi manajemen pendidikan, Santi Asromo tidaklah berbeda dengan pesantren tradisional lainnya. Masalah kekerabatan dengan K. H. Abdul Halim, selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap pergantian ketua yayasan. Hal ini terlihat dari kepemimpinan di Santi Asromo bahwa sepeninggalnya K. H. Abdul Halim, kepemimpinannya dilanjutkan oleh K. H. Aziz Abdul Halim yang merupakan anak ketiga K. Abdul Halim. Untuk saat ini, kepemimpinan di Santi Asromo berada di tangan K. H. Cholid Fadlulloh, S. H. yang merupakan cucu K. H. Abdul Halim dari anaknya yang nomor dua.

Foto 30: Denah Kompleks Santi Asromo  
(1932-Sekarang)



Keterangan:

1. Masjid (1932, 1935, 1952)
2. Ruang Belajar (1938; Tahun 1952 dijadikan sebagai asrama putra)
3. Rumah atau tempat tinggal para guru
4. Rumah K. H. Abdul Halim
5. Poliklinik (Panti Mardhi Waluyo)
6. Pendopo (1952)
7. Asrama putri (Wisma Rini)

8. Ruang Belajar untuk tingkat menengah (1952)  
Sumber: Jalaludin, 1990: 153

Foto 31: Papan Nama Pondok Pesantren Santi Asromo (1952)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 32: Bangunan Baru  
Pondok Pesantren Santi Asromo



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 33: Pendopo di Kompleks Santi Asromo (1952)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 34: Para Santri Berlatih Bela Diri di Pendopo

Santi Asromo (1952)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 35: Bangunan Sekolah (Ruang Belajar)

yang dibangun tahun 1952



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 36: Ruang Koperasi Santi Asromo (1952)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

### **3. PUI Sepeninggal K. H. Abdul Halim**

Selain menitipkan Santi Asromo, K. H. Abdul Halim pun menitipkan PUI kepada para kadernya. Sejak didirikan tahun 1952, PUI merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang dawah dan sosial. Meskipun demikian, pernah juga PUI berkecimpung di dunia politik sebagai anggota istimewa dari Masyumi. Namun demikian, sejak tahun 1957, K. H. Abdul Halim beserta seluruh jajaran Pengurus Besar PUI melakukan khittah dengan keluar dari keanggotaan Masyumi. Sejak tahun itu, PUI kembali menjadi organisasi sosial, tetapi mempersilahkan para anggotanya berpolitik dengan bergabung ke partai politik apapun selama ideologinya tidak bertentangan dengan PUI. Inisiatif kemudian dijadikan landasan perjuangan PUI baik bagi para pengurus, anggota, maupun para santrinya.

Dua tahun setelah K. H. Abdul Halim meninggal dunia, melalui Muktamar Ke-4 kedudukannya sebagai Ketua PP PUI digantikan oleh K. H. Aziz Abdul Halim. Pada masa kepemimpinannya inilah, kedudukan PP PUI dipindahkan ke Bandung pada tahun 1967 yang disahkan oleh Muktamar Ke-5 di Cianjur. Bidang pendidikan masih sebagai garapan utama PUI meskipun tidak berarti masalah sosial, ekonomi, dan kepemudaan diabaikan. Ketiga masalah tersebut tetap mendapat perhatian dari PUI yang terlihat dari keberadaan Majelis Sosial, Majelis

Perekonomian, dan Majelis Pemuda dalam susuan organisasi PP PUI.

Setelah delapan belas tahun memimpin PUI (1964-1982), K. H. Aziz Abdul Halim meninggal dunia dan ke-dudukannya digantikan oleh H. M. Fadil Dasuki. Tahun 1986, pucuk pimpinan PUI diserahkan kepada K. H. A. Karim Halim karena ketua sebelumnya meninggal dunia. Di bawah kepemimpinannya, kedudukan pengurus besar dipindahkan ke Jakarta agar kegiatan-kegiatan PUI di bidang da'wah dan pendidikan semakin berkembang. Untuk mendukung mengembangkan pendidikan di Indonesia, PP PUI acapkali menyelenggarakan berbagai kegiatan pendukung, seperti seminar pendidikan. Salah satunya diselenggarakan di Majalengka tahun 1987 yang bertujuan merumuskan dan memperkuat konsep pendidikan PUI yang mandiri. Mandiri secara kelembagaan dan mandiri dalam menghasilkan lulusannya. Dengan demikian, sampai pelaksanaan seminar itu, para kader PUI telah berupaya untuk tetap mempertahankan cita-cita guru mereka, K. H. Abdul Halim, yang hendak membentuk pribadi muslim yang mandiri melalui pendidikan (Wanta, 2007: 4-5).

Foto 37: Intisab Persatuan Ummat Islam Indonesia



Sumber: Sukarsa, 2007: 138.

Ketika Pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1985, PUI menerima kebijakan pemerintah tersebut. Dengan demikian, sejak tahun 1985, baik dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga dikatakan bahwa PUI merupakan organisasi sosial yang berdasarkan Pancasila. Keputusan Rapat Pleno PP PUI tersebut tidak membawa dampak negatif, justru sebaliknya PUI dapat mengembangkan misi organisasi yakni mengembangkan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat wajar kalau kemudian PUI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam program wajib belajar.

Tahun 1990, K. H. A. Karim Halim digantikan oleh H. Afandi Ridhwan sebagai Ketua Umum PP PUI. Masa kepemimpinannya diupayakan agar landasan perjuangan dan amaliyah PUI, yakni Intisab, semakin dipahami dan dihayati secara seragam oleh para pengurus, anggota, dan santri PUI. Hal tersebut dipandang sangat penting mengingat semakin gencarnya pengaruh luar yang sangat berpotensi merusak akhlak dan kepribadian bangsa. Pendidikan dapat dijadikan alat untuk mencegah kerusakan itu dan bagi PUI, Intisab merupakan landasan yang paling cocok untuk mewujudkan cita-cita PUI di bidang pendidikan.

Foto 38: S. Wanta (Bekas Santri K. H. Abdul Halim dan Sekretaris Dewan Pembina dan Penasihat PP PUI dari Tahun 1993)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Foto 39: K. H. Cholid Fadlulloh, S. H.  
Cucu K. H. Abdul Halim dan Ketua Yayasan Santi Asromo



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008.

Empat tahun kemudian, tepatnya tahun 1994, K. H. Cholid Fadlulloh, S. H. dipilih oleh peserta Muktamar Ke-9 sebagai Ketua Umum PP PUI. Ia menggantikan kedudukan pamannya sehingga sampai tahun itu, kedudukan ketua umum selalu dijabat oleh keturunan K. H. Abdul Halim. Memang pernah juga dijabat oleh bukan keturunan K. H. Abdul Halim, tetapi berkedudukan sebagai pejabat atau pengganti karena ketua sebelumnya meninggal dunia. Selama sepuluh tahun, K. H. Cholid Fadlulloh memimpin organisasi yang didirikan oleh kakeknya itu. Menjelang berakhir masa bakti periode kedua (2004), K. H. Cholid Fadlulloh mengatakan bahwa sebaiknya PUI tidak menjadikan keturunan K. H. Abdul Halim atau K. H. A. Sanusi sebagai satu-satunya orang yang berhak memimpin PUI. Selama dipandang memiliki kemampuan dan memiliki karakter dalam memimpin massa, seluruh kader PUI berhak dipilih dan diangkat menjadi ketua umum PUI. Pernyataan tersebut merupakan sebuah langkah maju agar gerak langkah PUI tidak terhambat karena faktor-faktor kekerabatan (Wawancara dengan K. H. Cholid Fadlulloh, tanggal 7 April 2008).

Pernyataan tersebut dilontarkan kembali oleh K. H. Cholid Fadlulloh kepada seluruh peserta Muktamar Ke-11 PUI yang diselenggarakan tahun 2004 di Jakarta. Muktamirin merespons positif pernyataan itu dan memang seharusnya hal itu dilakukan karena PUI bukan

sebuah pesantren, tetapi sebuah organisasi sosial yang dimiliki juga oleh umat. Di lain pihak, seorang kader muda yang telah duduk sebagai Ketua IV PP PUI periode kedua kepemimpinan K. H. Cholid Fadlulloh, dipandang memiliki kemampuan untuk menjadi nakhoda PUI. Melalui keputusan Muktamar Ke-11, Ahmad Heryawan, Lc. diangkat sebagai Ketua Umum PP PUI untuk periode tahun 2004-2009 (Wanta, 2007: 52-53).

Meskipun status PUI sebagai sebuah organisasi nonpartai yang bersifat independen, tetapi tidak berarti melarang pengurus atau anggotanya untuk berpolitik. Secara individu, PUI menghargai hak politik setiap pengurus atau anggotanya selama tidak membawa nama lembaga atau organisasi dalam aktivitas politiknya. Kenyataan itulah yang kemudian ditempuh oleh H. Ahmad Heryawan, Lc. yang pada tahun 1998 memilih aktif berpolitik bersama Partai Keadilan Sejahtera dan berkedudukan sebagai Ketua DPW PK DKI Jakarta. Setelah jabatan Ketua Umum PP PUI disematkan di pundaknya, Ahmad Heryawan pun dipilih kembali menjadi Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta. Kedudukannya itulah yang menghantarkan ia menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009 ([http://www.ahmad\\_heryawan. com](http://www.ahmad_heryawan. com), tanggal 17 Mei 2008, pukul 09.00).

Foto 30: H. Ahmad Heryawan, Lc.  
(Ketua Umum PP PUI)



Sumber: <http://www.ahmadheryawan.com>, tanggal 17 Mei 2008,  
pukul 09.00

Pamor PUI, khususnya di Jawa Barat semakin meningkat seiring dengan terpilihnya Sang Ketua Umum PP PUI, H. Ahmad Heryawan, Lc. sebagai Calon Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013. Melalui Ketetapan Sidang Pleno KPU Jawa Barat tanggal 22 April 2008, Ahmad Heryawan ditetapkan sebagai Calon Gubernur Terpilih dengan mengantongi suara sebanyak 7,287,647 atau sebesar 40,50% dan mengalahkan pasangan lainnya. Sudah barang tentu, kemenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan penuh dari segenap pengurus PUI Cabang Jawa Barat yang dinakhodai oleh Jaja Jahari, Drs., M. Pd.

Dengan demikian, selain organisasi yang didirkannya masih berdiri, K. H. Abdul Halim pun dapat tersenyum (seandainya ia masih hidup) melihat kadernya menjadi pemimpin di sebuah propinsi yang memiliki penduduk paling padat di Indonesia. Meskipun demikian, PUI akan tetap menjadi sebuah organisasi sosial dengan garapan utamanya di bidang da'wah dan pendidikan.

Foto 31: Jaja Jahari, Drs., M. Pd.  
(Ketua Umum PUI Jawa Barat)



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2008

## **DAFTAR SUMBER**

### **Arsip**

Indonesia. *Verslag het IX<sup>de</sup> Congres van de "Perserikatan Oelama gehouden op den 29 t/m 31 Augustus 1931 te Madjalengka.* Bundel Arsip Perserikatan Oelama No. A/5. Jakarta: ANRI.

Indonesia. *Van de Openbare vergadering van het XIII<sup>de</sup> Congres van de Vereeniging "Persjarikatan Oelama" ("P.O.") gehouden te Indramajoe, op Zondag, den 1<sup>sten</sup> September 1935.* Bundel Arsip Perserikatan Oelama No. A/5. Jakarta: ANRI.

## Artikel, Buku, dan Dokumen Tercetak

- Adams, Cindy. 1966. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Terj. Abdul B. Salim. Jakarta: Gunun Agung.
- Adnan, H. A. Baldhowi. 1986. "PUI: Bermula dari Pengajian Kecil" dalam *Pelita*. 5 April 1986.
- Akim, Mohammad. 1964. *Kiai Hadji Abdulhalim; Penggerak PUI*. Madjalengka: Jajasan K. H. Abdulhalim.
- Ambari, Hasan Muarif. 2006. "Sejarah Perkembangan Persatuan Ummat Islam (PUI)" dalam A. Darun Setiady (ed.). *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat*. Bandung: PW PUI Jawa Barat. Hlm. 251-258.
- Azis, M. A. 1955. *Japan's Colonialism and Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhof.
- Bahar, Saafroedin (ed.). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Setneg RI.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Benda, Harry J.; James Irikura; dan Koichi Kishi. 1965. *Japanese Military Administration in Indonesia; Selected Documents*. New Haven: Yale University Southeast Studies.
- Dhofier, Zamakhsari. 1982. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

- Djajusman. 1978. *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda*. Bandung: Angkasa
- Ekadjati, Edi S. 1995. *Sunda, Nusantara, dan Indonesia; Suatu Tinjauan Sejarah*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- 2006. "PUI; Dulu, Kini, dan Masa Mendatang" dalam A. Darun Setiady (ed.). *Revitalisasi Peran PUI dala, Pemberdayaan Ummat*. Bandung: PW PUI Jawa Barat. Hlm. 269-279.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia* (ENI). Jilid X. 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Fadlullah, Cholid. H. 1994. *Tri Sila Hasta Wahana dalam Intisab Persatuan Ummat Islam*. Jakarta: Panitia Muktamar IX PUI.
- Geertz, Clifford. 1982. *Islam yang Saya Amati; Perkembangan di Maroko dan Indonesia*. Terj. Hasan Basri. Jakarta: YIIS.
- Gunseikanbu. 1986. *Orang-Orang yang Terkemuka di Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Halim, A. Azis. 1977. *Ulang Tahun Ke-45 Santi Asromo*.
- Halim, Abdul. "Pemandangan Kita tentang Persyarikatan Oelama" dalam *Soeara Persyarikatan Oelama*. No. 6, 7, dan 8. Tahun III. Juni 1931.
- 1932. *Azas dan Tujuan Pendidikan/Pengajaran Santri Asromo*. Disalin ulang oleh Masyhudi tanggal 1 Jui 1988. Tidak diterbitkan.
- 1936. *Economie dan Cooperatie dalam Islam*. Madjalengka: Santi Asromo.

- “Menuju ke Arah Perbaikan; Peri Pergaulan Hidup Manusia Bersama dalam Dunia Allah” dalam *Soeara Moeslimin Indonesia*. No. 4. Tahun II. 15 Februari 2604/1944. (a).
- “Ulama Pembawa Amanat Allah” dalam *Soeara Moeslimin Indonesia*. No. 16. Tahun II. 15 Agustus 2604/1944. (b).
- Hernawan, Wawan. 2007. *Teologi K. H. Abdul Halim; Ikh-tiar Melacak Akar-Akar Pemikiran Teologi Organisasi Massa Islam Persatuan Ummat Islam (PUI)*. Bandung: PW PUI Jawa Barat.
- Hidayat, Abu Sjahid. 1967. “K. H. Abdul Halim; Hidup dan Perjuangannya” dalam *Panji Masyarakat*. No. 2. Tahun II.
- Indonesia. 1953. *Propinsi Djawa Barat*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Indonesia. 1978/1979. *Sejarah Radio Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- 1988. *Di Bawah Pendudukan Jepang; Kenangan Empat Puluh Orang yang Mengalaminya*. Jakarta: ANRI.
- Jalaludin. 1990. *Santi Asromo K. H. Abdul Halim; Studi tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Disertasi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Jaya, Ruhatna. 1995. *Sejarah Perguruan Islam Syamsul Ulum Gunung Puyuh*. Sukabumi.
- Kartika, N. 2008. *Sejarah Majalengka; Sindangkasih-Maja-Majalengka*. Jatinangor: Uvula Press.

- Kartodirdjo, Sartono (ed.). 1973. *Sejarah Perlawanan-Perlawanan terhadap Kolonialisme*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kutoyo, Soetrisno (ed.), 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat (Sampai dengan Tahun 1950)*. Bandung: Depdikbud. Proyek IDKD.
- Lubis, Nina H. 2006 (a). "Sejarah Perjuangan Umat Islam di Jawa Barat" dalam A. Darun Setiady (ed.). *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat*. Bandung: PW PUI Jawa Barat. Hlm. 259-268.
- 2006 (b). *9 Pahlawan Nasional Asal Jawa Barat*. Bandung: Puslit Kemasyarakatan & Kebudayaan Unpad.
- 2007. "K. H. Abdul Halim dan K. H. Ahmad Sanusi" dalam *Pikiran Rakyat*. 7 Juli 2007.
- Madjid, Nurcholis. 1985. "Tasauf dan Pesantren" dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). *Pesanten dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.
- Mangoenkoesoemo, Goenawan. "De Goboorte van Boedi Oetomo". *Gedenkboek Boedi Oetomo 1908-1918*.
- Moedjanto, G. 1993. *Indonesia Abad Ke-20; Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggjati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, A. H. 1965. *Tentara Nasional Indonesia*. Jilid I. Djakarta: Jajasan Pustaka Militer.
- Noer, Deliar. 1991. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

- Notosusanto, Nugroho. "Djepang Kontra Belanda di Djawa Barat dalam Perang Dunia II". *Intisari*. No. 78, Januari 1970.
- 1979. *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Peacock, James L. 1986. *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*. Jakarta: Cipta Kreatif.
- Persatuan Ummat Islam. 1997. *Lambang, Mars, Hymne, dan Intisab*. Bidang Studi Ke-PUI-an. Seri I. Jakarta: Majelis Pengajaran PP PUI.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (eds.). 1990. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV, V, dan VI. Jakarta: Balai Pustaka
- Prawira, Suwandi Wigena. 1975. "K. H. Abdul Halim dan Santi Asromo" dalam *Panji Masyarakat*. No. 177. Tahun XVI.
- Raliby, Osman. 1953. *Documenta Historica; Sedjarah Dokumen dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jilid 1. Djakarta: Bulan Bintang.
- Ricklefs, M. C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosidi, Ajip (eds.). 2000. *Ensiklopedi Sunda; Alam, Manusia, dan Budaya (Termasuk Budaya Cirebon dan Betawi)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sewaka, R. 1955. *Tjorat Tjoret dari Zaman ke Zaman*. Bandung.

- Sjafrudin, Ateng et al., 1993. *Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat*. Bandung: Pemda Dati II Jawa Barat
- Soebardi, S. 1978. "The Pesantren Tarikat of Suralaya in West Java" dalam S. Udin (ed.). *SPECTRUM*. Jakarta: Dian Rakyat. Hlm. 215-236.
- Soetomo. 1934. *Kenang-Kenangan*. Soerabaja.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Stoddard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam*. Jakarta: Partita Penerbit.
- Sugardo. "Konferensi Djawa Barat" dalam *Mimbar Indonesia*. Edisi 3 Januari 1948
- Sukarsa, Dartum. 2007. *Potret K. H. Abdul Halim dalam Eksistensi Nasionalisme dan Perbaikan Umat (1887-1962)*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
- Sulasman. 2007. *K. H. Ahmad Sanusi; Berjuang Dari Pesantren hingga Parlemen*. Makalah untuk Seminar Persatuan Ummat Islam (PUI) tanggal 13 Juni 2007. Bandung.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1976. "Taman Siswa dalam Arsip-Arsip Hindia Belanda" dalam Majelis Luhur Taman Siswa. *Pendidikan dan Pembangunan; 50 Tahun Taman Siswa*. Yogyakarta: MLTS.
- Suwardjo, Suwardi; H. Slamet Sudjono; dan Edi Saputra. 1984. *Mohamad Rivai: Tanpa Pamrih Kupertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*. Jakarta: Intermassa.
- Wanta, S. 1986. "Persatuan Ummat Islam Pergerakan Modern". *Buletin Majelis Pendidikan dan Pengajaran PP PUI*. Majalengka.

- 1991. *K. H. Abdul Halim Iskandar dan Pergerakannya*. Buku Seri VI Ke-PUI-an. Majalengka: Majelis Penyiaran, Penerangan, dan Da'wah PUI.
- Wirasoeminta, Sanusi. 1995. *Rengasdengklok: Tentara PETA dan Proklamasi 17 Agustus 1945*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Yasni, Z. 1983. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Zuhdi, Susanto. 1995. "Pemerintahan Gerilya Sewaka dan Negara Pasundan Suria Kertalegawa; Studi Dinamika Politik di Daerah Pendudukan di Jawa Barat" dalam Zulfikar Ghazali. *Sejarah Lokal; Kumpulan Makalah Diskusi*. Jakarta: Depdikbud.

## **Media Massa**

*Asia Raja*. 28 Mei 1942.

----- 4 Mei 1942.

----- 11 Mei 1942.

*Bataviasch Niewsblad*, 13 Juli 1908.

*Fadjar Asia*, 29 Januari 1929.

*Kan Po*. Nomor Istimewa, 2602.

*Neratja*, 16 Maret 1921.

*Pandji Poestaka*, No. 2, 18 April 1942.

----- No. 2, 18 April 1942.

----- No. 23, 12 September 1942.

----- No. 26, 3 Oktober 1942.

----- No. 34/35, 8 Desember 1943.

*Soeara Persjarikatan Oelama.* No. 6, 7, 8. Tahun III. Juni-Agustus. 1931.

----- No. 89. Tahun IV. Agustus-September 1932.

*Utusan Hindia*, 21 April 1914

## **Internet**

*HADE Menang, Tim AMAN Menolak Menandatangan.* Diakses dari <http://www.kpu.jabarprov.go.id/?menTab=93&idMenuKiri=93&mod=addOApps/news/detailNews&idBerita=126&bulan=4&tahun=2008&idKategori=27>, tanggal 17 Mei 2008 Pukul 09.05 WIB

*Riwayat Hidup Ahmad Heryawan.* Diakses dari [http://www.ahmadheryawan.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=12&Itemid=28](http://www.ahmadheryawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=28), tanggal 17 Mei 2008 Pukul 09.05 WIB

## **Wawancara**

Fatah, Abdul. 71 Tahun. Mantan Santri K. H. Abdul Halim. Tanggal 30 Maret 2008 di Majalengka.

Fadlullah, K. H. Cholid. 73 Tahun. Cucu K. H. Abdul Halim. Mantan Ketua Umum PP PUI; Sekarang Ketua Dewan Penasihat PP PUI. Tanggal 7 April 2008 di Jakarta.

- Jacky, Asep. 35 Tahun. Buyut K. H. Abdul Halim dan Pengurus Yayasan K. H. Abdul Halim majalengka. Tanggal 30 Maret 2008 di Majalengka.
- Jaja, Jahari, Drs., M. Pd. 52 Tahun. Ketua Umum PUI Cabang Jawa Barat. Tanggal 14 April 2008 di Bandung.
- Mukri, Muhammad. 78 Tahun. Mantan Kuwu Pasirayu dan Santri K. H. Abdul Halim. Tanggal 30 Maret di Majalengka.
- Wanta, Suharya. 84 Tahun. Mantan Sekretaris Umum Majelis Pengajaran PP PUI. Tanggal 7 April 2008 di Bandung.

## Lampiran 1

### AZAS DAN TUJUAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN “SANTI ASROMO”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memuji syukur kehadirat Alloh SWT. Saya sebagai pengasuh “PERIKATAN UMAT ISLAM ” (yang sebelum tahun 1942 namanya “perserikatan ulama ” bagian Pengajaran dan Pendidikan dapat melakukan cita-citanya yang disahkan dalam kongres yang pertama untuk meluaskan langkahnya dalam perihal Pendidikan dan Pengajaran.

Sebelum saya menerangkan pokok pembicaraan tersebut di atas (azas dan tujuan Santi Asromo , saya menimbang perlu dan patut melukiskan riwayat asal usulnya, sehingga saya mendapat hadiah tanah yang letaknya di Desa Pasirayu Kecamatan Sukahaji, yang sekarang tempat saya namakan “SUKAMANAH ”.

Syahdan pada malam jum'at tanggal 21 sya'ban 1350 (Januari 1932 ) saya dengan Almarhum Muhamad Darjo berangkat ke Maja untuk keperluan perhimpunan. Setelah selesai lalu mengadakan juga pembicaraan dengan saudara-saudara di sana tentang Pengajaran dan Pendidikan, hingga larut malam, tidak ketinggalan tentang pendidikan Asromo-pun saya jadikan pokok pembicaraan dalam pertemuan itu. Diantara beberapa saudara yang saya ajak bercakap-cakap itu ada salah seorang saudara yang bernama M. ARJASUBRATA dari Desa Ciomas (anak sulung M. ARJAWINATA ). Setelah jauh pembicaraan saya dan kawan-kawan tadi, serta mendapat desakan pertanyaan yang katanya: “Kapankah pembicaraan saudara ini hendak laksanakan?” saya jawab ; belum saya dapat menentukannya, berhubung tidak ada tanah yang cocok pemandangannya dan hawanya. Ada juga di Desa Gintung tetapi belum terbeli . Kemudian M ARJASUBRATA tadi mengatakan, baiklah kalau saudara ada tempat

agar memerlukan datang ke Ciomas untuk merundingkan hal ini. Terus saya jawab: "baiklah dan terima kasih".

Selang beberapa hari, kemudian pergilah saya dengan saudara BRATASURYA (Maja) pada bulan puasa ke Ciomas, di sana menginap satu malam. Dalam pertemuan bertiga itu tiada lain yang dibicarakannya hanya soal Santi Asromo saja.

Pada waktu kami melihat-lihat tanah itu, yang kemudian kembali lagi ke rumah saudara tersebut, dan kebetulan saudara M ARJAWINATA pun sudah ada, maka dengan takdir Tuhan jatuhlah tanah tersebut yang luasnya 2 bau 40 bata menjadi milik saya. Dan ketika M. ARJAWINATA dan dengan anaknya M. ARJASUBRATA selaku yang menghadiahkan, dengan berlinang linang air matanya. Kemudian orang itu nampaknya boleh jadi karena keikhlasan hatinya. Mereka berkata : "kami berdua menghadiahkan tanah ini kepada tuan guna keperluan pendidikan dan pengajaran anak-anak kita ummat Islam. Mereka se-anak anak kerabatnya sering mengatakan, kalau nanti ada kekurangan insya Alloh akan mengusahakan lagi.

Kami berterima kasih dengan gembira dan ikhlas hati, semoga Tuhan mengabulkan amalnya itu. Sejak saya menulis risalah ini saudara mereka sama giat untuk membantu dengan tenaga dan harta. Kami memohon kepada Alloh mudah-mudahan mereka senantiasa membantu untuk meneruskan pekerjaan kami ini adanya.

Sekianlan saya cukupkan tarikh yang ringkas (tarikh menyendir) dan insya Alloh saya akan usahakan dengan sekuat tenaga.

**H. ABDUL HALIM**

Disalin dari tulisan asli H. Abdul Halim oleh Abdul Fatah tanggal 23-02-1980 dan oleh Masyhudi tanggal 01 Juni 1988.

**PEMANDANGAN UMUM**

Firman Alloh dalam surat Al Baqoroh ayat 61 berbunyi ;

أَهْبِطُوا مِصْرًا  
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلْلَةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَأْءُوا بِعَذَابٍ  
مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

Artinya : ... turunlah kamu ke kota, maka sungguh ada di sana apa-apa yang kamu pinta. Maka mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan dan kembali mereka sambil membawa kemarahan dari Alloh.

Syahdan adapun riwayat kerusakan, kelemahan dan kesengsaraan yang diderita kaum bani Isroil pada zaman dahulu kala itu, seolah-olah menjadi pelajaran, peringatan dan pendidikan bagi segenap kaum Muslimin pada tiap-tiap masa dan zaman.

Asal jatuhnya kaum Bani Isroil mendiami tanah TIKH, sebuah pegunungan yang tidak menbanyakkan pergaulan dengan lain-lain golongan, setiap saat mereka menghisap hawa yang bersih lagi sejuk yang mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan badan, sehingga mereka itu menjadi golongan yang hidup seja sekata, harga menghargai, tolong menolong diantara satu sama lain, mereka terhindar dari beberapa macam penyakit yang berasal dari pada berjenis-jenis makanan.

Dengan sebab itulah selain dari pada hidup mereka dalam kerukunan yang teguh itu, mereka juga termasuk sebahagian manusia yang kuat, gagah berani, sehat jasmani dan rokhaninya. Mereka masih terjauh dari sifat-sifat kekotoran dan kebusukan yang pada umumnya sifat-sifat ini meraja lela pada golongan manusia yang mendiami kota-kota yang ramai.

Sifat-sifat itu ditaruhnya, munafik pendusta, penipu kikir, tamak rakus, kerendahan budi pekerti dan lain-lain sebagainya yang merusak kesehatan badan dan kesempurnaan roh dan jiwanya. Sifat-sifat inilah yang membangkitkan macam-macam syahwat kebinatangan

dan menjerumuskan mereka ke lautan kedurhakaan, persundalan dan pelacuran menjalar, terlebih-lebih pada kalangan pembesar-pembesarnya, karena mereka itu lebih cukup untuk mengadakan alat-alat syahwat yang menimbulkan syahwat kebinatangan itu. Dalam sebab itu hilanglah sifat-sifat takut kepada Alloh SWT. Dan tidak ada bersyukuran atas nikmat Alloh yang telah diberikan kepada mereka itu.

Dengan hal yang demikian itu pula maka hilanglah juga keamanan dan kesentosaan antara mereka dan bercabul pula macam-macam penyakit yang menyerang kesehatan yang disebabkan oleh kerusakan rupa-rupa makanan yang memenuhi perutnya yang mengakibatkan mereka menjadi golongan manusia yang sangat penakut dan lemah, tidak mempunyai daya upaya untuk menjaga kehormatan agama dan tanah airnya dari penyerangan musuhnya.

Meskipun ada juga bagi kerajaan yang besar dan kuat yang mempunyai prajurit dan alat-alat senjata yang lengkap sehingga bisa menyelam ke dalam air laksana ikan, dan terbang ke udara bagaikan burung untuk menjaga kehormatannya, dan memerangi golongan yang lainnya pula dengan kekuatan tadi, akan tetapi hal itu tidak memberi manfaat bagi mereka, sebab hal itu timbul dari sifat-sifat kerakusan ketamakan yang kesudahannya mendatangkan kerugian dan kerusakan belaka.

Adapun golongan manusia yang ada di pegunungan yang sehat jasmani dan rokhaninya, yang tidak dapat dorongan syahwat keseitanan dan masih pula tetap kemanusiaannya, maka golongan inilah masuk jumlah umat mulia bagi Alloh SWT. Dan seandainya mereka mempunyai senjata lengkap seperti tersebut di atas, niscayalah dengan sebentar saja mereka bisa membasmi golongan orang yang ada di kota-kota yang hidupnya itu hanya untuk menyesatkan alam belaka.

Maka dari itu kita dapat melihat beberapa bukti dalam tarikh dunia, bahwa suatu golongan kekuasaan yang kuat itu, lama kelamaan jatuh di tangan manusia yang berasal dari pegunungan, hal mana cocok dengan firman Alloh dalam surat Ali Imron ayat 140 yang artinya “hari-hari itu kami jadikan hari kemenangan dan kekuasaan gantimberganti diantara golongan manusia”.

Tak ubahnya dengan kerajaan Rum pada zaman dahulu kala yang sangat kuat dan besar kekuasaannya, lama lama jatuhlah pada tangan sesuatu golongan yang berasal dari tanah pegunungan. Meskipun mereka penuh dengan kebodohan dan tak pernah memakai pakaian yang terbuat oleh golongan yang lain dan tak pernah pula merasai kenikmatan dan kelezatan hidup di kota-kota yang besar .

Demikian pula golongan Arab yang sudah termasyhur sifat kebinatangannya yang hidup di tanah-tanah pegunungan, setelah Alloh SWT. Menurunkan Nabi Muhamad SAW. Dari golongan mereka sendiri dengan diberi suatu WET untuk mengatur keselamatan manusia di dunia sampai di akherat dan untuk membasmikan segala kedoliman dan kekotoran yang terwujud di muka bumi ini. Dengan sebentar mereka itu sadar dari pada sifat-sifat kebinatangannya terutama pula pada hati mereka sifat-sifat kemuliaan dari agama yang dibawa oleh Nabi Besar Muhamad SAW.

Kemudian mereka bekerja dengan sekuat tenaga untuk membasmikan kezaliman yang meraja lela pada golongan manusia di zaman itu. Dalam waktu yang pendek sekali, mereka bisa memegang dan memiliki beberapa kerajaan besar, seperti kerajaan Rum, Parsi dan lain lainnya yang umumnya kerajaan-kerajaan pada zaman itu menjalankan kehendak hawa nafsu dan kezalimannya dengan sesuka hatinya.

Pada waktu itu pula kita dapatkan di dunia barat (Eropa) beberapa kerajaan yang sudah beratus ratus tahun lamanya dalam kemajuan dan kesenangan, sehingga kemajuna itu sudah menjadi buah bibir tiap tiap manusia yang hidup di bawah langit semasa itu. Akan tetapi dengan sebab firman Alloh di atas , pada waktu itu mereka terbukti sudah menentukan pula reelnya dari keadilan kepada kezaliman dan ketamaan. Nampak dalam sekolah sekolah mereka sudah penuh dengan pendidikan yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan menanam benih benih kebencian pada hati mereka terhadap sesama manusia .

Dengan kejadian kejadian yang telah diriwatatkan oleh tarikh dunia sebagai di atas, maka terbayanglah bahwa aturan-aturan yang tidak menurut aturan-aturan yang ditetapkan Alloh SWT. Dan tidak pula

mengandalkan usaha dan pendidikan kepada tuntunan Illahi yakni aturan yang hanya menurut pendapat akal manusia belaka niscaya akhirnya tak akan mendapat keselamatan di duia dan di akheratnya. "DARI SEBAB ITU DI TEMPAT TEMPAT YANG RAMAI YANG KEBANYAKAN TIDAK MENURUT ATURAN SYAR'I, SANGATLAH SUSAH BAGI KITA MENANAM PENDIDIKAN YANG MENURUT ATURAN ILLAHI, SEBAB BANYAK GODAAN-GODAANNYA. MAKA TERPAKSALAH KITA HARUS MENGASINGKAN TEMPAT PENDIDIKAN ITU KE TEMPAT YANG SEPI DARI KEKOTORAN DAN GODAAN, AGAR PENDIDIKAN ITU BISA HIDUP SUBUR DAN KUAT DI HATI ANAK-ANAK KITA "

Inilah sebabnya PERIKATAN UMAT ISLAM mengadakan tempat pendidikan yang terasing dari tempat-tempat yang ramai, yang diberi nama SANTI ASROMO .

Syahdan setelah saya terangkan tafsir ayat yang tadi, fatsir mana yang sungguh menjadi dasar PERIKATAN UMAT ISLAM mengadakan pula sebuah tempat pendidikan dan pengajaran yang selaras dengan waktu dan zaman, dan terasing dari tempat yang ramai.

Tuan-tuan yang terhormat tentu memperhatikan betul-betul keterangan tadi. Akan tetapi mungkin ada yang was was juga sebagian orang-orang dalam cara menempatkan pendidikan dan pengajaran penjajahan yang sebenarnya soal ini tidak boleh diragu-ragukan lagi. Sebab diakui atau tidak diakui, terasa atau tidak terasa sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa kepentingan mereka adalah menjadi haluannya yang terutama. Sehingga dijadikan pedoman dalam segala aturan dan taktik yang dipandang dunia Islam pada umumnya sudah sering kali kita katakan, di dalam urusan dunia-wiyah masih tetap dalam kekalahan, padahal bukan kehendak Islam. Ini hanya lelemahan dan kelalaian umat Islam sendiri yang menempatkan diri di lapisan yang rendah, seolah-olah tidak cakap mempraktekkan kemurahan Alloh SWT.

Santi Asromo itu adalah nama sebuah tempat pendidikan dan pengajaran yang ada diantara Desa Ciomas dan Desa Pasirayu Kecamatan Sukahaji Kewadanan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, yang tujuannya hendak *menyebarluaskan pelajaran dan pendidikan Islam di tempat yang sunyi*.

Nama itu mudah-mudahan saja tidak menjadikan syak kepada tuan-tuan dan saudara-saudara pembaca, seolah-olah anak-anak kita akan dibawa kearah "KEBUDHAAN ". Hal ini jauh sekali dari cita-cita saya. Karena perkataan Santi Asromo itu kalau dibandingkan dengan perkataan Santri atau Kiyai tak ada bedanya, karena dua perkataan ini-pun bukan asal bahasa indonesia, kesemuanya berasal dari bahasa sangsekerta.

Besar hati saya, dengan perantaraan ini saya dapat menerangkan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara kaum muslimin, terutama kepada saudara-saudara yang memperhatikan nasib anak-anak kita untuk masa yang akan datang.

Keadaan Santi Asromo boleh saya jelaskan dengan singkat sebagai berikut

1. Nama Pondok Mufidah "Santi Asromo" yang berarti Tempat Damai, untuk memperpadukan pengetahuan barat dan timur atas dasar-dasar Islam.
2. Pelajaran yang diusahakan pada permulaan ini dibagi tiga bagian:

- a. Pelajaran Tahdiri.
- b. Pelajaran Ibtidaiyah.
- c. Pelajaran Tsanawiyah

Pelajaran dan ketrampilannya tidak ada bedanya dengan madrasah-madrasah PUI yang sudah ada, ditambah dengan praktek, dengan disediakannya rupa-rupa perkakas keperluannya seperti : perkakas bercocok tanam, tukang besi dan kayu , pertenunan sederhana, obat-obatan dan sebagainya. Pelajaran rupa-rupa bahasa pun tidak dilupakan, kesemuanya ini akan menjadi penolong anak-anak murid kita dalam mencari rizki yang halal dikemudian hari jika sudah dewasa serta dapat hidup dengan penghidupan yang bebas dan merdeka.

3. Murid-murid akan tetap tinggal selama belajar dalam tempat itu dengan mendapat pimpinan dari salah seorang guru yang ditetapkan untuk memimpinnya pada tiap-tiap hari dan dibantu oleh beberapa pergaulan dengan teman-temannya. Pada siang selalu mendapatkan pengamatan,

- demikianpun makan, mimum, pakaian diatur dengan sederhana dan dikerjakan oleh mereka sendiri.
4. Tempat pelajaran diatur dengan cara yang sederhana juga, agar anak-anak itu tidak merasa asing dari tempat kediemannya sendiri. Seminggu sekali murid-murid diberi pelajaran riwayat atau tarikh ulama-ulama dan pemuka-pemuka Islam, terutama tarikh Nabi-Nabi dengan secara opentucht.
  5. Pelajaran khutbah ( pidato ) diajarkan pula agar anak-anak itu kelak dapat berbicara dimuka umum dengan tangkas dan dapat menarik hati orang banyak untuk mengerjakan segala kebaikan bersama yang diperintahkan Alloh SWT. Adapun azas dan tujuannya tak usah saya terangkan kembali, karena dalam permulaan risalah inipun saudara-saudara telah bersua dengan keterangan-keterangan saya, ialah tafsiran ayat 61 surat Al Baqoroh tadi.  
Di sini saya perlu mengemukakan sedikit perbedaan pelajaran dan pendidikan. Sebagaimana tuan-tuan pembaca yang terhormat telah maklum bahwa pelajaran dan pendidikan itu memang pada hakekatnya ada perbedaan. Pelajaran memadai dengan apa-apa yang diajarkan, sedangkan pendidikan melengkapi segala pimpinan jasmani dan rokhaninya (*Leiding bij de geesbeleiyken en lickameleyken groel*). Maka yang saya maksudkan dan cita-citakan ialah yang kedua, ialah pendidikan.
  6. Dari hal pendidikan akhlaq buat kita kaum muslimin yakni menurut aturan agama Islam, tidak saya khususkan satu-satunya vak. Adapun pembagian pelajaran dan macam-macamnya ilmu dan caranya memberi pelajaran saya atur dalam judul harian dengan singkat susunan pelajaran ini bukan school system akan tetapi pondok system. Dan dituntun juga tentang cara menjaga keamanannya diantara sesama murid-murid, agar jangan sampai ada kejadian diantara sesama mereka yang bertabiat rakus, tamak, penindas, penghianat, judas dan lain sebagainya, yang mana

***Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim; Lampiran***

sifat-sifat ini dapat tuan-tuan pembaca melihat dalam pergaulan hidup pada masa sekarang ini.

7. Perkara priperibadatan terhadap Alloh SWT. Seperti sembahyang dan lain-lainnya, tuntunannya akan dibuatkan juga, agar anak-anak kita kelak di hari kemudiannya biasa beribadah kepada Alloh SWT.
8. Buat melakukan yang tersebut dalam no 5 dan 6 diatur dengan secara gemeente Islam, ini saya ambil dari kitab karangan Abu Hasan Mawardi. Publiek en Administratief reeht van der Islam .

Sampai disini rencana ini saya habisi dan bantuan dari segenap Muslin dan Muslimat sangat kami harapkan.

Wassalam

H. Abdul Halim

Santi Asromo Ramadhon 1350 (Januari 1932). Disalin ulang tanggal 3 Februari 1958 dan 23 Februari 1980 oleh Abdul Fatah dan tanggal 01 Juni 1988 oleh Dedi Masyhudi.

Sumber: Dokumentasi Pondok Santi Asromo, 2004.

## Lampiran 2

### Jejak Peninggalan Perjuangan K. H. Abdul Halim Yang Terdokumentasikan dalam Foto



Keterangan: Perguruan Daarul Ulum. Disinilah KH. Abdul Halim mulai menapakkan cita-citanya dengan mendirikan *Majlisul Ilmi*, yang kemudian menjadi *Hayatul Qulub*, dan *Sekolah Guru Islam (SGI)* di Majalengka.

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim; Lampiran**



Keterangan: Gedung Balai Permusyawaratan Muslimin (Bapermin) didirikan pada tahun 1953 dan direnovasi pada tahun 2003.

**Riwayat Perjuangan K. H. Abdul Halim; Lampiran**



Keterangan: Ruangan bekas PB PUI ini sekarang menjadi ruang Pimpinan Daerah PUI Kabupaten Majalengka.



Keterangan: Madrasah Aliyah Putri Majalengka didirikan pada 5 April 1961 dengan nama Madrasah Mu'alimat PUI



Keterangan: STAI PUI Majalengka. Sebelumnya merupakan gedung Madrasah Pertanian yang didirikan tahun 1961. Namun pada tahun 1964 Madrasah Pertanian dipusatkan di Santi Asromo. Oleh para kader PUI, di lokasi bekas Madrasah Pertanian ini didirikan Pendidikan Tinggi Islam (PTI) dan sekarang menjadi STAI Majalengka dan SMK PUI Majalengka.